

2020

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report



FOSTERING A GREENER FUTURE THROUGH RESILIENT PROGRESS



Daftar Isi

Table of Contents

3

Strategi Keberlanjutan

Sustainability Strategy

5

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainable Performance Highlights

12

Profil Perusahaan

Company Profile

19

Laporan Direksi

Board of Directors Report

23

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

43

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Stakeholder Engagement

50

Tinjauan Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Review

61

Pemberdayaan Masyarakat

Community Empowerment

63

Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Environmental Management and Conservation

67

Produk dan Layanan yang Setara dan Berkelanjutan

Sustainable and Equitable Products and Services

70

Indeks Isi GRI

GRI Content Index

72

Glosarium

Glossary

Mengenai Laporan Ini

About This Report

102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56

Laporan ini merupakan Laporan Keberlanjutan 2020 PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF" atau "Perusahaan").

Laporan ini memuat kinerja IIF dalam aspek keberlanjutan, mulai dari lingkungan hingga sosial dan lebih dari itu, yang menjadi bagian dari jati dirinya sebagai katalisator pembiayaan infrastruktur Indonesia. Laporan ini melaporkan pencapaian dan tantangan yang saat ini dihadapi IIF dalam menyikapi isu keberlanjutan dalam upaya menciptakan nilai bagi masyarakat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.

Periode pelaporan yang tercakup dalam laporan ini adalah sepanjang tahun 2020.

IIF menerbitkan laporan keberlanjutannya satu tahun sekali, dengan masa pelaporan per satu tahun. Tahun 2019 menjadi tahun pertama penerbitan laporan keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan 2019 IIF diterbitkan pada 18 Agustus 2020.

Laporan Keberlanjutan 2020 tidak memuat pernyataan ulang yang signifikan dalam ruang lingkup atau skala informasi yang disajikan di laporan tahun-tahun sebelumnya. Semua laporan keberlanjutan IIF tersedia di situs resmi IIF, di <https://iif.co.id/id/hubungan-investor/informasi-keuangan/laporan-berkelanjutan/>.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan 2020 ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyajian laporan keberlanjutan bagi perusahaan publik, terutama Peraturan OJK No. 51/2017, serta standar yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). IIF tidak menggunakan jasa *assurance* dari pihak eksternal yang independen untuk menilai isi dari Laporan Keberlanjutan 2020 ini.

Laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar GRI: Opsi Inti. Indeks Isi GRI diberikan pada bagian akhir dari laporan.

Ini adalah pertama kalinya IIF mengadopsi Standar GRI: Opsi Inti untuk pelaporan keberlanjutannya. Laporan Keberlanjutan 2020 berisi pengungkapan topik material dan batasan topik yang belum ditentukan dalam Laporan Keberlanjutan 2019.

Dalam menentukan konten laporan dan batasan untuk setiap topik material yang dipilih untuk laporan ini, IIF telah menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan sebagaimana ditentukan oleh Standar GRI. Prinsip Materialitas telah digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi topik material.

This is the 2020 Sustainability Report of PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF" or "the Company").

This report highlights IIF's performance in sustainability aspects ranging from environmental to social and beyond, as part of its business as a catalyst of the Indonesian infrastructure financing sector. Aside from the achievements, this report also presents the challenges currently faced by IIF in addressing sustainability issues as it strives to create value for the Indonesian society through infrastructure development.

The reporting period covered in this report is the entire year of 2020.

IIF publishes its sustainability report once every year, with an annual reporting cycle, with 2019 being the first year of publication. IIF's 2019 Sustainability Report was published on 18 August 2020.

The 2020 Sustainability Report contains no restatements that are significant in scope or scale of information presented in its previous years' reports. All of IIF's sustainability reports over the years are available on IIF's official website, at <https://iif.co.id/en/investor/financial-information/sustainability-report/>.

The preparation of this 2020 Sustainability Report refers to the prevailing laws and regulations that pertain to the presentation of sustainability reports for public companies, chief of which is the OJK Regulation No. 51/2017, as well as the standards set forth by the Global Reporting Initiative (GRI). IIF has not engaged an independent external party to provide assurance on the contents in this 2020 Sustainability Report.

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. The GRI Content Index is provided in the final section of this report.

This is the first time that IIF has adopted the GRI Standards: Core option for its sustainability reporting. The 2020 Sustainability Report contains disclosures on material topics and topic boundaries that had not been determined in the 2019 Sustainability Report.

In determining the report content and boundaries for each material topic chosen for this report, IIF has implemented the Reporting Principles as prescribed by the GRI Standards. The Materiality principle has been employed as a guideline in identifying material topics.

Karena bisnis utama IIF berada dalam bidang pembiayaan infrastruktur dan bisnis konsultasi di Indonesia, dampak bisnis IIF yang paling utama pada sektor keberlanjutan muncul dari proyek-proyek yang dibiayainya. Sehingga, meskipun IIF adalah satu-satunya entitas yang termasuk dalam laporan keuangannya, laporan ini memuat pengungkapan beberapa pencapaian dan dampak tertentu yang asalnya tidak langsung dari IIF sendiri, melainkan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh IIF. Dalam penyusunan laporan ini, IIF telah mempertimbangkan secara menyeluruh asumsi-asumsi tertentu dan telah memutuskan untuk memasukkan beberapa data keberlanjutan dari proyek-proyeknya dalam laporan ini, dengan tujuan untuk menyoroti apa, bagaimana, dan di mana dampak terhadap keberlanjutannya paling menonjol.

Dalam memprioritaskan materialitas topik berdasarkan prinsip-prinsip Standar GRI, IIF menggunakan Prinsip Sosial & Lingkungan (SEP) IIF—dijelaskan lebih lanjut dalam bagian terpisah di laporan ini—untuk mempertimbangkan dampak setiap topik terhadap keputusan pemangku kepentingannya, dalam hal ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka topik material dalam laporan ini telah ditetapkan sebagai berikut, tanpa urutan tertentu:

- Dampak Ekonomi Tidak Langsung
- Anti-Korupsi
- Energi
- Air dan Efluen
- Keanekaragaman Hayati
- Emisi
- Ketenagakerjaan
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pelatihan dan Pendidikan

Pendekatan dan pengungkapan manajemen yang relevan terkait dengan topik material di atas telah tersedia di masing-masing bagian dalam Laporan Keberlanjutan ini. Batasan topik berbeda-beda berdasarkan setiap topik material, dan deskripsi telah tersedia untuk setiap topik.

Untuk semua urusan korespondensi terkait Laporan Keberlanjutan ini, IIF menyediakan beberapa jalur yang dapat dihubungi:

As IIF is primarily in the infrastructure financing and advisory business in Indonesia, IIF's most salient impacts on sustainability arise from the projects that it serves. Therefore, while IIF is the sole entity included in its financial statements, this report contains certain disclosures of achievements and impacts obtained not directly from IIF per se, but rather from IIF-financed projects. In preparing this report, IIF has thoroughly considered certain assumptions and made several judgements to include some of its projects' sustainability data in this report, with the sole purpose of highlighting what, how, and where IIF's impacts on sustainability have been the most prominent.

In prioritising the materiality of topics based on the GRI Standards' principles, IIF has used its own Social & Environmental Principles (SEP)—detailed in a later section in this report—to consider each topic's impact on the decisions of its stakeholders, in terms of the economy, the environment, and society.

Based on such consideration, the material topics in this report have been determined as follows, in no particular order of importance:

- Indirect Economic Impacts
- Anti-Corruption
- Energy
- Water and Effluents
- Biodiversity
- Emissions
- Employment
- Occupational Health and Safety
- Training and Education

The relevant management approaches and disclosures related to the above material topics have been provided in the respective sections in this Sustainability Report. Topic boundaries vary according to each material topic, and descriptions have been provided for each topic accordingly.

For all matters of correspondence related to this Sustainability Report, IIF provides the following avenues for contact:

**Sustainable Finance Working Group (SFWG)
PT Indonesia Infrastructure Finance**
Prosperity Tower 53rd – 55th Floor, District 8
Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (+62) 21 5082 6600
Fax: (+62) 21 5082 6601
Email: SFWG.Coord-Secr@iif.co.id

STRATEGI KEBERLANJUTAN

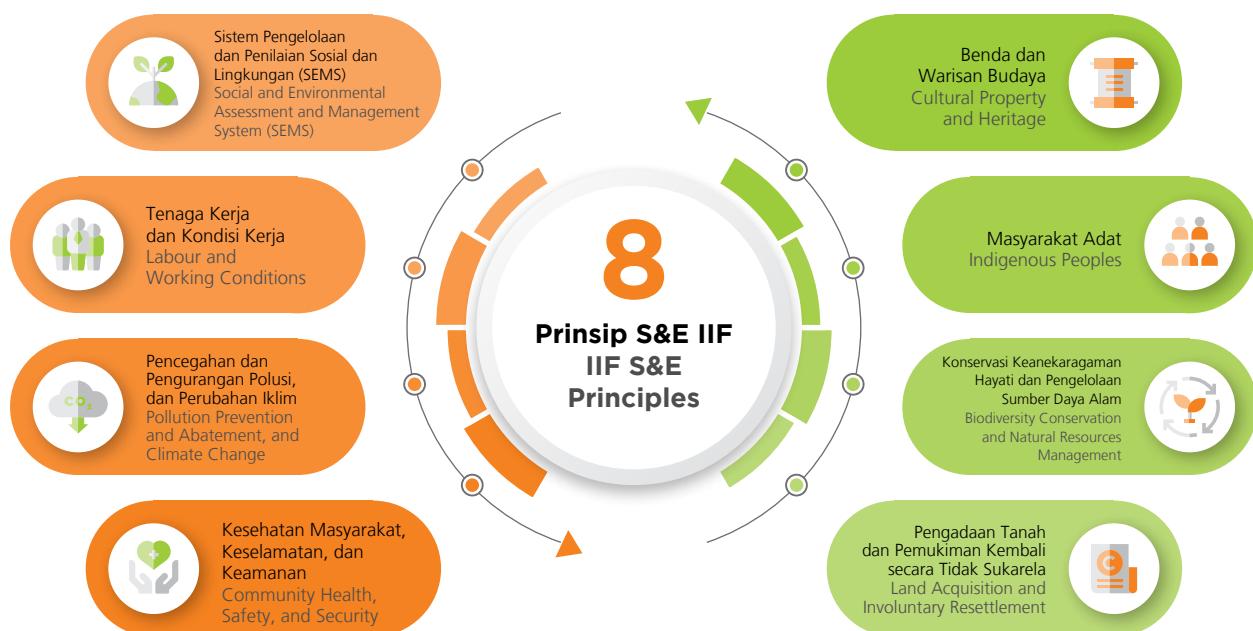
Sustainability Strategy

Bagi Perseroan, sebagai badan usaha yang menyediakan pembiayaan dan layanan konsultansi bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, pembangunan infrastruktur merupakan elemen krusial bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Perseroan memitigasi dampak negatif yang dapat timbul dengan menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan pada setiap proyeknya, dengan menyeimbangkan manfaat ekonomi proyek tersebut dengan aspek Sosial dan Lingkungan (*Social & Environment—S&E*) dari proyek.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang dianut Perseroan menjadikan konsep *triple bottom line* yang terdiri dari *people*, *planet*, dan *profit* sebagai landasan strategi keberlanjutannya. Prinsip tersebut diterapkan melalui mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan prinsip S&E yang selanjutnya digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai pemilihan proyek infrastruktur yang akan dibiayai.

Untuk membantu klien menerapkan prinsip S&E yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, Perseroan telah menyusun standar kinerja bernama Sistem Pengelolaan dan Penilaian Sosial dan Lingkungan (SEMS) yang membantu semua pihak mengikuti prinsip S&E.

Prinsip S&E IIF adalah:



As a business entity that finances and advises infrastructure development in Indonesia, the Company considers infrastructure development as crucial to the nation's economic growth. However, infrastructure development also has the potential to create negative impacts. The Company therefore strives to mitigate the negative impacts that may arise by implementing the principles of sustainable development in every project that it finances, by balancing the project's economic benefits with its Social & Environment (S&E) aspects.

The sustainable development principles adopted by the Company are grounded upon the triple bottom line concept consisting of people, planet, and profit. This concept becomes the foundation of its sustainability strategy. These principles are applied through a financing mechanism that is integrated with S&E principles, which are in turn used in making decisions regarding the selection of infrastructure projects to be financed.

To assist clients in implementing the S&E principles, which are expected to improve the quality of life of the community while protecting the environment, the Company has developed a performance standard called the Social and Environmental and Management System (SEMS), which assists all parties in implementing the S&E principles.

IIF S&E Principles are:



Divisi Sosial & Lingkungan (SED) Perseroan, yang terdiri dari para ahli dan praktisi dalam pengelolaan sosial dan lingkungan, memastikan bahwa proyek-proyek investasi Perseroan dilaksanakan sesuai Pedoman Operasi dan SEMS. Penerapan delapan prinsip S&E tersebut telah memberikan beragam manfaat bagi pihak klien, di antaranya adalah:

- Membantu klien mengelola risiko-risiko terkait aspek sosial dan lingkungan sepanjang siklus bisnisnya.
- Membangun hubungan baik dengan masyarakat terdampak dan juga masyarakat sekitar proyek.
- Meminimalisasi dampak negatif pada sosial dan lingkungan.

Sebagai bagian rencana jangka panjangnya, Perseroan telah mempersiapkan rencana dan strategi bisnis lima tahun untuk periode 2019–2024. Rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan Keuangan Berkelanjutan Perseroan, yakni membiayai pembangunan infrastruktur yang menerapkan aspek sosial dan lingkungan untuk setiap proyek yang dibiayai melalui strategi utama Perseroan, antara lain:

1. Penerapan standar S&E dalam proyek yang didanai;
2. Tata kelola perusahaan yang baik;
3. Pengelolaan manajemen risiko dan penguatan sumber daya manusia dan kapasitas organisasi; dan
4. Peningkatan portofolio investasi pada proyek infrastruktur yang berprinsip sosial dan lingkungan.

The Company's Social & Environmental Division (SED), which consists of experts and practitioners in social and environmental management, ensures that the Company's investment projects are carried out in accordance with the Operational Guidelines and SEMS. The implementation of the eight S&E principles has provided various benefits for clients, such as:

- Assisting clients in managing the risks related to social and environmental aspects throughout their business cycle.
- Fostering a sound relationship with the affected community and also the surrounding community.
- Minimising the negative impacts on the society and environment.

As part of its long-term sustainability plan, the Company has established a five-year business plan and strategy for the 2019–2024 period. The long-term plan has been designed to achieve the Company's Sustainable Finance objective, i.e., to sustainably finance the development of infrastructure that abides by social and environmental aspects in every project financed through the Company's main strategies, namely:

1. Implementation of S&E standards in the projects under its financing;
2. Good corporate governance;
3. Risk management as well as human resources and organisational capacity enhancement; and
4. Investment portfolio expansion through projects that are aligned with social and environmental principles.

Peta Jalan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan 2019–2024

Sustainable Finance Action Plan Roadmap 2019–2024



IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainable Performance Highlights

Rangkuman Kinerja
Performance Summary



Jumlah Aset
Total Assets
(Rp miliar / Rp billion)



Jumlah Pendapatan
Total Revenue
(Rp miliar / Rp billion)



Laba Bersih
Net Profit
(Rp miliar / Rp billion)



Komitmen Investasi
Bersih
Net Investment
Commitment
(Rp miliar / Rp billion)

2018

10,573

2019

12,311

2020

14,684

2018

765

2019

838

2020

912

2018

(43)

2019

16

2020

43

2018

10,987

2019

12,770

2020

14,098



Jumlah Pembiayaan
Proyek Infrastruktur
yang BerkelaJutan
Total Financing Provided
to Environmentally
Sustainable
Infrastructure Projects
(Rp miliar / Rp billion)



Pembayaran Pajak
kepada Pemerintah
Tax Payments to the
Government
(Rp miliar / Rp billion)



Pembayaran
Dividen kepada
Pemegang Saham
Dividend Payments to
Shareholders
(Rp miliar / Rp billion)



Gaji dan Tunjangan
Karyawan
Employee Salaries and
Benefits
(Rp miliar / Rp billion)

2018

10,987

2019

12,770

2020

14,098

2018

14

2019

14

2020

13

2018

0

2019

0

2020

0

2018

83

2019

97

2020

110

Ikhtisar Pembiayaan Sektor Usaha Ramah Lingkungan
Summary of Financing to Eco-Friendly Business Sectors

Porsi Pembiayaan (% dari Total Portofolio)
Portion of Financing (% of Total Portfolio)

Jalan
Road



2018

17.8

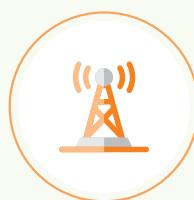
2019

27.8

2020

22.9

Telekomunikasi & Informatika
Telecommunications & Informatics



2018

9.0

2019

13.2

2020

14.0

Air Minum
Drinking Water



2018

13.2

2019

10.0

2020

11.2

Minyak dan Gas
Oil and Gas



2018

7.5

2019

4.7

2020

4.1

Ketenagalistrikan
Electricity



2018

27.9

2019

23.0

2020

25.3

Bandara
Airport



2018

13.8

2019

10.5

2020

8.6

Pelabuhan
Port



2018

6.9

2019

5.5

2020

4.7

Lainnya
Others



2018

3.9

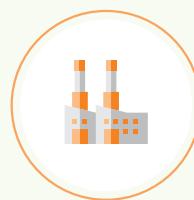
2019

5.3

2020

5.7

Kawasan Industri
Industrial Estate



2018

-

2019

-

2020

3.5

Total
Total

2018

100.0

2019

100.0

2020

100.0

Seluruh komitmen pembiayaan di IIF pada tahun 2020 diberikan kepada proyek-proyek yang memenuhi prinsip pembiayaan berkelanjutan. Dengan demikian, 100% sektor yang dibiayai IIF merupakan sektor yang berkelanjutan dan dengan demikian dampak negatifnya terhadap lingkungan dapat dimitigasi dengan baik dan sepenuhnya.

All of IIF's financing commitments in 2020 were awarded to projects that fulfill the sustainable financing principles. Thus, 100% of the sectors that IIF is financing are deemed sustainable sectors, and therefore their negative impacts on the environment have been and will continue to be fully and properly mitigated.

Pelibatan Pihak Lokal dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan

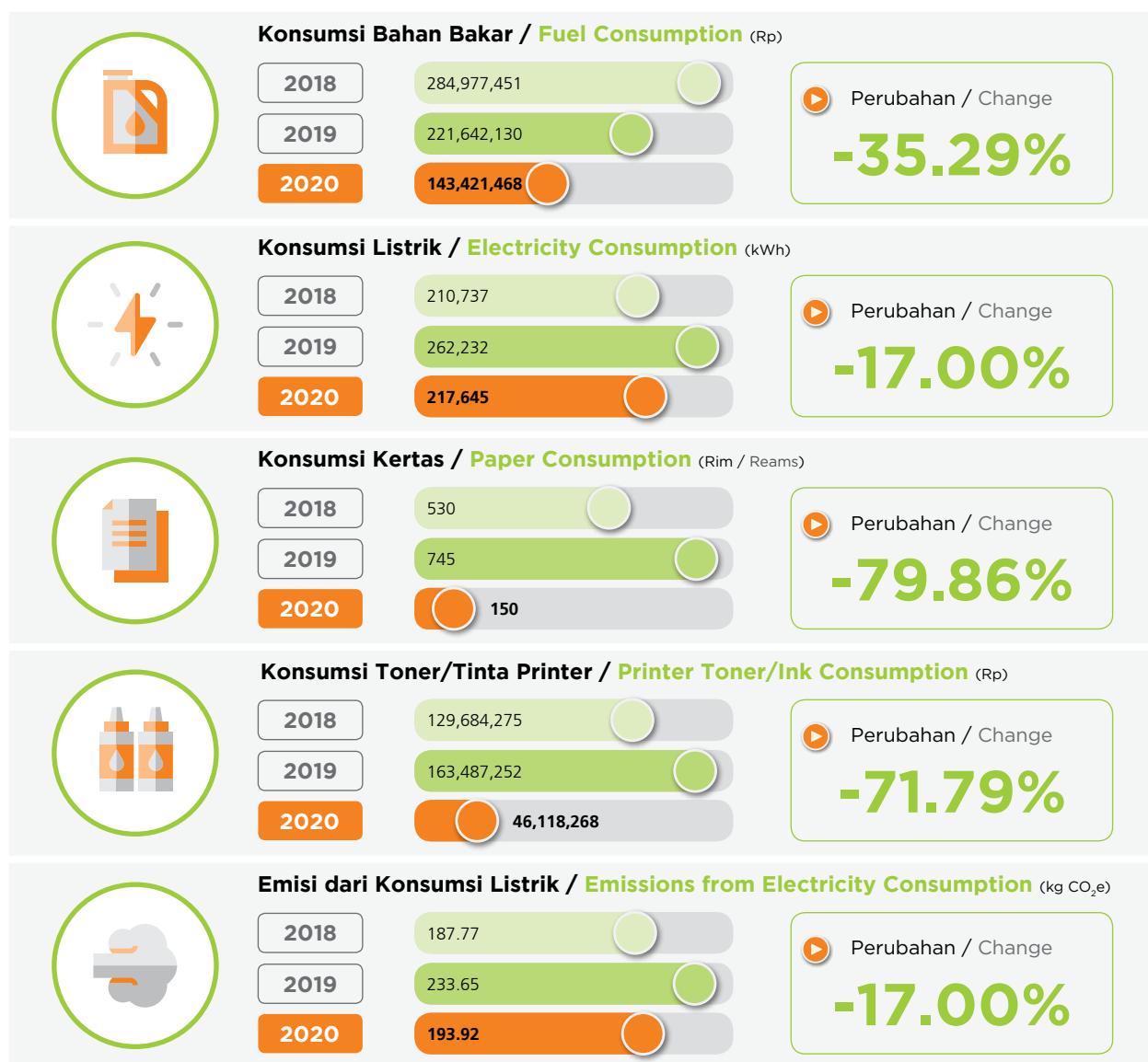
Selain karyawan IIF sendiri dan pihak-pihak lokal yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF (dan dengan demikian berada di luar cakupan pelaporan ini), tidak ada pihak lokal lainnya yang dilibatkan dalam penyaluran pembiayaan oleh IIF kepada proyek-proyek tersebut.

Involvement of Local Parties in Sustainable Finance Initiatives

Aside from IIF employees themselves and the local parties that may be related to the projects (and therefore are outside IIF's scope of reporting), IIF does not involve other local parties in its financing of the infrastructure projects.

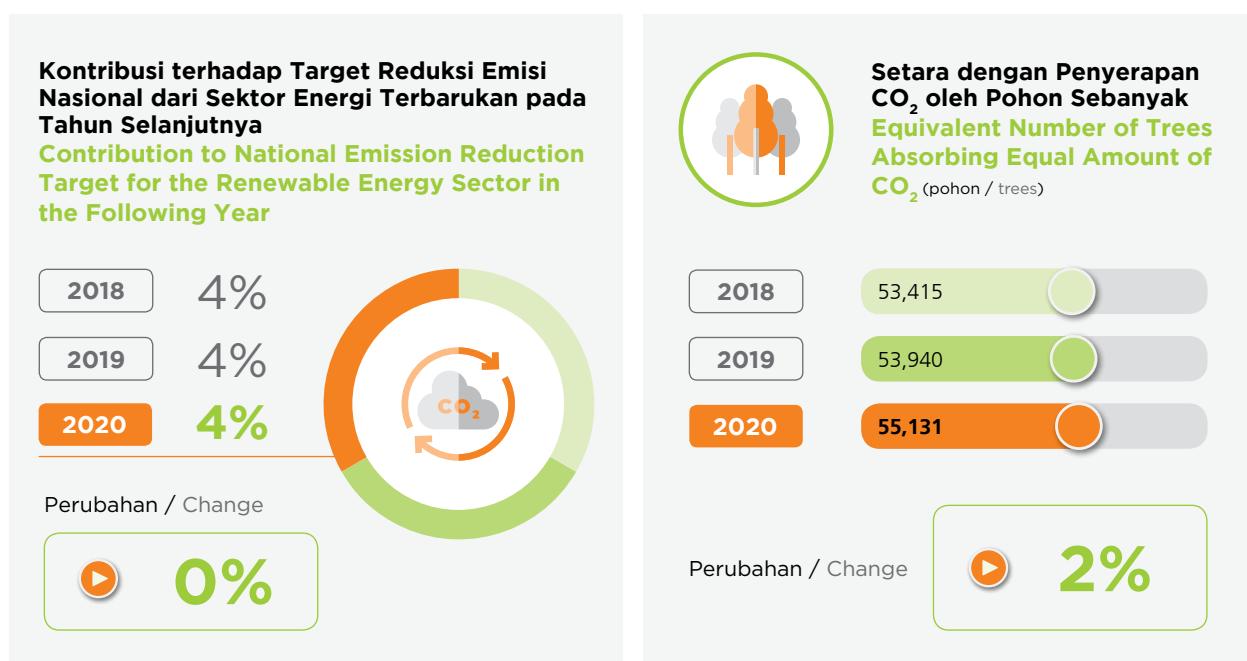
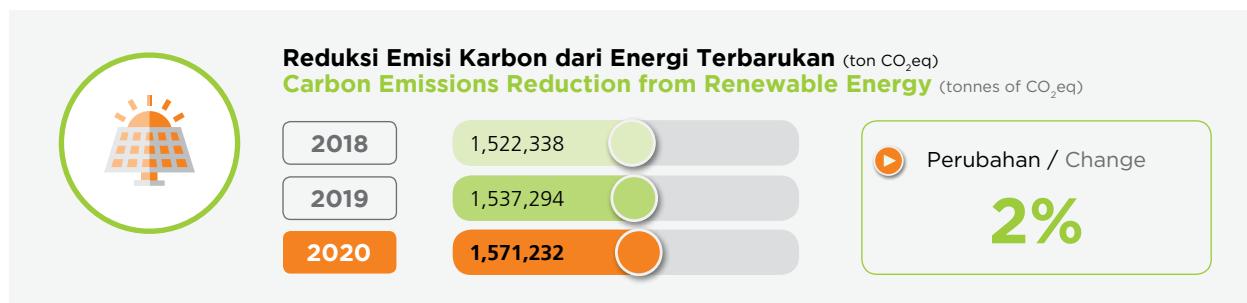
Ikhtisar Penggunaan Sumber Daya dan Upaya Lingkungan Lainnya Summary of Resources Usage and Other Environmental Endeavours

301-1, 305-1



Untuk penjelasan mengenai penurunan sumber daya yang dikonsumsi di tahun 2020, silakan lihat halaman 63.
For an explanation on the decline in resource use in 2020, please refer to page 63.

Reduksi Emisi Karbon dari Energi Terbarukan Carbon Emissions Reduction from Renewable Energy 305-5



Konversi Limbah 306-2

Proyek pembangkit listrik tenaga biomassa pertama di Indonesia, yang menggunakan tandan buah kosong kelapa sawit di Aceh, dibiayai oleh IIF. Proyek ini akan mengonversi 270.000 ton/tahun atau 900 ton/hari limbah minyak kelapa sawit menjadi energi listrik sebesar 9,8 MW, dan berpotensi mengurangi emisi sebesar 31.322 ton CO₂eq per tahun.

Memajukan Masyarakat Indonesia

Di tahun 2020, proyek-proyek infrastruktur yang IIF biayai telah:*

- Memasok air bersih ke lebih dari 9.275.000 penduduk Indonesia.
- Berkontribusi 7,6% terhadap total energi terbarukan yang dihasilkan di Indonesia.

* Seluruh hasil perhitungan ini dilakukan menggunakan asumsi bahwa proyek-proyek yang menjadi klien IIF telah beroperasi komersial pada kapasitas penuh.
* All the figures below have been calculated based on the assumption that the projects that have become IIF's clients have been commercially operating at full capacity.

Waste Conversion 306-2

IIF-financed Indonesia's first biomass power generation project that uses palm fruit husk, is being built in Aceh. This project is estimated to convert 270,000 tonnes/year or 900 tonnes/day of palm oil waste into electrical energy of 9.8 MW. This signifies a potential reduction of emissions of 31,322 tonnes of CO₂eq per year.

Propelling the Progress of Indonesia

In 2020, IIF-financed infrastructure projects have resulted in:*

- Clean water supplied to more than 9,275,000 Indonesians.
- 7.6% contribution to total renewable energy produced in Indonesia.

- Berkontribusi 19,4% terhadap total energi yang dihasilkan dari sel surya dan 53,4% dari total energi yang dihasilkan dari turbin angin di Indonesia.
- Mereduksi sekitar 1.571.232 ton CO₂eq per tahun dari energi terbarukan yang dihasilkan (4% dari target reduksi emisi nasional untuk tahun 2020, setara dengan penyerapan CO₂ oleh 55.131 pohon).
- 19.4% contribution to total energy produced from solar photovoltaics and 53.4% of total energy from wind farms in Indonesia.
- Reduction of approx. 1,571,232 tonnes of CO₂eq per year from renewable energy production (4% of the national emission reduction target for 2020, equivalent to 55,131 CO₂-absorbing trees).

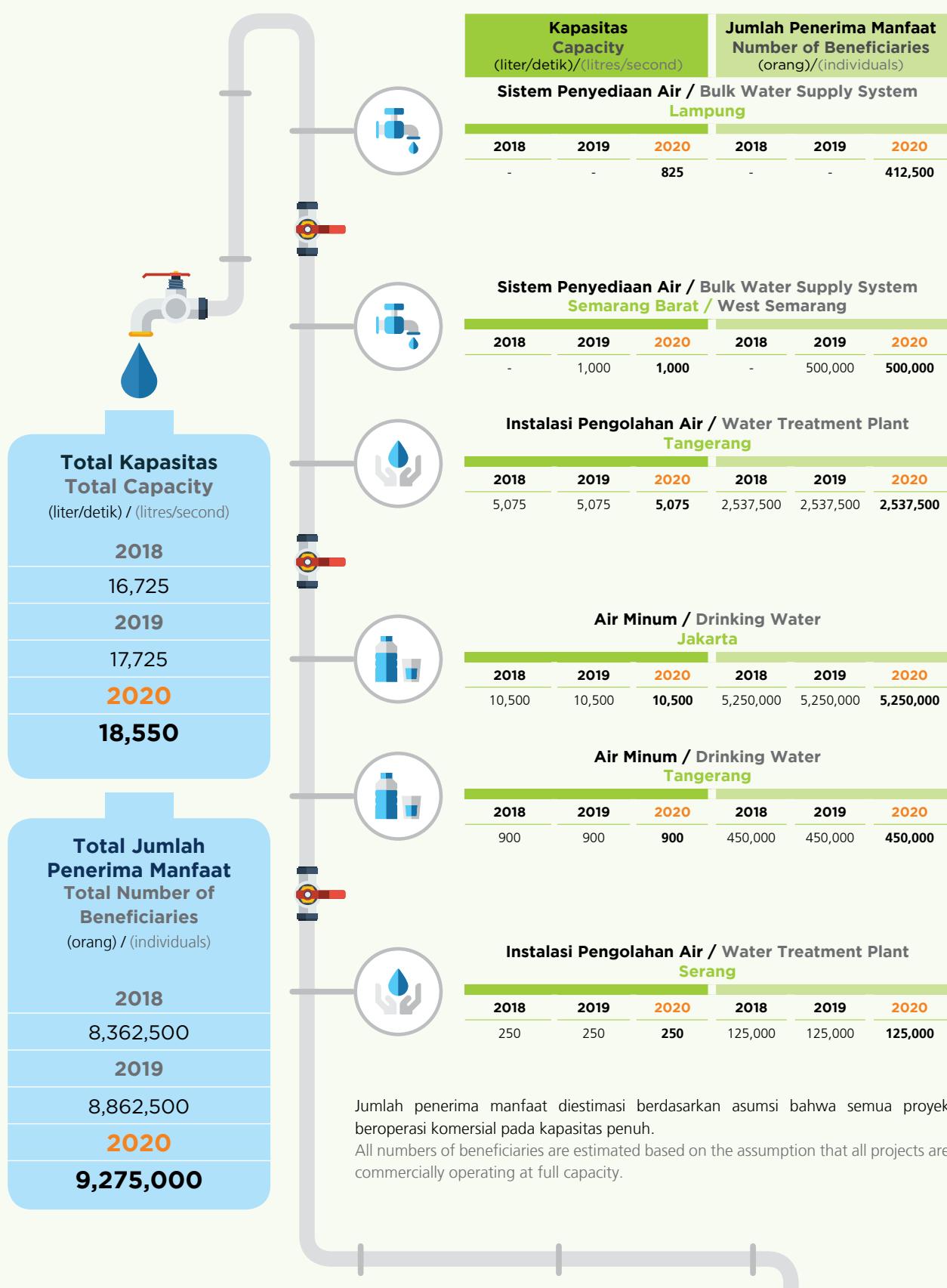
Dampak Sosial dari Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di 2020 Social Impacts of Corporate Responsibility Initiatives in 2020

Program Programme	Penerima Manfaat Beneficiaries	Lokasi Location	Dana yang Disalurkan (Rp) Funding Disbursed (Rp)
Donasi bagi korban banjir Donation for flood alleviation	Karyawan IIF yang terdampak banjir di Jakarta di awal 2020, dalam bentuk sembako IIF employees affected by the Jakarta floods in early 2020, in the form of basic staples	Jakarta	1,404,700
	Masyarakat terdampak banjir, dengan donasi disalurkan melalui Palang Merah Indonesia Communities affected by floods with donation disbursed via Indonesian Red Cross	Masam, Luwu Utara, Sulawesi Selatan	50,000,000
Donasi untuk penanganan Covid-19 Donation for combating Covid-19	Human Initiative, dalam bentuk alat kesehatan Human Initiative, in the form of healthcare equipment	Jakarta	50,000,000
<i>IIF Cares and Shares 2020</i>	Yayasan Sayap Ibu Bintaro, panti asuhan untuk anak-anak kurang mampu, yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan Yayasan Sayap Ibu Bintaro, an orphanage for underprivileged children focused on health and education	Tangerang Selatan	30,000,000
	Yayasan Menemani, organisasi yang berfokus pada pemberdayaan kaum muda dari kalangan kurang mampu Yayasan Menemani, organisation focused on youth empowerment of children in needs	Jakarta	20,000,000
SMV Peduli	Yayasan Kita Bisa, organisasi penggalangan dana masyarakat Yayasan Kita Bisa, crowdfunding organisation	Jakarta	25,000,000
Idul Qurban bersama SMV Idul Qurban with SMV	Masyarakat luas, yang menerima kurban yang disalurkan dalam kolaborasi bersama SMV lainnya di bawah Kementerian Keuangan Communities at large, with sacrificial meat distributed in collaboration with other SMVs under the Ministry of Finance	Jakarta	37,000,000
Turnamen Golf UMKM Naik Kelas 2020 UMKM Naik Kelas Golf Tournament 2020	Acara pemberdayaan UMKM di Indonesia Gathering event for MSMEs empowerment in Indonesia	Jakarta	25,000,000
Konsert Virtual "Optimis Lewat Nada" <i>Virtual Concert "Optimis Lewat Nada"</i>	Acara penggalangan dana menampilkan musisi kenamaan Tompi Fundraising event featuring prominent musician Tompi	Jakarta	17,714,000

Rincian lebih lanjut terkait program-program sosial IIF dibahas pada bagian berjudul Inisiatif Pemberdayaan Masyarakat IIF Tahun 2020 dalam Laporan Keberlanjutan ini.

Further details on IIF's social programs are provided in the discussion titled IIF's Community Empowerment Initiatives in 2020 in this Sustainability Report.

Pasokan Air ke Masyarakat Water Supplied to Communities



Pengurangan Karbon dari Energi Terbarukan
Carbon Reduction from Renewable Energy
305-5

Wilayah Region	Sumber Source	Kapasitas Capacity (MW)			Penerima Manfaat Beneficiaries (rumah tangga / households)			Pengurangan Karbon Tahunan* Annual Carbon Reduction* (ton / tonnes CO ₂ eq)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jawa Barat West Java	PLTMH Mini Hydro	-	7.4	7.4	-	3,895	3,895	-	14,956	14,956
Sumatera Barat West Sumatra	PLTMH Mini Hydro	10	10	10	3,333	3,333	3,333	12,798	12,798	12,798
Sumatera Utara North Sumatra	PLTA Hydro	180	180	180	160,551	160,551	160,551	574,660	574,660	574,660
Sumatera Utara North Sumatra	PLTMH Mini Hydro	-	-	10	-	-	7,555	-	-	10,094
Sulawesi Tengah Central Sulawesi	PLTMH Mini Hydro	-	-	10	-	-	7,941	-	-	23,844
Sulawesi Selatan South Sulawesi	PLTB Wind Turbine	70	70	70	29,217	29,217	29,217	172,554	172,544	172,544
Gorontalo	PLTS Solar PV	2	2	2	388	388	388	2,248	2,248	2,248
Jawa Barat West Java	PLTP Geothermal	227	227	227	151,099	151,099	151,099	760,088	760,088	760,088

* Referensi / References:

1. Hydropower's Biogenic Carbon Footprint - Institute of Environmental Engineering, ETH Zurich, Zurich, Switzerland.
2. Björnsson, O. B., Geothermal Energy as Replacement for Oil and Gas - A Proven Option among the Renewables, ESMAP Technical Report 2016, World Bank.
3. 2018 UK Government Conversion Factors for Greenhouse Gas (GHG).
4. Schipani, V. (2018), Wind Energy's Carbon Footprint.
5. Burkart, K. (2010), How much CO₂ does one solar panel create?



Semua angka terkait reduksi karbon diestimasi berdasarkan asumsi bahwa semua proyek beroperasi komersial pada kapasitas penuh.
All figures of carbon reduction are estimated based on the assumption that all the projects are commercially operating at full capacity.



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Informasi Perseroan

Company Information

102-1, 102-3, 102-5



Nama Perusahaan Company Profile

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)



Bidang Usaha Line of Business

Pembiayaan Infrastruktur
Infrastructure Financing



Produk Products

Produk Investasi (*fund-based* dan *non fund-based*) dan *Advisory*

Investment Products (fund-based and non-fund-based) and Advisory



Tanggal Berdiri Date of Establishment

15 Januari 2010
15 January 2010



Alamat Kantor Pusat Head Office Address

Prosperity Tower 53rd-55th Floor

District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
T. +62 21 5082 6600
F. +62 21 5082 6601
E. info@iif.co.id
www.iif.co.id



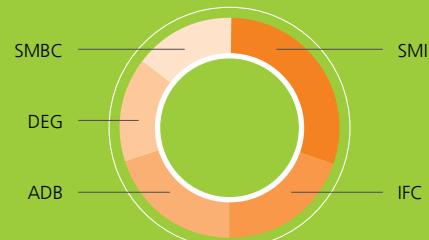
Status Perusahaan Company Status

Perusahaan Swasta
Private Company



Komposisi Kepemilikan Saham Share Ownership Composition

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) : 30.00%
- International Finance Corporation (IFC) : 19.99%
- Asian Development Bank (ADB) : 19.99%
- Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) : 15.12%
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) : 14.90%



Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No.100/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123.
- Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009 on Infrastructure Financing Companies.
- Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated 6 August 2010 on the Granting of Infrastructure Financing Company Business Permit to PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Deed of Establishment No. 34 dated 15 January 2010, made before Aulia Taufani, S.H., substituting for Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU21503. AH.01.01.Tahun 2010 dated 28 April 2010, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123.

Skala Bisnis IIF

IIF's Scale of Business

102-7



Komposisi Pemegang Saham

Shareholding Structure

102-5

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Total Number of Shares (Share)	Nilai Nominal Nominal Amount (Rp)	Percentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	600,000	600,000,000,000	30.00
Asian Development Bank (ADB)	399,800	399,800,000,000	19.99
International Finance Corporation (IFC)	399,800	399,800,000,000	19.99
Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG)	302,400	302,400,000,000	15.12
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298,000	298,000,000,000	14.90
Total	2,000,000	2,000,000,000,000	100.00

Informasi lengkap mengenai pemegang saham IIF disajikan pada Laporan Tahunan 2020 halaman 63–66.

A detailed information on IIF's shareholders is presented in the 2020 Annual Report, pages 63–66.

Wilayah Operasional

Operational Areas

102-4, 102-6



Bandar Udara Airport

Sumatera

- Kepulauan Riau / Riau Islands

Jawa / Java

- Jawa Barat / West Java
- Banten
- Jawa Tengah / Central Java
- Jawa Timur / East Java
- Yogyakarta

Kalimantan

- Kalimantan Selatan / South Kalimantan

Sulawesi

- Sulawesi Selatan / South Sulawesi



Ketenagalistrikan Electricity

Sumatera

- Aceh
- Riau
- Sumatera Utara / North Sumatera
- Sumatera Barat / West Sumatera

Jawa & Bali / Java & Bali

- Jakarta
- Jawa Barat / West Java
- Jawa Timur / East Java
- Bali

Sulawesi

- Gorontalo
- Sulawesi Utara / North Sulawesi
- Sulawesi Tengah / Central Sulawesi
- Sulawesi Selatan / South Sulawesi



Kawasan Industri Industrial Estate

- Jawa Timur / East Java



Minyak dan Gas Oil and Gas

- Jawa Timur / East Java
- Jawa Tengah / Central Java
- Papua Barat / West Papua
- Kalimantan Timur / East Kalimantan



Jalan Road

- Bengkulu
- Jakarta

- Jawa Barat / West Java
- Jawa Timur / East Java



Air Minum Drinking Water

- Jawa Timur / East Java
- Lampung
- Banten
- Jakarta



Telekomunikasi dan Informatika Telecommunications and Informatics

- Jakarta
- Jawa Barat / West Java
- Bali
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku



Pelabuhan Port

- Jakarta
- Sumatera Utara / North Sumatera



Lainnya Others

- Sumatera Utara / North Sumatera
- Sumatera Selatan / South Sumatera
- Kalimantan Timur / East Kalimantan

Kegiatan Usaha

Business Activities

102-2, 102-9

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

IIF menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yang terakhir kali diperbarui melalui Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan di 2020

Pada tahun 2020, sesuai dengan Anggaran Dasar, IIF menyediakan produk pembiayaan berupa:

Produk Investasi

Fund-based

- Bentuk pinjaman antara lain: pinjaman senior, pinjaman subordinasi/mezzanine finance, convertible dan hybrid securities dan/atau pembiayaan ulang;
- Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan; dan
- Investasi ekuitas.

Non-fund-based

Jaminan dalam bentuk antara lain: pemenuhan kewajiban keuangan, peningkatan kualitas kredit, dan/atau *take-out financing*.

Advisory

A. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR PUBLIK

1. Layanan Konsultasi Transaksi

Layanan konsultasi transaksi untuk klien sektor publik, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, di mana pihak swasta menyediakan layanan publik dengan menanggung risiko finansial, operasional, dan teknis dalam proyek tersebut.

Jenis proyek infrastruktur yang dapat diberikan layanan konsultan transaksi mencakup:

- a. Proyek-proyek KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015; dan
- b. Proyek-proyek non-KPBU, antara lain proyek IPP di sektor pembangkit listrik atau proyek B2B PDAM di sektor air minum.

Business Activities Based on Articles of Association

IIF engages in financing infrastructure projects in Indonesia as stipulated in Article 3 of the Company's Articles of Association, which was last amended through Deed No. 43 dated 24 July 2018.

Business Activities Conducted in 2020

In 2020, in line with its Articles of Association, IIF provided the following financing products:

Investment Products

Fund-based

- Loans in the form of, among others, senior loans, subordinated loans/mezzanine financing, convertible and hybrid securities, and/or refinancing;
- Financing of other activities related to infrastructure projects under the prevailing laws and regulations; and
- Equity investment.

Non-fund-based

Guarantees in the form of stand-by financing guarantee, credit enhancement, and/or take-out financing.

Advisory

A. SERVICES FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS

1. Transaction Advisory Services

Specialised transaction advisory services for public sector clients, such as ministries, regional governments, and state-owned/regional-owned enterprises, with regard to infrastructure projects involving contracts between government institutions and private parties, in which the private party provides a public service and assumes the financial, technical, and operational risks of the project.

The types of infrastructure project eligible to receive transaction advisory services include:

- a. Public Private Partnership (PPP) projects as regulated under Presidential Regulation No. 38/2015; and
- b. Non-PPP projects, such as IPP projects in the power sector or PDAM B2B projects in the drinking water sector.

Lingkup dari layanan konsultan transaksi antara lain pelaksanaan uji tuntas dan perencanaan proyek, pelaksanaan konsultasi pasar, studi kelayakan, analisis dukungan pemerintah, penyiapan struktur komersial, negosiasi, pelaksanaan proses tender/ pengadaan, dan proses institusionalisasi dengan tujuan alokasi risiko yang optimal dan proyek yang bankable, di samping meningkatkan kualitas layanan yang dihasilkan proyek tersebut.

2. Layanan Konsultasi Kebijakan

Menyediakan layanan konsultasi kepada klien di sektor publik, seperti kementerian dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur.

B. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR SWASTA

1. Kajian Finansial dan Ekonomi

Menyediakan layanan kepada klien untuk mengevaluasi dampak finansial dan ekonomi dari inisiatif pengembangan infrastruktur.

2. Penasihat Keuangan

Menyediakan layanan *project finance* dan *corporate finance* untuk klien di sektor swasta untuk memaksimalkan *value* kepada pemegang saham. Terkait dengan keuangan proyek, IIF menyediakan jasa penasihat dalam proyek KPBU, studi kelayakan, serta penyiapan proyek. Terkait dengan keuangan perusahaan, IIF dapat memberikan jasa penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman, valuasi, transaksi *joint venture*, dan *merger & acquisition*.

Sektor Pembiayaan Infrastruktur

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan infrastruktur, IIF memiliki sektor-sektor prioritas proyek infrastruktur sebagai target pembiayaannya. Sesuai dengan Pasal 5 PMK No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Surat OJK No. S-2/D.05/2018 dan POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, objek pembiayaan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga permasyarakatan, perumahan rakyat, bangunan negara, kawasan industri, distribusi pangan dan infrastruktur lain.

The scope of transaction advisory services may include pre-transaction due diligence and planning, market consultation, feasibility analysis, government support analysis, commercial structuring, negotiation, tender/procurement implementation process, and institutionalisation process aimed to ensure optimal risk allocation and bankability of the project as well as improving the quality of project outcome.

2. Policy Advisory Services

Advisory services to public sector clients, such as ministries and regional governments, in formulating infrastructure-related policies and/or increasing capacities for the purpose of accelerating and improving infrastructure procurement.

B. SERVICES FOR PRIVATE SECTOR CLIENTS

1. Financial and Economic Assessment

IIF provides services to private sector clients in order to evaluate the potential economic and financial impacts of infrastructure initiatives.

2. Financial Advisory

Providing project finance and corporate finance services to private sector clients to maximise shareholder value. With regard to project finance, IIF provides PPP tender support, feasibility studies, project preparation and structuring. With regard to corporate finance, IIF's advisory products are available for debt or equity fund raisings, valuations, joint ventures, as well as mergers and acquisitions.

Infrastructure Financing Sector

In conducting infrastructure financing activities, IIF has determined the priority sectors of infrastructure project as its financing target. Pursuant to the Article 5 of the Regulation of the Minister of Finance No. 100/PMK.010/2009 regarding Financing Companies OJK Letter No. S-2/D.05/2018 and POJK No. 46/POJK.05/2020 on Infrastructure Financing Companies, objects for infrastructure financing include transportation, roads, water and irrigation, drinking water, centralised wastewater management systems, localised wastewater management systems, waste and toxic waste, telecommunications and informatics, electricity, oil and gas and renewable energy, conservation energy, urban infrastructure facilities, education, research and development infrastructure, sports, arts and cultural infrastructure facility, district, tourism, healthcare, correctional, public housing, state owned building, industrial estate, food distribution and other infrastructure.

Perubahan Signifikan

Significant Changes

102-10

Di tahun 2020 tidak terdapat perubahan signifikan terhadap struktur usaha, struktur kepemilikan, ataupun rantai pasokan IIF.

In 2020, there was no significant change to IIF's business structure, ownership structure, or its supply chain.

Keanggotaan pada Asosiasi

Membership in Associations

102-12, 102-13

Hingga akhir tahun 2020, IIF adalah anggota dari Masyarakat Telematika Indonesia.

IIF juga telah mengadopsi prinsip-prinsip *United Nations Framework Convention on Climate Change* dalam menerapkan kriteria pembiayaan proyeknya.

Up to the end of 2020, IIF has been a member of Masyarakat Telematika Indonesia (Indonesian Telematics Society).

IIF also has adopted the principles set in the United Nations Framework Convention on Climate Change in determining its project financing criteria.

LAPORAN DIREKSI

Report of the Board of Directors

Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

Developing a
Sustainable Future

102-14, 102-15

Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO



Pemangku kepentingan yang terhormat,

Pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan komprehensif mengenai kinerja PT Indonesia Infrastructure Finance dalam berbagai aspek keberlanjutan selama tahun 2020 yang begitu menantang.

Seperti yang kita semua ketahui, pada tahun 2020 Covid-19 melanda, menyebabkan terhentinya kehidupan normal serta berbagai bentuk kemajuan yang telah kita bangun, dan sebagian di antaranya mengalami kemunduran. Akibat pandemi telah muncul banyak tantangan baru dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terbayangkan sebelumnya. Berbagai inisiatif, mulai dari kebijakan *lockdown* yang paling ketat hingga paket stimulus ekonomi besar-besaran, belum terbukti efektif dalam menghentikan penyebaran virus dan memulihkan perekonomian.

Distinguished stakeholders,

Allow us to take this opportunity to present to you our comprehensive report of PT Indonesia Infrastructure Finance's performance across various sustainability aspects during this challenging year of 2020.

As we all know, in 2020 Covid-19 struck, upending the normal order of things and grinding our progress to a halt, even to reverse its course. The pandemic has spawned myriad new challenges to our daily lives that few of us could have imagined before. In the past year, numerous initiatives from the most stringent lockdowns to the massive economic stimulus packages seemed to lack potency in thwarting the rampant rise of new infections and in limiting their toll on our economy.

Pertumbuhan Aset Investasi Investment Assets Growth

▲
30%

Rp11.4
triliun/trillion

Namun satu hal yang harus diingat adalah bahwa kehidupan kita semua saling terkait. Tindakan kita memengaruhi lingkungan kita, sama halnya apa yang terjadi di sekitar kita juga memengaruhi hidup kita. Pandemi semakin mengingatkan kita semua akan hal ini. Terlepas dari semua dampak negatifnya, Covid-19 telah memberi kita cukup waktu untuk merenungkan kehidupan kita. Berkurangnya intensitas aktivitas industri, ditambah dengan pembatasan mobilitas yang diberlakukan oleh pemerintah di banyak negara, menyebabkan peningkatan kualitas udara yang luar biasa di seluruh dunia. Akibatnya, konsentrasi polutan utama di atmosfer berkurang drastis. Dan terlepas dari pelemahan ekonomi dan krisis kesehatan pada skala yang belum pernah kita saksikan sebelumnya, alam mulai pulih. Selama beberapa bulan pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia, kita semua dapat melihat cerahnya langit biru yang biasanya sulit dijumpai di ibu kota. Kita dapat mendengarkan kicau burung dan menghirup udara yang lebih segar. Planet ini juga dapat bernapas dengan lebih baik.

Tentu saja pandemi ini adalah suatu bencana besar. Tapi ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk meninjau kembali hubungan kita dengan planet bumi, dan untuk mulai memfokuskan kembali tindakan kita di masa depan. Masyarakat global tak dapat mencapai kemakmuran dengan mengeksplorasi alam tanpa pikir panjang. Untuk dapat berkembang di masa depan, kita harus menjaga alam—sumber kehidupan bagi kita semua. Bagi kami di IIF, pandemi telah memperkuat keyakinan kami bahwa pembangunan haruslah holistik dan berkelanjutan. Pandemi ini telah memberikan pijakan yang lebih kuat bagi kami untuk memperjuangkan keberlanjutan dalam strategi kami.

Sejak awal pendiriannya, IIF mengedepankan keberlanjutan melalui semua produk dan layanannya. Dalam mandat bisnis kami—yakni menjadi katalis untuk pembangunan infrastruktur negara ini—Prinsip Sosial & Lingkungan (S&E) kami telah tertanam. Prinsip-prinsip ini telah dirumuskan untuk menjawab permasalahan keberlanjutan yang paling mendesak yang dihadapi saat ini, sekaligus mencerminkan kriteria keuangan berkelanjutan yang ditetapkan oleh OJK sebagai otoritas keuangan di Indonesia.

Setiap proyek yang IIF biayai mematuhi prinsip-prinsip ini. Aspek dan potensi keberlanjutannya telah kami evaluasi sebelum kami memberikan keputusan pendanaannya. Setelah itu, kinerja keberlanjutan mereka pun kami pantau secara berkala. Dengan mendanai proyek-proyek berkelanjutan ini, IIF percaya bahwa mereka akan memperhatikan kualitas lingkungan sekaligus menghadirkan manfaat baik bagi masyarakat. Melalui mekanisme pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan, kami berkomitmen untuk menumbuhkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi masa depan.

But what truly matters is that all our lives intertwine. Our actions affect our surroundings, just as much as what happens around us affect our lives. The pandemic has underscored this. Setting aside all its destructive aspects, Covid-19 has given many of us ample time to ponder deeply into our well-being. A diminished intensity of industrial activities, coupled with mobility restrictions imposed by governments in many countries, led to a remarkable improvement in global air quality. As a result, atmospheric concentrations of key pollutants plummeted, and despite the unprecedented effects in terms of economic downturn and health issues, nature was starting to heal. During the first few months of the large-scale social restrictions (PSBB) in Indonesia, we were graced with a clear blue sky that was normally hard to come by in our capital. We were able to listen to birds chirping, and breathe much fresher air. The planet, too, could breathe better.

The pandemic, without a doubt, has been catastrophic. But it is also a wakeup call for all of us to rethink about our relationship with the planet, and to start refocusing our future actions. Our prosperity as a global society can no longer be built upon a mindless exploitation of nature. To thrive in the future, we must take care of nature, our very provider of life. To us at IIF, the pandemic has redoubled our conviction that any meaningful development must be holistic and sustainable. The pandemic has afforded us a stronger foothold to advocate for our strategy for sustainability.

Since its establishment, IIF has been championing sustainability through all its products and services. Embedded in our business mandate—a catalyst for this country's infrastructure development—are our Social & Environmental (S&E) Principles. These principles have been formulated to represent the most pressing sustainability issues we face today, and have come to reflect the criteria for sustainable finance promulgated by Indonesia's financial regulatory body, the OJK.

Every project that IIF finances abides by these principles. Its sustainability aspects and potentials are pre-evaluated for our financing decision, and afterwards, their sustainability performance is regularly monitored. By financing these sustainable projects, IIF is placing its trust that the presence for these projects will bring substantial attention to the environment and a greater good to the society. Through our sustainability-oriented financing mechanism, we are committed to fostering and accelerating infrastructure development in Indonesia, and ensuring that its benefits are felt by the next generations far into the future.

Keberlanjutan telah tertanam dalam DNA IIF karena para pemegang saham IIF merupakan lembaga keuangan terkemuka di bidangnya masing-masing, dengan reputasi internasional dalam mendukung ekonomi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pemegang saham memandatkan manajemen dan seluruh karyawan IIF untuk memperjuangkan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia, dan untuk mengembangkan ekonomi masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Melalui Dewan Komisaris sebagai perwakilan pemegang saham, kami memperoleh arahan dan dukungan dalam setiap perumusan strategi dan pengambilan keputusan.

Namun demikian, sebagaimana pelaku pasar lainnya, di tahun 2020 IIF menghadapi situasi yang sangat menantang karena melambatnya ekonomi global dan nasional. Banyak sektor ekonomi yang sangat terpukul oleh pandemi tersebut, dan akibatnya banyak proyek potensial yang ditunda atau ditangguhkan sementara, seiring pemrakarsa proyek dan klien kami mempertimbangkan kembali prioritas ekonomi mereka. Pendapatan beberapa proyek infrastruktur lain yang telah beroperasi juga menurun akibat terbatasnya aktivitas masyarakat di era pandemi. Menanggapi situasi ini, IIF tetap berkomitmen kuat untuk membiayai proyek infrastruktur sesuai dengan Prinsip S&E, dan terus merumuskan skema pembiayaan baru untuk mengatasi masalah-masalah yang umum dijumpai selama pandemi, seperti krisis likuiditas dan penurunan kualitas utang. Pada tahun 2020, IIF juga mengikuti kebijakan restrukturisasi utang Covid-19 OJK yang dirancang untuk memberikan keringanan bagi sejumlah penerima fasilitas utang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Semua ini menunjukkan dukungan kami untuk mempertahankan hubungan yang seimbang antara memaksimalkan nilai sosial dan ekonomi dan meminimalkan dampak lingkungan dari proyek-proyek dalam portofolio kami.

Karena semua proyek yang dibiayai oleh IIF termasuk di dalam sektor infrastruktur yang berkelanjutan, dampak negatifnya terhadap lingkungan telah diidentifikasi sebelumnya dan akan terus dipantau dan dimitigasi oleh masing-masing proyek, di bawah pengawasan dan bimbingan IIF melalui produk dan layanan kami. Pada tahun 2020, terlepas dari situasi ekonomi yang sulit, kami mencatat beberapa pencapaian penting. Kami mendapatkan tujuh komitmen pembiayaan proyek baru, dengan nilai komitmen sejumlah Rp2,88 triliun. Hampir seperempat total komitmen kami disalurkan ke sektor pembangkit listrik terbarukan, sehingga kami telah berkontribusi mengurangi emisi CO₂ sebanyak 1,6 juta ton CO₂eq per tahun melalui pembangkit energi terbarukan yang kapasitasnya lebih dari 516 MW. Proyek yang IIF biayai telah menyediakan air bersih untuk lebih dari 11 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, dari bisnis *advisory*, kami menyediakan layanan ahli kami kepada tujuh klien dari berbagai sektor, seperti air bersih dan transportasi.

We owe our sustainability DNA to our shareholders. Each one of them is a leading financial institution in their respective areas, with international reputation for promoting green economy and sustainable development. Our shareholders have given us, the management and the entire workforce of IIF, a mandate to champion environmental, social, and governance (ESG) values in infrastructure financing in Indonesia, and build the economy for a more resilient and sustainable future. And through the Board of Commissioners as our shareholders' representatives, we continue to receive guidance and support in our strategy formulation and decision-making.

Nevertheless, as do other market participants, in 2020 IIF encountered a notably challenging situation following the global and national economic slowdown. Many economic sectors were severely affected by the pandemic, and consequently many projects in the pipeline became delayed or suspended temporarily, as both the project proponents and the end consumers are re-examining their economic priorities. Some other infrastructure projects that had been operating saw dwindling revenues due to limited public activities in the pandemic era. In response to this situation, IIF has remained steadfastly committed to financing infrastructure projects according to the S&E Principles, but also came up with new formulations for financing scheme, directed to tackle the most commonly-encountered issues during the pandemic, such as liquidity crunch and debt quality deterioration. In 2020, IIF also participated in OJK's Covid-19 debt restructuring policy which was designed to provide relief to some debt facilities that were experiencing difficulties in serving their financial obligations. All this demonstrated our support towards fostering a balanced relationship between maximising social and economic value while at the same time minimising the environmental impacts of the projects in our portfolio.

As all of the projects financed by IIF are in sustainable infrastructure sectors, their negative impacts of the environment have been pre-identified and will continue to be monitored and adequately mitigated by those projects themselves through IIF's supervision and guidance that come through our products and services. In 2020, notwithstanding the tough economic climate, we notched up some notable achievements. We secured new financing commitments for a total of seven projects, with total commitment amounting to Rp2.88 trillion. With almost a quarter of our commitments in the renewable power generation sector, our projects have contributed to a reduction of approximately 1.6 million tonnes of CO₂eq per year through renewable energy generation with a capacity of more than 516 MW. Our financed projects are providing clean water to more than 11 million Indonesians. From our advisory arm, we provided our expert services to seven clients encompassing sectors such as clean water and transportation.

Kami juga merambah pasar obligasi internasional untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk usaha kami di masa depan. Pada awal tahun 2021, kami berhasil menerbitkan *USD Senior Notes* berperingkat BBB (*stable*) (Fitch) senilai USD 150 juta yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dengan tingkat kupon terendah untuk perusahaan Indonesia dengan suku bunga tetap selama lima tahun. Kami akan menerbitkan obligasi berkelanjutan/hijau lainnya di masa mendatang, dan menjadi lembaga keuangan non-bank pertama di Indonesia yang melakukannya, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang menjadi inti bisnis IIF.

Ke depan, IIF telah menerima mandat yang diperluas dari Kementerian Keuangan untuk masuk ke sektor infrastruktur baru: distribusi pangan dan infrastruktur sosial. Keterlibatan kami di sektor-sektor baru ini akan menghadirkan peluang unik untuk mewujudkan Prinsip S&E IIF dengan peranan yang jauh lebih besar. Di tengah pemulihan iklim investasi Indonesia, terutama di sektor infrastruktur, kami memikul tugas ini dengan sekutu tenaga dan melangkah maju dengan kehati-hatian, kepercayaan diri, dan optimisme bahwa bersama semua pemangku kepentingan, kami akan dapat mewujudkan masa depan yang lebih ramah lingkungan di dunia yang lebih layak huni bagi semua.

Meanwhile, we are also tapping into the international bond markets to obtain more funding for our future endeavours. In early 2021, we have successfully issued BBB (*stable*)-rated (Fitch) USD Senior Notes worth USD 150 million listed on the Singapore Stock Exchange, with the lowest coupon structure for an Indonesian corporation for a fixed rate five-year offering. We are seeking to issue more sustainability/green bonds in the foreseeable future, as the first Indonesian non-banking financial institution to do so, by leveraging the sustainability principles embedded in the crux of our business.

Moving forward, IIF has received an expanded mandate from Ministry of Finance to engage in new infrastructure sectors: food distribution and social infrastructure. Our engagement in these new sectors will present a unique opportunity to deliver our S&E Principles in a much bigger role. Amidst Indonesia's recovering investment climate, especially in the infrastructure sector, we are shouldering this task with utmost effort and stepping ahead with prudence and confidence, brimming with optimism that with all of our stakeholders, we will be able to make genuine progress in developing a greener future in a more livable world.



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainability Governance

Tugas dan Tanggung Jawab Organ Tata Kelola Keberlanjutan

Duties and Responsibilities of Sustainability Governance Bodies

102-18, 102-20, 102-32

Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) beserta seluruh karyawan Perseroan mendukung keberhasilan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Per akhir 2020, Sustainable Finance Working Group (SFWG) dan Social and Environmental Division (SED) berwewenang untuk melaporkan segala pelaksanaan aktivitas Keuangan Berkelanjutan dengan didukung oleh Divisi Finance Control, Divisi Manajemen Risiko, Divisi SDM dan Umum, Divisi Investasi, dan Divisi Legal & Corporate Secretary.

Setiap divisi tersebut memiliki tugas dan peran tersendiri dalam hal penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

The success of the implementation of Sustainable Finance are supported by the Management (the BoC and BoD) and the Company's employees.

As at end of 2020, the Sustainable Finance Working Group (SFWG) and the Social and Environmental Division (SED) managed the reporting of such implementation with the support from the Finance Control Division, Risk Management Division, Human Resources and General Affairs Division, Investment Division, and Legal & Corporate Secretary Division.

Each of the stated divisions carries duties and roles for the implementing sustainable finance with the following details:

Pihak Terkait Related Parties	Tugas dan Peran Duties and Roles	
Dewan Komisaris BoC	Mengawasi dan memberikan nasihat mengenai manajemen Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Direksi IIF.	Supervising and providing advice on Sustainable Finance management conducted by the BoD of IIF
Direksi BoD	Mengelola aktivitas Keuangan Berkelanjutan, disesuaikan dengan Visi dan Misi IIF.	Managing the Sustainable Finance of IIF, aligned with its Vision and Mission.
Sustainable Finance Working Group (SFWG)	Memastikan evaluasi, pemantauan, dan pelaporan kegiatan Keuangan Berkelanjutan kepada pihak otoritas, investor publik, dan investor keberlanjutan, dengan mengacu pada Kerangka Kerja Keberlanjutan IIF dan standar keberlanjutan lainnya yang relevan.	Ensuring evaluation, monitoring, and reporting of Sustainable Finance to related financial authorities as well as public or sustainability investors according to IIF's Sustainability Framework and relevant sustainability standards.
Social and Environmental Division (SED)	Memastikan bahwa semua proyek ditinjau dan dievaluasi berdasarkan persyaratan S&E berikut: Daftar Pengecualian; undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang masalah lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan sosial; dan SEP IIF yang diadopsi dari IFC PS 2012.	Ensuring that projects are reviewed and evaluated against S&E requirements as follows: Exclusion List; applicable laws and regulations in Indonesia on the environment, health, safety, and social issues; and IIF's SEP adopted from IFC PS 2012.
Finance Control and Corporate Planning Division	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung persiapan aktivitas Keuangan Berkelanjutan Perseroan; dan - Melaporkan realisasi budget untuk penerapan Keuangan Berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Supporting the preparation of the Company's Sustainable Finance; and - Reporting the actual use of the Sustainable Finance budget.
Risk Management Division	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan rutin terkait anti-korupsi. - Mengadakan pelatihan gabungan dengan S&E terkait Keselamatan & Kesehatan, termasuk penunjukan <i>floor warden</i> untuk menangani kejadian gawat darurat yang membutuhkan evakuasi, dll. - Meninjau dokumentasi proyek dan menilai risiko potensial dan potensi pemburukan peringkat/rating proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducting regular training on Anti-Corruption. - Conducting joint training with S&E in conducting Safety & Health awareness sessions, including appointment of floor warden in case of emergency evacuation, etc. - Reviewing projects documentation and assess the potential risks of projects and their potential rating downgrading.
Human Resources & General Affairs Division	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pelatihan pengembangan kompetensi terkait dengan Keuangan Berkelanjutan. - Mendorong upaya efisiensi energi, seperti mematikan penyejuk udara pada jam 6 sore dan mengurangi penggunaan toner printer. - Mengurangi penggunaan air dengan membatasi jam operasi toilet hanya sepanjang jam kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducting competence improvement training related to Sustainable Finance. - Promoting energy efficiency, such as turning off air conditioners at 6 pm and reducing use of printer toner. - Reducing water use by limiting the use of restrooms only for office hours.

Pihak Terkait Related Parties	Tugas dan Peran Duties and Roles
Investment Division	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelaraskan dengan inisiatif strategis Pemerintah, menyediakan proyeksi tentang sektor-sektor infrastruktur yang sedang berkembang untuk diikutsertakan dalam strategi pertumbuhan IIF. - Menginisiasi ekspansi ke sektor-sektor yang dapat memperluas pangsa pasar produk keuangan IIF. - Melakukan uji tuntas dan penilaian atas proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan. - Memanfaatkan pengetahuan IIF dalam bisnis infrastruktur melalui sindikasi dengan institusi perbankan atau institusi keuangan lainnya. - Menginisiasi dan membentuk produk-produk <i>funded</i> dan <i>non-funded</i>, misalnya CDS dan <i>guarantee</i> yang membantu meningkatkan kelayakan finansial proyek-proyek yang berkelanjutan. - Memantau proyek-proyek yang ada di masa pinjaman agar selaras dengan persyaratan perjanjian dan prinsip-prinsip S&E.
Legal & Corporate Secretary Division	<p>Mendukung aksi korporasi, komunikasi, publikasi, sekaligus acara internal dan eksternal IIF yang terkait dengan aspek keberlanjutan, di dalam fungsi <i>corporate secretary</i>, <i>corporate legal</i>, <i>corporate communication</i>, dan hubungan investor.</p>

SED dan Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan IIF

Untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab pengelolaan tata kelola keberlanjutan, IIF memiliki Sistem Pengelolaan dan Penilaian Sosial dan Lingkungan (SEMS), yang tugas utamanya adalah mengelola dua bidang utama paparan risiko yang berasal dari transaksi dan pembangunan proyek, yakni risiko sosial & lingkungan (*social & environmental* - S&E) dan risiko reputasi.

Risiko S&E didefinisikan sebagai risiko terhadap keberlanjutan keuangan IIF akibat penurunan nilai aset sebagai dampak dari kewajiban S&E, atau peningkatan kemungkinan tidak dilunasinya pinjaman akibat permasalahan S&E, sementara risiko reputasi mencakup potensi kerusakan reputasi IIF akibat terkait dengan proyek-proyek yang mengalami konflik atau masalah publik yang signifikan, atau proyek-proyek dengan ketidakpatuhan S&E yang tidak terselesaikan dengan baik.

SEMS dikelola dan dikordinasikan oleh Social & Environmental Division (SED) di bawah Direktorat Manajemen Risiko. SED berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak klien atau proyek dengan memberikan bantuan terkait dengan penerapan Prinsip-prinsip S&E (*S&E Principles*—SEP). Hal ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola risiko S&E secara efektif dan mematuhi persyaratan terkait S&E melalui pemantauan *Corrective Action Plans* (CAPs). SED juga terus mendorong dampak positif dan peran SEP melalui berbagi pengetahuan dan sosialisasi yang bermanfaat bagi IIF dan klien.

Per 31 Desember 2020, SED beranggotakan 9 orang staf, meningkat 13% dari jumlahnya di tahun 2019.

SED and IIF's Social and Environmental Management System

To underpin the implementation of duties and responsibilities related to sustainability governance, IIF operates the Social and Environmental Management System (SEMS), whose main task is to manage two main areas of risk exposure from transactions and its related projects: social & environmental (S&E) risk and reputation risk.

S&E risk is defined as the risk to IIF financial sustainability as a result of decrease in assets value due to S&E obligations or the increase in probability of default due to S&E issues, whereas reputation risk covers potential damage to IIF reputation due to association with projects which involve significant conflicts or public issues or material S&E non-compliance that is not resolved properly.

The SEMS is administered and coordinated by the Social and Environmental Division (SED), under the Directorate of Risk Management. SED is committed to embracing more project borrowers by providing assistance related to S&E Principles (SEP) implementation. This is carried out to support their ability in managing S&E risk effectively and compliance with S&E requirements through Correction Action Plans (CAPs) monitoring. SED also supports positive impacts and SEP role through knowledge sharing and disseminations that benefit IIF and its clients.

As of 31 December 2020, SED was manned by 9 personnel, up 13% from 2019's headcount.

Staf SED memiliki keahlian beragam dari berbagai latar belakang dan pengalaman, dengan rata-rata pengalaman bekerja 13 tahun. Masing-masing staf memiliki spesialisasi dalam aspek sosial dan lingkungan, seperti Pembebasan Lahan, Masyarakat Adat, Antropologi, Biologi, Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Lingkungan, Rekayasa Lingkungan, serta Kesehatan dan Keselamatan.

Struktur SED SED Structure



Konsultan S&E independen membantu SED dalam memahami dampak S&E, risiko dan peluang yang dihadapi oleh Perseroan. Keahlian mereka diperlukan untuk menangani risiko yang lebih tinggi. Konsultan S&E independen juga mungkin diperlukan untuk melihat peluang khusus yang berkaitan dengan bisnis berisiko tinggi atau aspek tertentu dari bisnis yang menjadi perhatian seperti polusi, keanekaragaman hayati, pembebasan lahan, dan/atau masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Konsultan juga dilibatkan dalam berbagai pekerjaan, seperti Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), penilaian S&E yang lebih terbatas dan terfokus, dan Audit/Pemantauan/Pengawasan S&E atau Uji Kelayakan Sosial dan Lingkungan (SEDD).

SED IIF didukung oleh International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC) yang telah memberikan komentar dan ulasan konstruktif pada kegiatan pemantauan dan pengawasan proyek. IFC dan IBRD bersama-sama mendukung staf SED dalam meninjau SEDD, ESAP, dan

SED staff comprise professionals of diverse backgrounds and experience with an average work experience of 13 years. Each staff has their specialties ranging in the social and environmental aspects such as Land Acquisition, Indigenous People, Anthropology, Biology, Biodiversity, Environmental Management, Environmental Engineering, and Health and Safety.

Independent S&E consultants assist the SED in understanding S&E impacts, risks and opportunities faced by the Company. Their expertise is required to address more significant risks. Independent S&E consultants may also be required to observe specific opportunities related to high-risk businesses or certain aspects of the concerned business, for example, pollution, biodiversity, land acquisition, and/or occupational health and safety issues. The consultant shall also be involved in various works, such as Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), limited and focused S&E assessments, and S&E Audit/Monitoring/Supervision or Social and Environmental Due Diligence (SEDD).

IIF's SED is supported by International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and International Finance Corporation (IFC) which provide constructive feedback and reviews related to monitoring and supervisory activities on projects. IFC and IBRD jointly support the SED staffs in reviewing SEDD, ESAP, and legal

dokumen perlindungan hukum untuk memastikan bahwa hasil SEDD telah mengatasi risiko S&E utama dan bahwa kesenjangan S&E utama dimasukkan ke dalam persyaratan proyek; CAP selaras dengan waktu terjadinya risiko S&E; dan COD untuk pembiayaan proyek atau aset terdefinisi baik. Perseroan telah mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan SEMS dan memastikan kepatuhan dengan SEP IIF, dan juga Standar Kinerja Bank Dunia dan IFC. Perseroan telah menanggapi masukan dari berbagai pihak untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas dan pengetahuan tim SED.

Selama tahun 2020, berdasarkan hal di atas, ulasan tentang kinerja SED dari pemegang saham dan pemberi pinjaman telah dilakukan dan mengakui peningkatan dalam manajemen S&E IIF. SED memiliki tim yang berkualitas. Berdasarkan *aide memoire* Bank Dunia dan Tinjauan Portofolio 2020, SED telah berperan dalam meningkatkan praktik lingkungan dan sosial dari banyak kliennya. Pengungkapan dokumen dan berbagi informasi telah meningkat secara signifikan. IIF juga berupaya untuk melakukan standarisasi elemen-elemen kunci dari SEMS dan SEP dan sedang mempersiapkan alat penilaian S&E pada isu-isu khusus, seperti pembebasan lahan dan masyarakat adat, untuk meningkatkan penerapan SEMS dan SEP. Sebagai tindak lanjut dari tinjauan ini, dokumen SEMS sekarang sedang dalam proses perbaikan dan peningkatan dan revisi ini diharapkan akan siap untuk konsultasi publik pada akhir triwulan pertama 2021.

SFWG

Efektif sejak Desember 2020, Sustainable Finance Working Group (SFWG) diberikan mandat untuk memantau semua pelaporan terkait keberlanjutan, selain juga evaluasi dan pemantauan berkala atas obligasi berkelanjutan.

SFWG beranggotakan karyawan dari berbagai fungsi di IIF, yang bertugas memastikan evaluasi, pemantauan, dan bertanggung jawab untuk memastikan pelaporan semua hal terkait keberlanjutan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai peraturan.

protection documents to ensure that: the SEDD results have mitigated major S&E risks; major S&E gaps are included in project requirements; CAP is in line with the time of S&E risk occurrence; and COD for project or asset financing is well-defined. Challenges in implementing SEMS have been identified, ensuring compliance with IIF SEP and by extension the Performance Standards of the World Bank and IFC. Input from various parties have been comprehensively followed up, to ensure continuous improvement and to build the capacity and knowledge of the SED team.

Based on the above mentioned matters, SED performance in 2020 has been reviewed by the shareholders and lenders, in which they acknowledged improvement in IIF S&E management and the quality of SED team. Based on the aide memoire of the World Bank and 2020 Portfolio Review, the SED had a role in improving environmental and social practices of many of its clients. Document disclosure and information sharing also improved significantly. IIF strived to standardise key elements of the SEMS and the SEP is currently preparing S&E assessment tools for certain issues, such as land acquisition and indigenous people, to enhance SEMS and SEP implementation. As a follow-up to this review, SEMS document is currently being revised and amended and the new revision is expected to be available for public consultation by end of Q1 2021.

SFWG

Effective December 2020, the Sustainable Finance Working Group (SFWG) has been tasked to oversee all reporting related to sustainability as well as evaluation and regular monitoring of sustainability bonds.

SFWG comprises employees from various functions within IIF. It is tasked to ensure evaluation, monitoring, and is responsible for ensuring the reporting of all sustainability-related tasks in an efficient, timely, and compliant manner.

Pengembangan Kompetensi Tata Kelola Berkelanjutan

Competence Development of Sustainability Governance

102-18, 102-20, 102-32

Daftar pelatihan yang diikuti oleh Badan Tata Kelola Berkelanjutan IIF sepanjang tahun 2020 dirinci pada tabel-tabel berikut.

The following tables list the training programmes participated throughout 2020 by the parties responsible for IIF's Sustainability Governance.

Program Pengembangan Kompetensi Badan Tata Kelola

Sustainability Governance Bodies' Competence Development Programmes

102-27

Peran dan Jabatan Role and Position	Judul Program Programme Title
Dewan Komisaris BoC	
<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa The Role of Internal Audit in the Pandemic 3-in-1 Certification (CPHRM, HRBP, HRMP) Kontribusi Pelatihan Dasar Pengawas Syariah IIA National Conference Finance for Non-Finance Director Master Programme 	
Direksi BoD	
<ul style="list-style-type: none"> Mobilising Financial Resources to Support Renewable Energy to Achieve the 2050 Energy Transition Target The Implementation of Social and Environmental Aspects in Toll Road Development: A Case Study Webinar Infrastructure Asia: Improving Bankability of Water Infrastructure through Digitalisation Future of Asia – Climate Risk and Response in Asia in a Post-Pandemic World Sustainable Finance Corporate Access Days 2020 Online Series Webinar Series with Business Indonesia: IIF's Role in Achieving the 2050 Energy Transition Target ASEAN Green Finance State of the Market 2019 – Report Launch Webinar Green Bonds: A Market Solution for the Problem of the Century Climate Resilient Infrastructure METI Online: Decentralised/Distributed Energy Generation 	
Sustainable Finance Working Group	
Asido Sitompul	Coordinator
Febrina Kalangie	Secretary – Investment
Mira Halim	Secretary – Investment
Budi Wiandjono	Senior Member – Social & Environmental
Luciana Budiman	Senior Member – Risk
Anton B. Simatupang	Senior Member – Investment
Maharani Sahara Subandi	Senior Member – Investment
Sri Patriawati	Senior Member – Transaction Legal
Sukarti	Senior Member – Finance
Erwin Manurung	Senior Member – Corporate Planning
	<ul style="list-style-type: none"> S&P Webinar - Infrastructure & Utilities Conference 2020: Energy Transition & ESG for Global Utilities UNEP Webinar: Urban Transport Discussion #14: Fiscal Policy for Urban Air Pollution SDG Indonesia One - Sharing Session with PT SMI Commercial & Industrial Solar Workshop The Biodiversity Consultancy Sharing Session Sustainable Finance Risks and Regulations The Development of Standard Model of Power Purchase Agreement (PPA) for Small Scale Bioenergy Project (≤ 10 MW) Webinar Series with Business Indonesia: IIF's Role in Achieving the 2050 Energy Transition Target Photo Voltaic Solar System Sharing Session The Energy Transition and Covid-19: A Pivotal Moment for Climate Policies And Energy Companies ASEAN+3 Green Bond Policies, Taxonomies, and Certification Process

Kode Etik dan Budaya Perusahaan

Code of Ethics and Corporate Culture

102-16

Isi Kode Etik

Ruang lingkup kode etik yang dimiliki IIF mengatur berbagai hal terkait tata cara kerja, pola hubungan di internal maupun eksternal, serta komitmen perusahaan terkait masalah lingkungan dan kesehatan.

- **Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika**

Kebijakan yang tercantum dalam Etika Bisnis IIF merupakan panduan bagi Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dalam kebijakan ini dinyatakan bahwa semua kegiatan usaha harus dipandu oleh nilai-nilai mendasar IIF, yakni integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, mencakup integritas, kewajaran, hormat, kepedulian, dan pertanggungjawaban pribadi. Selain menjadi panduan dalam pengambilan keputusan beretika sehari-hari, nilai-nilai ini juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapankekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-Korupsi dan Pencegahan Penipuan.

- **Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal, dan Pelaporan Keuangan**

Untuk melindungi sekaligus mengawali aset dan reputasi IIF, Perusahaan berlandaskan pada kebijakan konflik kepentingan, kebijakan sumber daya elektronik, perlindungan data dan kebijakan keamanan, perdagangan efek, informasi *inside trader*, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta retensi dokumen dan *auditing*.

- **Benturan Kepentingan**

Dalam melakukan kegiatan usaha dan melaksanakan tugas, baik segenap karyawan maupun perwakilan IIF, harus bebas dari benturan kepentingan mengingat hal ini dapat berpengaruh buruk pada keputusan, objektivitas, atau kesetiaan mereka pada Perusahaan.

- **Kebijakan Sumber Daya Elektronik**

Kebijakan ini mengatur bahwa penggunaan semua sumber daya elektronik tidak melanggar hukum dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

Content of the Code of Ethics

The Company's Code of Ethics governs several matters related to work procedures, internal and external relationships patterns, and commitment of the Company pertaining to environmental and health issues.

- **Conduct Business Legally and Ethically**

The policies stipulated in IIF Business Ethics are guidelines for the Company in carrying out daily business operations. Within this policy, it is stated that all business activities must be guided by IIF's fundamental values, namely uncompromising integrity and honesty, including integrity, fairness, respect, concern, and personal accountability. In addition to being a guide to everyday ethical decision making, these values are also related to compliance with personal ethics, such as gratification, disclosure of personal wealth, political affiliation and donations, and compliance with Anti-Corruption and Fraud Prevention guidelines.

- **Policies on Information, Internal Control, and Financial Reporting**

To protect and safeguard IIF's assets and reputation, the Company establishes policies regarding conflict of interest, electronic resources, data protection and security, securities trading, insider trader information, internal control, financial reporting, as well as document retention and auditing.

- **Conflict of Interest**

In conducting its business and performing its duties, all of the Company's employees as well as parties acting on behalf of IIF must be free from conflicts of interest that may influence unfavorable judgment, objectivity, or loyalty to the Company.

- **Electronic Resources Policy**

This policy stipulates that the use of all electronic resources does not violate the law in the Business Conduct Policy of IIF. All the Company's employees must protect IIF electronic resources from unauthorised use and security threats.

- Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan**
Segenap karyawan dan perwakilan IIF bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia dari IIF terhadap pengungkapan tanpa izin, entah pengungkapan tersebut bersifat internal atau eksternal, sengaja atau kebetulan. IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dengan tujuan memahami secara lebih baik tentang pasar, pelanggan, dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa pemberian izin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

- Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen dan Kebijakan Audit**
Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Keuangan tahunan dan triwulan yang lengkap dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akunting Indonesia yang diterima luas dan IFRS. Hal ini demi mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan Keuangan yang sesuai dan pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum, dan regulasi terkait akuntansi.

IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung jawab untuk ketepatan, kelengkapan, dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan Keuangan, pengendalian, dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen, dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan Auditor Internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme pemantauan internal.

Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan Advisory dan yang melakukan transaksi pendanaan.

- Hormati Individu dan Masyarakat**

Sikap hormat kita kepada individu dan lingkungan merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Delapan Prinsip, yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan talenta terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan *reward* yang layak kepada para karyawan dan perwakilannya. Semua upaya ini dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan berikut:

- Information Security and Confidentiality**

All IIF employees and other parties acting on behalf of IIF are responsible for protecting IIF's confidential information against unauthorised disclosure, whether internal or external, deliberate, or accidental. IIF also respects the confidentiality and sensitivity of information to which IIF has no rights. IIF has a policy to collect and use business and market information legally and ethically in order to better understand markets, customers, and competitors. Moreover, IIF shall refrain from collecting or using another party's confidential information without permission.

- Internal Control, Financial Reporting, Document Retention, and Auditing Policy**

IIF's management is responsible for the preparation of complete and accurate annual and quarterly financial statements in accordance with the generally accepted accounting principles in Indonesia and the IFRS, and for maintaining appropriate accounting and financial reporting principles and policies as well as internal controls designed to ensure compliance with the relevant accounting standards, laws, and regulations.

IIF adheres to the policies of all parties responsible for the accuracy, thoroughness, and timeliness of the Company's actual and forecasted financial information, and for compliance with internal controls over financial reporting, disclosure controls and procedures, document retention and auditing policies. IIF ensures compliance with these policies through the role of the independent internal and external auditors and through internal monitoring mechanisms.

Information security shall also include protection of proprietary information received from various divisions. Possible conflict of interest exists between divisions providing Advisory services and those performing financing transactions.

- Respect for Individuals and Communities**

Respect for others and the environment is a part of the Eight Principles adopted by the Company, which set IIF apart from other financial institutions in Indonesia. IIF also aims to attract and retain superior talent through a strong commitment to creating a safe and healthy working environment and to generously bestow rewards for its employees and representatives. This is manifested in the following policies:

a. Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatkannya. Manajemen IIF bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.

b. Kebijakan Mengenai Pelecehan

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara, agama, seks, orientasi seksual atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.

• Kebijakan Privasi

IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF sepenuhnya mematuhi kebijakan tentang kepatuhan terhadap semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

• Perilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga

IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam pembukuannya. Penyuapan menunjuk pada tindakan menawarkan, memberi izin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian izin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan yang menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan. IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.

a. Environment, Health and Safety

IIF is committed to creating a healthy and safe work environment for all employees; as such, employees are responsible for being knowledgeable of applicable laws and regulations related to Environmental, Health and Safety issues and adhere to those laws. The management addresses this issue by sending employees to the relevant trainings.

b. Policy on Harassment

IIF is committed to creating a work environment that is free from any form of inappropriate behavior and harassment based on age, disabilities, marital status, race, color, national/regional origins, religion, sex, sexual orientation, or gender identity. Any form of harassment and inappropriate behavior will not be tolerated.

• Privacy Policy

IIF adheres to the policy of full compliance with all applicable privacy and data protection laws. IIF assigns significant importance to earning and retaining the trust of stakeholders, employees, clients, business partners and other parties who share personal information with IIF.

• Conduct with Business Partners and Third Parties

IIF complies with all applicable anti-gratification laws and accurately and diligently records all transactions. Bribery/gratification refers to the action of offering, authorising, or giving valuable items/goods to Government Officers, directly or indirectly, with the intention of obtaining and retaining business or gaining improper advantages, i.e. price increase approval, awarding of contracts, granting of operating permits, approval for product use/registration, favorable court decisions, and tax dispute settlements. IIF abides by all government contracts it has entered into and keeps its subcontracts with business partners compliant with all applicable national, state, provincial, and district laws and regulations and all contract requirements.

Keberlakuan dan Penyebarluasan Kode Etik

Kode Etik IIF berlaku penuh bagi seluruh Insan IIF, baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, hingga karyawan dan pejabat. Setiap karyawan baru diberikan sosialisasi terkait Kode Etik dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan telah membaca dan memahami isi Kode Etik IIF. IIF juga mengimbau semua pihak yang berkepentingan di IIF untuk selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan di negara lain tempat mereka beroperasi.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

IIF telah menetapkan sanksi tegas untuk para pelaku pelanggaran Kode Etik IIF. Bagi karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik maupun tindakan kriminal, IIF akan memberikan tindakan disiplin internal, yang dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, sampai pemutusan hubungan kerja.

Pelanggaran Kode Etik

Di tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan IIF.

Applicability and Dissemination of the Code of Ethics

IIF's Code of Ethics applies to all employees, officers, members of the BoD and BoC. Each new employee will receive information regarding the Code of Ethics and is required to sign a statement declaring that they have read and understood the contents of the Code of Ethics of IIF. IIF also requests all concerned parties at IIF to always comply with the prevailing laws and regulations in Indonesia and in other countries where they operate.

Enforcement and Sanctions for the Violation of the Code of Ethics

IIF has set strict sanctions for violation of the Code of Ethics. Employees who are found guilty of violating the Code of Ethics or criminal acts will receive internal disciplinary action, which can range from verbal warning to written warnings and termination of employment.

Breach of the Code of Ethics

In 2020, there was no breach of the Code of Ethics committed by IIF personnel.

Manajemen Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sustainable Finance Implementation Risk Management

102-16

Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko diterapkan untuk memastikan bahwa bisnis IIF dapat berlangsung secara berkelanjutan. Risiko dikelola sedemikian hingga keseimbangan antara aspek imbal hasil, risiko, dan modal yang dimiliki IIF dapat tercapai dan terjaga.

IIF menerapkan kerangka manajemen risiko secara terpadu di seluruh aspek operasionalnya, dan terus meningkatkan proses manajemen risiko sebagai bagian dari rencana strategisnya dalam mengakomodasi strategi pertumbuhan bisnisnya.

Kerangka manajemen risiko IIF terdiri dari:

1. Kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk sejumlah risiko utama yang dihadapi IIF;
2. Struktur organisasi yang tepat dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas di berbagai tingkatan;
3. Proses manajemen risiko yang memadai (termasuk identifikasi risiko, metodologi penilaian dan pengukurannya, serta pendekatan mitigasi risiko), proses pemantauan risiko dan pengendalian; dan
4. Infrastruktur pendukung, yakni sistem TI dan SDM.

Pengelolaan risiko di IIF bersifat menyeluruh atas setiap aktivitas usahanya. Kegiatan ini dilakukan di bawah koordinasi Direktorat Manajemen Risiko yang dipimpin oleh *Chief Risk Officer* (CRO) dengan fungsi-fungsi di bawahnya.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, IIF menerapkan prinsip tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) yang terdiri dari unit bisnis sebagai pengambil keputusan, unit manajemen risiko sebagai pelapis kedua, dan unit audit internal sebagai lapisan terakhir. Sejumlah komite telah dibentuk pada tingkat Direksi dan Dewan Komisaris, untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pengelolaan risiko dan inisiatif bisnis, pengambilan keputusan, hingga pengawasan. Strategi ini secara keseluruhan adalah bagian dari konsep *four eyes principle* dan pembagian tugas yang secara konsisten diterapkan dalam komitmen IIF untuk tumbuh secara optimal.

Penerapan Manajemen Risiko di 2020

Risiko utama yang IIF hadapi di 2020 berkaitan dengan dampak-dampak dari pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun, beserta dampak-dampak sejumlah inisiatif dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia untuk membatasi penyebaran Covid-19. Dampak-dampak yang paling signifikan berupa terhambatnya aktivitas ekonomi dan investasi dalam

Risk Management System

The risk management system is implemented to maintain IIF's business sustainability. Risks are managed in ways that allow the attainment of a balance between IIF's returns, risks, and capital.

IIF implements an integrated risk management framework and continues to improve the risk management process as part of its strategic plan to accommodate its business growth strategies.

IIF's risk management framework consists of:

1. Comprehensive risk management policies for major risks encountered by IIF;
2. Appropriate organisational structure with clear definition of roles and responsibilities at various levels;
3. Adequate risk management process (including risk identification, assessment and measurement methods and risk mitigation approaches), risk monitoring and control processes; and
4. Supporting infrastructure, i.e., IT system and human resources.

IIF comprehensively manages risk in each business activity under the coordination of the Directorate of Risk Management led by the Chief Risk Officer (CRO), with the assistance of subordinates performing various functions.

To build an effective and efficient risk management capabilities within the Company, IIF adopts the three lines of defense approach, consisting of business unit as the decision maker, risk management unit as the second layer, and internal audit unit as the final line of defense. Several committees have been established at the BoD and BoC levels to be involved in various aspects of business, including risk management, business initiatives and decision making to supervision. This strategy is part of the four eyes principle concept and the division of duties applied consistently as a form of commitment to achieving an optimal business development.

Risk Management Implementation in 2020

The main risks faced by IIF in 2020 were related to the consequences of the Covid-19 pandemic which prolonged throughout the year as movements and activities, including business operations, are partially restricted in order to prevent massive and widespread transmission. The most significant impact was the adverse economic downturn which hampered investment activities in

proyek-proyek infrastruktur, termasuk keterlambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta kesulitan yang dialami oleh banyak pelaku usaha di hampir seluruh sektor, khususnya transportasi, pariwisata, manufaktur, dan UKM, dalam memenuhi kewajiban finansial mereka kepada kreditur ataupun pemegang saham.

Covid-19 merupakan suatu fenomena langka yang membutuhkan penanganan secara terpadu, cepat, dan tepat dari pemerintah dan semua pihak yang berwenang untuk mencari solusinya. Berbagai langkah termasuk pengendalian nilai tukar dan penurunan suku bunga oleh BI dan paket stimulus, jaring pengaman sosial dan hibah, insentif dan dana pendukung untuk aspek-aspek terkait kesehatan, telah dijalankan sejak awal pandemi untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan lebih lanjut dan kemunduran ekonomi yang lebih parah. Di antara langkah-langkah yang telah dilakukan, salah satu yang dilaksanakan oleh dan secara langsung membantu IIF adalah program restrukturisasi kredit yang dimulai melalui Peraturan OJK No. 14 Tahun 2020. OJK sebagai otoritas di bidang keuangan telah melakukan upaya maksimal untuk membendung pemburukan kondisi keuangan di pasar dengan meluncurkan skema restrukturisasi utang yang melibatkan lembaga keuangan, yang mencakup bank dan perusahaan pembiayaan, termasuk IIF. Melalui program ini, klien-klien yang usahanya mengalami kesulitan atau kontraksi akibat Covid-19 mendapatkan kelonggaran dalam pelunasan utang mereka sehingga likuiditas mereka dapat terjaga. Ini dilakukan tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis dan kualitas/klasifikasi aset mereka. Per akhir 2020, IIF menyetujui tujuh klien yang memenuhi syarat untuk menerima restrukturisasi utangnya dalam skema ini.

Secara bersamaan, IIF mengikuti langkah restrukturisasi sebagaimana diatur oleh OJK, sekaligus secara internal melakukan pengelolaan risiko yang dititikberatkan pada pencegahan peningkatan risiko utama. Secara konkret, ini diwujudkan melalui uji ketahanan (*stress test*) terhadap portofolio IIF. Melalui pengujian tersebut, IIF menggunakan berbagai asumsi terkait laju pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, laju inflasi, dll. untuk membuat simulasi pertumbuhan bisnis setiap kliennya, untuk mengantisipasi pemburukan kualitas profil utang masing-masing. Dengan demikian, IIF dapat mempersiapkan kondisi keuangannya sebaik mungkin dan mengambil langkah antisipatif yang diperlukan sedini mungkin. Di tahun 2020, uji ketahanan IIF menggunakan asumsi yang menghasilkan skenario yang hingga akhir tahun 2020 telah dapat diantisipasi oleh IIF secara optimal.

Upaya ini turut didukung dengan pengembangan sistem peringatan dini (*early alert*), yang membantu IIF mengidentifikasi klien-klien yang berpotensi mengalami pemburukan profil kredit dengan cepat, dan dengan demikian perlu segera dimitigasi. Untuk memperlancar proses ini, IIF perlu memahami secara mendalam dinamika yang terjadi di masing-masing sektor industri di mana

infrastructure projects, including delays in project planning and implementation, as well as the difficulties experienced by most businesses, especially in transportation, tourism, manufacturing and SME sectors, in fulfilling their financial obligations to creditors or shareholders.

Covid-19 is a rare phenomenon that demands the government and all relevant authorities to mount concerted, swift, and effective response to find mitigations and solutions. Various measures including exchange rate control and reduced interest rate policy by BI and stimulus package, social safety net and grants, incentives and support funds for health-related aspects have all been introduced since the emergence of the outbreak to pre-empt further decline in confidence and deeper economic downturn. Among the measures introduced, one that was implemented by and directly helped IIF is the credit restructuring program commenced through the OJK Regulation No. 14/2020. OJK as the authority in the financial sector has deployed an optimum effort to allay the deterioration of the financial markets by launching this program through the provision of debt restructuring scheme involving financial institutions, which include banks and financial companies such as IIF. The program allows clients whose businesses were proven to have experienced difficulties or contraction specifically due to Covid-19 to apply for a temporary relief regarding their obligation to repay their debts to ensure that their liquidity can be maintained. This shall be done without jeopardising going concerns aspect and their asset quality/classifications. At the end of 2020, IIF approved seven accounts that fit to have their debt restructured under this scheme.

Simultaneously, IIF undertook a more vigilant risk management approach that was focused on preventing any noticeable increases in major risks. In concrete steps, this was done via several initiatives such as stress tests on IIF's portfolio. Through these tests, IIF used various assumptions related to economic growth rates, interest rates, exchange rates, inflation rates, etc. to simulate the business growth of each client, to eventually anticipate any deterioration of the quality of each client's debt profile. Thus, IIF could prepare its financial condition as best as possible and take the necessary anticipatory steps as early as possible. In 2020, the assumptions used in IIF's stress tests had resulted in a scenario that up to the end of 2020 had been well and optimally anticipated by IIF.

Such initiative was further supported by the development of an early alert system, which helped IIF to quickly identify clients who might show a deterioration in their credit profile, and thus might need to be immediately mitigated before it gets problematic. To streamline this process, IIF had to understand in depth the dynamics that occurred in each industrial sector where IIF clients operate, as well as

klien-klien IIF beroperasi, sekaligus mengidentifikasi sensitivitas setiap klien terhadap perubahan yang telah dan mungkin terjadi. Sistem peringatan dini ini dikembangkan berdasarkan praktik terbaik yang berlaku internasional.

Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya

IIF menghadapi beberapa jenis risiko utama, yakni:

1. Risiko Kredit dan Pembiayaan

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat ketidakmampuan IIF dalam mendapatkan pengembalian investasi yang layak dari pembiayaan langsung (penyertaan ekuitas) pada perusahaan nasabah.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan investasi, peran aktif Komite Investasi terkait dalam melakukan penilaian atas setiap pengajuan pembiayaan dan investasi, sehingga dapat diperoleh pandangan berimbang, komprehensif, independen, dan menyeluruh atas potensi risiko yang dihadapi.
- b. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko, antara lain pengaturan alur kerja proses pengelolaan kredit dan investasi sehingga tercipta proses kredit yang efektif dan efisien.
- c. Penerapan sistem pemeringkatan risiko yang memungkinkan IIF mengukur tingkat risiko dan menganalisis kelayakan klien dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran yang konsisten, baik untuk modalitas pembiayaan korporasi maupun pembiayaan proyek.
- d. Pemantauan secara periodik terhadap portofolio pembiayaan untuk memastikan kualitas kredit yang baik, termasuk *early warning indicator* untuk mendeteksi perubahan kualitas kredit sejak dulu sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan sedini mungkin. Jika terjadi penurunan kualitas kredit secara signifikan, maka pemantauan lebih intensif dilakukan oleh Direktorat Investasi bekerja sama dengan Direktorat Risiko Kredit, yang dapat melakukan tindakan pemulihan sebagaimana dianggap perlu.
- e. Penerapan berbagai langkah uji kelayakan proyek (terkait aspek teknis, legal, finansial, dan S&E), ketentuan, syarat dan pra-syarat serta janji-janji (*covenants*) yang harus dipenuhi oleh peminjam yang dievaluasi secara berkala oleh IIF, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait garansi dari sponsor, agunan (diutamakan aset tetap), dan asuransi atas aset-aset tetap yang dijaminkan kepada IIF.

identify the sensitivity of each client to changes that have occurred and may occur. This early warning system was developed based on international best practices.

Risk Profile and Mitigation Measures

In its business, IIF faces a number of key risks, i.e.:

1. Credit and Financing Risk

Credit risk is the risk that occurs due to the failure of the counterparty to fulfill its obligations based on financing agreement, including financing risk due to IIF's inability to acquire proper investment return from direct financing (equity participation) in the customer's business.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. The implementation of the principle of prudence in the provision of financing and investing and an active role of the Investment Committee in evaluating each application for these activities. This is done to ensure that IIF acquires a balanced, comprehensive, independent, and thorough overview of encountered potential risks.
- b. Improvement of risk management procedures and systems, including workflow arrangements between credit risk management, financing, and investing activities, to create an effective and efficient credit initiation process.
- c. Implementation of risk rating system that allows IIF to measure the level of risk and analyse the feasibility of clients and/or infrastructure projects using consistent measurement tools, both for corporate financing and project financing.
- d. Periodic monitoring on the financing portfolio to ensure good credit quality, including an improvement and formalisation of early alert system to provide warning indicator in detecting changes in credit quality thus mitigations can be introduced at an early stage. If a major deterioration in credit quality occurs, more intensive monitoring will be carried out by Investment Directorate in cooperation with Credit Risk which may lead to performing recovery actions if deemed necessary.
- e. Implementation of various due diligence in verifying project's viability (in technical, legal, financial, and S&E aspects), provisions, conditions and prerequisites, covenants and undertakings that must be fulfilled and followed by creditors that are regularly evaluated by IIF, including but not limited to provisions for sponsor's guarantee, collaterals (preferably fixed assets) and insuring the respective fixed assets pledged.

- f. Pengembangan basis data secara terintegrasi untuk mendukung pemantauan pasca-persetujuan secara tepat waktu (antara lain perjanjian finansial dan non-finansial yang harus dipenuhi dalam waktu tertentu) yang dibagi di antara risiko kredit, investasi, dan operasi kredit.
- g. Pemantauan portofolio pembiayaan dengan *portfolio monitoring* dan uji ketahanan secara berkala, serta evaluasi internal untuk investasi perusahaan yang dilakukan dari waktu ke waktu apabila nilai pasar tidak tersedia.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan faktor-faktor pasar yang dapat merugikan IIF, dalam hal ini nilai tukar mata uang atau suku bunga.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Penetapan strategi investasi yang terukur dan terencana dalam parameter yang dapat diterima dengan mengoptimalkan tingkat pengembalian terhadap risiko pasar. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan atas strategi pembiayaan dan investasi untuk memastikan sesuai dengan kebijakan, batasan dan target yang telah ditetapkan.
- b. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) melakukan pemantauan secara berkala atas pergerakan indikator-indikator pasar, baik domestik maupun global. Kajian dilakukan atas dampak yang dapat ditimbulkan dari pergerakan indikator-indikator pasar tersebut terhadap kinerja IIF, termasuk kajian akan risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar mata uang.
- c. Terkait risiko nilai tukar, IIF sedapat mungkin menyesuaikan antara pembiayaan dan pendanaan dalam valuta yang sama, sehingga tercipta *natural hedge*. Selain itu, IIF menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko valuta asing, di antaranya dengan menjaga keseimbangan antara jumlah aset dan liabilitas dalam valuta asing pada tingkat posisi devisa neto yang terjaga rendah, yang rasional harus dijaga di bawah 5% dari total modal. Jika terdapat peningkatan risiko nilai tukar, transaksi lindung nilai (*hedging*) atas eksposur terhadap nilai tukar tertentu akan dilakukan.
- d. Terhadap aset yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pinjaman, IIF secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, memantau biaya dana dengan memperhatikan tingkat risiko dan imbal hasil yang optimal. IIF juga melakukan analisis sensitivitas terhadap proyek-proyek yang dibiayai terhadap kenaikan tingkat suku bunga sebagai bagian dari proses evaluasi kredit. Hasil dari pemantauan dan evaluasi pasar digunakan untuk mendukung kebijakan *Base Lending Rates* yang disusun oleh ALCO setiap triwulan. Kebijakan ini akan dipertahankan sebagai dasar dalam *loan pricing*.

- f. Integrated database development to support post-approval monitoring on timely basis (e.g. financial and non-financial covenants that need to be fulfilled in due course) that is shared between credit risk, investment and credit operations.
- g. Monitoring the financing portfolio with portfolio monitoring and stress testing on a regular basis, including internal valuations carried out from time to time for equity investments if market values are not available.

2. Market Risk

Market risk is the risk arising from changes in market factors that may harm IIF, in this case exchange rates or interest rates.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. Determination of measured and planned investment strategies within acceptable parameters by optimising the rate of return on market risk. Periodic monitoring and evaluation is executed on financing and investment strategies to ensure compliance with policies, limits, and targets that have been set.
- b. The Asset and Liability Committee (ALCO), conducts regular monitoring on market indicators movement, both domestic and global. The study is conducted on the impact resulting from the movement of these market indicators towards IIF's performance, including the study of interest rate risk and exchange rate risk.
- c. Regarding exchange rate risk, IIF adjusts as much as possible between financing and funding in the same currency, to create a natural hedge. In addition, IIF applies the principle of prudence in managing foreign exchange risk, including maintaining the balance between the amount of assets and liabilities in foreign currencies at a low level of net open foreign exchange position, which ratio must be maintained at below 5% of total capital. If there is an increased foreign exchange risk, hedging transactions will be conducted on exposures against certain exchange rates.
- d. With respect to assets that are sensitive to interest rate movements such as loans, IIF regularly monitors market developments and adjusts the provided interest rates, monitoring the cost of fund with the optimal level of risk and return. IIF also conducts a sensitivity analysis of projects financed for rising interest rates as part of the credit evaluation process. The result of market monitoring and evaluation is considered as supporting for Base Lending Rates policy which is released by ALCO in quarterly basis. This policy will be preserved as a basis in loan pricing.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul dari ketidakmampuan IIF untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangannya.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Menjaga tingkat minimum likuiditas dan melakukan pengalokasian dana dalam instrumen keuangan yang likuid.
- b. Pemantauan atas pengelolaan likuiditas secara berkala oleh ALCO minimal satu kali dalam satu bulan, termasuk perencanaan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan investasi.
- c. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, eksekusi sampai dengan pemantauan dan pelaporan kepada Komite Aset dan Liabilitas di bawah Direksi.
- d. Ekspansi fasilitas likuiditas jangka pendek untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas yang muncul tiba-tiba dalam bisnis atau operasional perusahaan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Penetapan tata cara kerja operasional IIF yang memadai, seperti kebijakan, prosedur, pedoman, ataupun kesepakatan-kesepakatan kerja tertulis.
- b. Peningkatan *risk awareness* seluruh karyawan melalui sosialisasi berkala, penyempurnaan kebijakan dan prosedur secara berkala atau jika diperlukan, serta pengkajian *Business Process Analysis* secara berkesinambungan, termasuk proses *Know Your Customer (KYC)* dalam pemberian kredit.
- c. Penyusunan dan penerapan rencana usaha yang berkesinambungan (*Business Continuity Plan*) untuk memastikan bahwa kegiatan operasional IIF tetap berkelanjutan meskipun terjadinya peristiwa gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kegiatan operasional tidak dapat dilakukan seperti dalam keadaan normal. IIF juga memiliki sistem komunikasi darurat (*Call Tree System*) dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional. Sistem ini diterapkan secara berkala untuk memantau efektivitasnya.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of IIF being unable to obtain funds to meet obligations due from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets without disrupting its activities and financial condition.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. Maintaining a minimum level of liquidity and allocating funds in liquid financial instruments.
- b. Regular monitoring of liquidity management by the ALCO at least once a month, including planning for funding needs that are tailored to the needs of financing and investment.
- c. Formulation and determination of funds management policies and procedures governing the stages from the planning, execution to monitoring and reporting to the BoD's ALCO.
- d. Expansion of short-term liquidity facility for anticipating the sudden liquidity needs for company business or operation.

4. Operational Risk

Operational risk is the risk caused by inadequate and/or malfunctioning of internal processes, human errors, system failures, or external problems that affect IIF's business activities.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. Determination of adequate operational procedures for IIF such as policies, procedures, guidelines, or written work agreements, and efforts for continuous improvement of policies and procedures on a regular basis or whenever needed.
- b. Increased risk awareness of all employees through periodic dissemination, as well as a continuous review on Business Process Analysis, including on Know Your Customer (KYC) on credit process.
- c. Preparation and implementation of Business Continuity Plan to ensure that IIF's operational activities prevail despite the occurrence of earthquakes, fires, and so on, which result in operational activities being unable to be carried out as in normal circumstances. IIF has an emergency communication system (Call Tree System) in the event of cessation of its operational activities. This system is implemented regularly to assess its effectiveness.

- d. Untuk memitigasi risiko kehilangan data dan sistem aplikasi IT yang kritikal jika pusat data internal/utama (*primary data centre*) mengalami kerusakan, IIF telah memberlakukan sistem pemulihan bencana (*Disaster Recovery System*) dengan menyewa pusat data eksternal sebagai pencadangan dari pusat data utama untuk menjaga kelangsungan beroperasinya sistem aplikasi IT yang kritikal, dan menyusun prosedur pemulihan bencana.
- e. Melakukan mitigasi dengan cara pengalihan risiko kepada pihak asuransi untuk jenis risiko operasional tertentu seperti risiko *fraud* (termasuk penggelapan dan pencurian data), risiko tuntutan dari pihak ketiga kepada Direksi ataupun karyawan, serta kebakaran maupun kejadian alam lainnya.
- f. Pembentukan Komite Pencegahan Pelanggaran dan Kecurangan (FCPC). FCPC membahas dan memutuskan kasus-kasus dugaan penipuan dan korupsi serta tindakan yang akan diambil (seperti investigasi dan eskalasi ke pihak penegak hukum).
- g. Pembentukan kerangka kerja dan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) untuk unit bisnis dan fungsional yang utama. RCSA akan ditinjau dan dimutakhirkan setiap tahunnya untuk memastikan relevansinya terhadap lingkungan operasi internal dan eksternal yang berlaku.
- h. Terkait risiko TI, IIF kerap melakukan pemeliharaan teknis pada server VPN untuk meningkatkan stabilitas koneksi dan keamanan akses jarak jauh. IIF juga telah mengembangkan *Data Warehouse* awal untuk mengonsolidasikan dan mengintegrasikan berbagai data dari beberapa sistem inti untuk menjaga integritas dan keamanan data serta untuk meningkatkan aksesibilitas, pemanfaatan, dan analisis data.
- i. Terkait pandemi Covid-19, IIF telah melakukan langkah pencegahan berikut:
 - Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk memberikan respons segera dan merumuskan solusi/tata kelola untuk mendukung Rencana Keberlangsungan Bisnis IIF;
 - Menyiapkan strategi untuk operasi skala terbatas, yang mencakup kebijakan 100% bekerja dari rumah (WFH) atau 50% bekerja dari kantor (WFO) tergantung keadaan, ditinjau setiap dua minggu;
 - Mewajibkan karyawan yang WFO sesuai jadwal untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap infeksi, seperti menjalani tes serologi dan melakukan penilaian mandiri Covid-19;
 - Memberikan perlindungan seperti *hand sanitiser* dan masker di beberapa lokasi kantor;
 - Mendisinfeksi kantor setiap minggu;
- d. To mitigate the risk of data loss and critical IT application systems should the internal/primary data centre become damaged, IIF implements a Disaster Recovery System by renting an external data centre as a back-up from the main data centre to maintain the continuity of the operation of the critical IT application system, and develop disaster recovery procedures.
- e. Mitigation implementation by transferring risk to the insurance party for certain types of operational risk such as property and casualty risks to cover for IIF's assets, financial risk to mitigate financial crime (including fraud, embezzlement, and data theft), risk of claims from third parties to the BoD or employees, as well as insurance against terrorism, fire, and natural events.
- f. Establishment of Fraud and Corruption Prevention Committee (FCPC). FCPC will discuss and decide on suspected fraud and corruption cases and actions to be taken (such as investigation and escalation to law enforcement).
- g. Establishment of the framework and Risk Control Self-Assessment (RCSA) for key business and functional units. RCSA will be reviewed and updated annually to check the relevancy to the current internal and external operating environment.
- h. Regarding IT risk, IIF has performed frequent technical maintenance on Virtual Private Network server to increase connection stability and security for remote access. IIF has also developed an initial Data Warehouse to consolidate and integrate various data from several core systems to maintain data integrity and security and to enhance data accessibility, utilisation, and analysis.
- i. Regarding the Covid-19 pandemic, IIF has implemented several prevention measures, as follows:
 - Establishment of Covid-19 Task Force Team ("Tim Gugus Tugas Covid-19") to provide immediate response and to formulate solution/governance to support IIF's Business Continuity Plan;
 - Setting up strategy on limited operations, which includes 100% work from home ("WFH") or 50% work from office ("WFO") policy depending on the circumstances, to be reviewed every two weeks;
 - Requiring employees who will take WFO as per schedule to conduct preventive measures against infection such as having (serology) test and completing Covid-19 self-assessment;
 - Providing protection such as hand sanitisers and masks at several office locations;
 - Disinfecting the office every week;

- Sedapat mungkin menghindari pertemuan langsung secara fisik, kecuali untuk hal-hal penting yang strategis dan/atau persiapan dan penandatanganan dokumen IIF, dan menyelenggarakan rapat di kantor secara virtual;
- Tidak menerima tamu atau pihak eksternal untuk datang ke kantor IIF, kecuali vendor atau telah disetujui Komite Eksekutif (Excomm) terkait untuk hal-hal penting strategis dan/atau persiapan dan penandatanganan dokumen IIF;
- Pemeriksaan suhu dan administrasi penilaian mandiri di pintu masuk untuk semua tamu yang telah menerima izin untuk datang ke kantor IIF;
- Karyawan dapat menggunakan tunjangan rawat jalan untuk sementara waktu untuk membeli vitamin C dan E sesuai kebutuhan tanpa resep dokter;
- Karyawan dapat mengganti biaya tes usap sesuai kebijaksanaan Excomm terkait;
- Tunjangan transportasi sesuai nilai bagi karyawan yang menggunakan transportasi umum dan belum memenuhi syarat untuk menerima program kepemilikan mobil;
- Kunjungan lapangan hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir oleh sejumlah kecil karyawan;
- Mewajibkan karyawan mengikuti protokol untuk kunjungan lapangan, termasuk persyaratan untuk melakukan tes usap setelah kembali ke Jakarta.
- Avoiding physical direct meeting as much as possible, unless for strategic important matters and/or preparation and signing of IIF's documents, and conduct meetings in the office virtually;
- Not accepting guests or external parties to come to IIF's office, except vendors or approved by related Executive Committee (Excomm) for strategic important matters and/or preparation and signing of IIF's documents;
- Temperature checks and self-assessment administration at the entrance for all guests who have received clearance to come to IIF's office;
- Employees may temporarily use outpatient limits to purchase vitamin C and E as needed without doctor's prescription;
- Employees may reimburse swab test as per discretion of related Excomm;
- Transportation allowance (at cost) for employees using public transportation and not eligible to receive car ownership program;
- Site visits only carried out as a last resort option by a very limited number of employees;
- Requiring employees to follow protocols for site visits, which include requirement to take swab test after returning to Jakarta.

5. Risiko Sosial dan Lingkungan

Risiko ini dapat muncul apabila proyek tidak mematuhi dan/atau tidak menerapkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, dan/atau mengabaikan penerapan *Good International Industry Practice* (GIIP) terkait aspek S&E. Peraturan dan praktik terbaik ini menjadi landasan pembangunan berkelanjutan yang menciptakan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Risiko ini dapat dikelola dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan memastikan semua proyek yang dibiayai IIF memenuhi persyaratan dan ketentuan lingkungan, keselamatan, kesehatan, serta persyaratan sosial yang berlaku.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait kegiatan usaha IIF atau persepsi negatif terhadap IIF sehingga berpotensi memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan usaha IIF.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Melakukan pemantauan terhadap adanya persepsi negatif atau publikasi negatif terkait dengan IIF ataupun proyek-proyek yang dibiayai IIF, termasuk namun tidak terbatas pada masalah mengenai sosial dan lingkungan proyek-proyek tersebut.

5. Social and Environmental Risk

Such risk may arise if projects do not comply and/or do not implement the applicable rules and regulations in Indonesia, and/or ignore the implementation of Good International Industry Practice (GIIP) concerning S&E aspects. These regulations and best practices are the foundation of sustainable development which promotes the harmony between economic, social, and environmental aspects.

These risks can be mitigated by applying the principle of prudence by ensuring that all projects financed by IIF meets the applicable environmental, safety, health, and social requirements and provisions.

6. Reputation Risk

Reputational risk is a risk caused by, among others, negative publications related to IIF's business activities or negative perceptions of IIF that have the potential to adversely affect its business continuity.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. Monitoring any negative perceptions or negative publications related to IIF or to projects financed by IIF, including but not limited to social and environmental issues of the projects.

- b. Melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap persepsi atau publikasi bernada negatif yang berpotensi merugikan IIF.
- c. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan citra IIF yang baik termasuk dengan media. Untuk arus komunikasi diupayakan sedapat mungkin melalui satu pintu (Sekretaris Perusahaan) untuk menghindari kesalahpahaman atau informasi yang menyesatkan.
- d. Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat membantu proses komunikasi dan keterbukaan informasi, seperti pengelolaan situs web IIF.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain muncul dari penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat dan/atau kurang responsifnya IIF terhadap perubahan eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Membangun tim dan portofolio pembiayaan yang memadai sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan regulasi.
- b. Berupaya melakukan diversifikasi usaha baik dalam produk yang ditawarkan maupun diversifikasi sektor-sektor infrastruktur yang ditunjang oleh sumber pendanaan yang tepat dari sisi jangka waktu, jenis mata uang dan tingkat suku bunga.
- c. Secara berkala melakukan kajian secara internal di antara Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun para pemegang saham dalam menentukan rencana strategis IIF.
- d. Penyusunan rencana strategis IIF sebagai tahapan mewujudkan fungsi IIF yang tertuang dalam RKAP, di mana indikator-indikator pentingnya telah dirangkum dalam Penilaian Kinerja IIF sebagai suatu Kontrak Manajemen.
- e. Terhadap risiko persaingan oleh adanya lembaga keuangan lain yang menawarkan produk serupa maupun bersifat substitusi kepada tipe konsumen yang berada dalam target pasar IIF, IIF menerapkan strategi yang ditujukan untuk bersinergi dengan perbankan, lembaga keuangan ataupun investor lainnya, termasuk menyediakan produk dan jasa yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko terdapatnya ketidakpatuhan IIF untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Untuk menangani risiko ini, IIF telah menetapkan Prosedur Penerapan Kebijakan untuk Kerangka Kerja Kepatuhan, dalam rangka mendefinisikan tata kelola dan metodologi untuk proses-proses kepatuhan.

- b. Supervising and following up on negative perceptions or negative publications that have the potential to harm IIF.
- c. Carrying out communication activities both internally and externally with stakeholders through activities that can foster a good corporate image, including with media. For communication flow, it is strategised to be directed, whenever most possible, via single access (e.g. Corporate Secretary) as to avoid any misunderstanding or misleading information.
- d. Developing information technology infrastructure that may help the process of communication and information disclosure, such as managing IIF's corporate website.

7. Strategic Risk

Strategic risk is a risk caused by the determination and implementation of improper corporate strategy and/or IIF's lack of responsiveness to external changes that could potentially result in losses.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. Establishment of an adequate funding team and portfolio in accordance with the mandate it receives based on regulations.
- b. Utmost efforts to diversify its business, both in the products offered and in diversification of the infrastructure sectors supported by appropriate funding sources in terms of timeframe, currency, and interest rates.
- c. Periodic internal review by the BoD in which IIF can obtain approval from the BoC and the shareholders in determining IIF's strategic plan.
- d. The preparation of IIF's strategic plan as a process of implementing its functions as stipulated in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), whose the important indicators have been summarised in the Corporate Performance Assessment as a Management Contract.
- e. Mitigation against the risk of competition from other financial institutions offering similar or substitute products to the types of consumers who are part of IIF's target market is done through adoption of strategies aimed at creating synergies with banks, financial institutions or other investors, including providing products and services that cannot be provided by other financial institutions.

8. Compliance Risk

Compliance risk is the risk for IIF of being non-compliant with the laws and regulations and other applicable provisions.

For this risk, IIF has established the Policy Implementation Procedure for Compliance Framework to define its governance and methodology for compliance processes.

IIF melakukan kajian dan pemantauan secara berkala (*compliance checklist*) atas kepatuhan IIF terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan penerapannya di lingkungan IIF. Hasil pemantauan dilaporkan ke Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi serta Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris secara triwulanan. IIF juga telah memastikan bahwa *compliance checklist* senantiasa mutakhir dan komprehensif. Pemutakhiran dilakukan dengan menyertakan persyaratan peraturan dan perjanjian yang baru dalam perjanjian pinjaman baru.

9. Risiko Kebijakan Pemerintah

Ketidakmampuan IIF dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada IIF (oleh Pemerintah atau Regulator) akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja IIF.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain mengupayakan kerja sama dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menjalankan mandatnya.

10. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau cidera janji berdasarkan perjanjian yang mengikat IIF dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh IIF yang dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga terhadap IIF.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- Memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara IIF dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan kajian dan pemantauan secara berkala sehubungan dengan kepatuhan IIF terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan telah dilakukan penerapannya di lingkungan IIF.

11. Risiko Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian nasional maupun global turut mempengaruhi kegiatan usaha IIF. Menyikapi kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan, IIF menerapkan manajemen aset dan liabilitas ketat guna mengoptimalkan pendanaan, dengan pengawasan oleh ALCO. Terhadap kemungkinan meningkatnya risiko kredit atas pembiayaan yang diberikan akibat perubahan kondisi perekonomian, IIF melakukan simulasi pasar melalui *stress test* yang dapat memberikan gambaran terkait risiko kredit yang mungkin timbul akibat dinamika kondisi perekonomian, sehingga dapat dilakukan langkah dini untuk menekan dampak yang merugikan.

IIF conducts periodic review and compliance checklist of IIF's compliance with the applicable laws and regulations externally and internally to ensure that it is implemented adequately. The monitoring results are reported to the Risk Management Committee under the BoD and the Risk Oversight Committee under the BoC on a quarterly basis. IIF has also reviewed the compliance checklist to ensure it is up-to-date and comprehensive. The update was to include new regulatory requirements and covenants under new loan agreements.

9. Government Policy Risk

IIF's inability to anticipate, fulfill and/or adjust to the provisions that apply to IIF (by the Government or Regulator) will cause losses that have a negative impact on its performance.

This risk is mitigated by measures that include collaboration and building communication with stakeholders in carrying out the mandate that IIF bears.

10. Legal Risk

Legal risk is risk caused by negligence or default based on agreements that bind IIF and/or violations of the laws and regulations perpetrated by IIF that can lead to lawsuits by third parties against IIF.

This risk is mitigated by measures that include:

- Ensuring that all activities and relationships between IIF and third parties are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
- Conducting review and monitoring on a regular basis in connection with IIF's compliance with applicable laws and regulations as well as ensuring its implementation has been carried out in IIF.

11. Economic Conditions Risk

National and global economic conditions affect IIF's business activities. In response to unfavourable economic developments, IIF implements a strict asset and liability management to optimised funding, overseen by the ALCO. To deal with the possibility of increasing credit risk on financing provided due to changes in economic conditions, IIF conducts market simulations through stress tests that can provide an overview on credit risk that may arise due to the dynamics in economic conditions, so that early supervision can be carried out to reduce adverse impacts.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko 102-30

Untuk memantau perkembangan profil risiko IIF dari waktu ke waktu, di tahun 2020 BoD-IC mengadakan rapat setiap bulan untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Manajemen dengan segera. Dengan demikian, setiap risiko utama di tahun 2020 termitigasi dengan baik.

Sementara itu, IIF juga memperkuat sistem manajemen risikonya secara berkelanjutan dengan menekankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Sosial & Lingkungan (*Social & Environmental—S&E*) yang telah menjadi bagian esensial dari bisnis IIF. Terkait hal tersebut, IIF secara rutin mengidentifikasi profil risiko terkait aspek S&E di masing-masing proyek yang dibiayai, memantauanya, serta memastikan kepatuhan dari klien terhadap prinsip-prinsip S&E ini.

Sepanjang 2020, IIF juga menyempurnakan kerangka parameter risikonya agar selaras dengan penyesuaian dalam kebijakan batas kendali dan selera risiko, namun pada dasarnya pendekatannya tidak berubah. Menggunakan kerangka ini, IIF menilai sendiri profil risikonya setiap triwulan berdasarkan perkembangan dan prospek terkini, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Pada Oktober 2020, OJK mengeluarkan peraturan baru No. 46/2020 yang secara khusus disusun untuk mengatur perusahaan pembiayaan infrastruktur seperti IIF. Ini dinilai positif karena dipandang lebih tepat dan memberikan kejelasan bagi IIF terkait penegakan regulasi. Regulasi tersebut antara lain mencakup limit eksposur yang harus ditaati oleh IIF. Sejauh ini, batasan yang ditetapkan masih sejalan dengan kebijakan batasan pengendalian internal di IIF.

Dengan mempertimbangkan seluruh upaya yang telah dilakukan, dan memandang bahwa tingkat risiko di IIF secara komposit per akhir 2020—yakni “Moderat”—tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2019, maka IIF menilai bahwa proses pengelolaan risiko di sepanjang tahun 2020 telah berjalan dengan efektif dan optimal.

Kebijakan dan Praktik Anti-Korupsi

103-1, 103-2, 103-3: Anti-Korupsi
205-1, 205-2

Penipuan dan korupsi dapat merusak reputasi dan membawa konsekuensi buruk bagi perusahaan dan juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Penipuan dan korupsi juga kerap terjadi apabila pihak-pihak yang berkepentingan bersikap abai dan tidak peduli terhadapnya. Oleh karena itu, IIF berkomitmen untuk mengembangkan strategi pengendalian penipuan dan korupsi. Salah satu strategi IIF adalah menyusun pedoman pencegahan penipuan dan antikorupsi yang berlaku bagi semua karyawan IIF

Overview of the Effectiveness of the Risk Management System 102-30

To monitor the development of IIF's risk profile from time to time, in 2020 the BoD-IC held monthly meetings to discuss issues that required the Management's immediate attention. Hence, every major risk that IIF faced in 2020 were properly mitigated.

Meanwhile, IIF also strengthens its risk management system in a continuous manner by emphasising and enhancing the application of Social & Environmental (S&E) principles which have become an essential part of IIF's business. In this regard, IIF regularly identifies the risk profile related to the S&E aspects of each project being financed, monitors them, and ensures the client's compliance with these S&E principles.

During the year, IIF also refined the risk parameter framework to align with adjustment in control limit policy and risk appetite, but essentially, the approach remains unchanged. By using this framework, IIF self-assesses its risk profile each quarter based on the recent development and outlook and reported to the BoC. In October 2020, OJK issued Regulation No. 46/2020, specifically prepared to govern the infrastructure financing companies such as IIF, which was perceived positively as it is more suitable and provides more clarity for IIF on regulatory enforcement. The regulation covers, among others, limit exposures to be adhered to by IIF. Thus far, the limit stipulated is still in line with IIF's internal control limit policy.

Taking into account all the efforts that have been made, and considering that IIF's composite risk level at the end of 2020—“Moderate”—had not increased significantly compared to 2019's, IIF assessed that the risk management process throughout 2020 has been implemented effectively and optimally.

Anti-Corruption Policy and Activities

103-1, 103-2, 103-3: Anti-Corruption
205-1, 205-2

Fraud and corruption can damage organisations of any size, bringing unintended consequences to the organisation and broader economy alike. Fraud and corruption are also more likely to flourish in an environment of ignorance and neglect. IIF is therefore committed to developing fraud and corruption control strategies to address issues associated with fraud and corruption. One of the strategies taken by IIF is by developing a guideline for fraud prevention and anti-corruption. This guideline applies to all employees

dan harus dibaca bersama dengan Pedoman Perilaku IIF. IIF mewajibkan klien dan mitra usahanya untuk mematuhi kebijakan antikorupsi IIF dan menyampaikan dokumen "Panduan Pencegahan dan Pemberantasan Penipuan dan Korupsi dalam Proyek yang Dibiayai oleh Pinjaman IBRD dan Kredit dan Hibah IDA" sebelum penandatanganan Perjanjian Fasilitas. IIF juga memasukkan klausul tentang praktik korupsi dan penipuan yang dapat dikenai sanksi sebagai bagian dari Perjanjian Fasilitas.

IIF telah menilai risiko terkait korupsi di lokasi operasional satu-satunya, yakni di Kantor Pusat di Jakarta. Dengan demikian, 100% operasi IIF telah dinilai risikonya. Risiko ini dimitigasi melalui penerapan *four eyes principle* dan pemisahan tugas dalam aktivitas utama, larangan menerima hadiah lebih dari Rp1.000, sesi sadar risiko bagi karyawan, kebijakan pelaporan pelanggaran, dan pernyataan yang harus ditandatangani karyawan bahwa mereka akan mematuhi kode etik dan kebijakan antikorupsi. Risiko residualnya dikategorikan medium, dan saat ini ambang batas yang lebih tinggi untuk nilai hadiah yang boleh diterima (di atas Rp1.000) tengah diusulkan kepada manajemen.

Sepanjang 2020, IIF menyebarluaskan pedoman pencegahan penipuan dan antikorupsi kepada 6 anggota Direksi dan 9 anggota Dewan Komisaris, atau 100% dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sebanyak 98 karyawan atau 100% dari keseluruhan tenaga kerja IIF (tidak termasuk Dewan Komisaris dan Direksi) telah mengikuti sosialisasi kebijakan pencegahan penipuan dan antikorupsi. IIF juga mewajibkan semua vendor menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen bahwa mereka tidak akan menjalankan praktik koersif, kolusi, korupsi, penipuan, ataupun obstruktif dalam bentuk apapun.

Selain menyebarluaskan kebijakan pencegahan penipuan dan antikorupsi, IIF juga mengadakan pelatihan antikorupsi setidaknya setahun sekali bagi seluruh karyawannya.

of IIF and is to be read in conjunction with IIF's Code of Conduct. IIF also requires its clients and business partners to comply with IIF's anti-corruption policies by delivering a document, "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", prior to signing the Facility Agreement. IIF also includes clauses on sanctionable practices of corruption and fraud as part of the Facility Agreement.

IIF has assessed the risks related to corruption at its only operational location which is located in the Head Office in Jakarta. Thus, 100% of its operations have been undergone risk assessment. The risk is mitigated through four eyes principle and segregation of duties in the key activities, policy of not receiving gift beyond Rp1,000, risk awareness session to employees, whistleblowing policy, and statement signed by employees to comply with code of conduct and anti-corruption policy. The residual risk is considered medium, with the action plan of proposing a higher threshold for receiving gifts (valued above Rp1,000) to the management currently in progress.

Throughout 2020, IIF disseminated the guideline for fraud prevention and anti-corruption to 6 members of the BOD and 9 members of the BOC, or 100% of the members of both the BOD and the BOC. All 98 employees or 100% of the total employees (not including BOC and BOD) received the dissemination of IIF's fraud prevention and anti-corruption policies. Furthermore, IIF requires all vendors to sign an Integrity Pact as a commitment that the vendors will not conduct coercive, collusive, corrupt, fraudulent, or obstructive practices in any form.

Other than disseminating the fraud prevention and anti-corruption policies, IIF also conducted a range of training on anti-corruption once a year to all employees.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholder Engagement

Dalam menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan, IIF melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kebutuhan dan pertimbangan para pemangku kepentingan perlu diakomodasi dan dimediasi, sehingga dapat mendukung terwujudnya visi IIF.

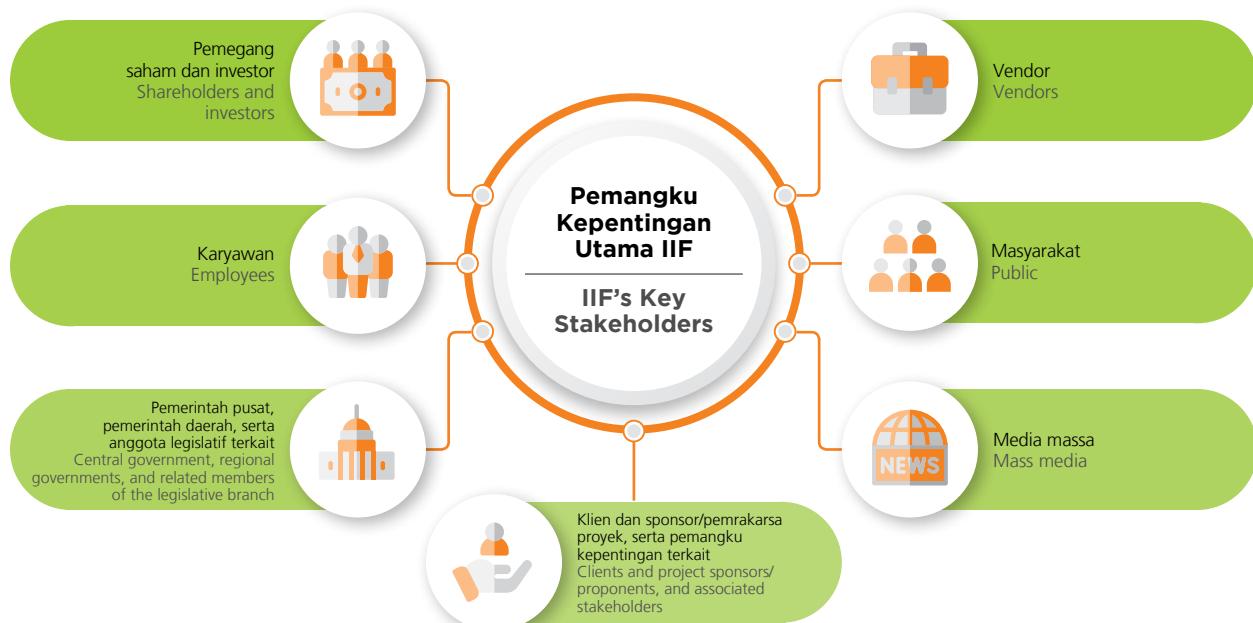
Karena para pemangku kepentingan memiliki peran dan tujuannya masing-masing, IIF mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis dan sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat terbentuk lingkungan usaha yang mendukung sekaligus kolaboratif.

Pemangku kepentingan utama IIF adalah:

In conducting its business sustainably, IIF engages with various groups of stakeholders. It is vital for IIF to accommodate and mediate its numerous stakeholders' concerns, considerations, and needs, so that they can support the attainment of IIF's vision.

Each stakeholder has their own roles and objectives to pursue, and thus IIF works towards establishing a harmonious and synergic relationship with all stakeholders, to build a supportive and collaborative business environment.

IIF's key stakeholders are as follows:



IIF melibatkan para pemangku kepentingannya dalam berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya di sepanjang 2020.

IIF engaged its stakeholders through its various corporate Social and Environmental Responsibility programmes throughout 2020.

Pemangku Kepentingan dan Metode Pelibatan

Stakeholders and Engagement Methods

102-21, 102-40, 102-42, 102-43

Pemangku Kepentingan IIF IIF's Stakeholders	Dasar Penetapan Basis for Determination	Metode Pelibatan dan Frekuensinya Engagement Methods and Frequency	
Pemegang saham dan investor Shareholders and investors	Pengaruh dan ketergantungan Influence and dependency	<p>Pemegang Saham</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan rencana bisnis, aksi korporasi, dan struktur organisasi; - Penunjukan anggota Direksi; - Penetapan struktur tata kelola; - Keterwakilan melalui keanggotaan dalam Dewan Komisaris; dan - Pengaruh dalam pengambilan keputusan pembiayaan oleh Komite Investasi. <p>Investor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian struktur permodalan; - Pembatasan penerbitan utang dan ekuitas; dan - Penetapan proyek-proyek yang akan dibiayai. 	<p>Shareholders</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval of business plans, corporate actions, and organisational structure; - Appointment of BoD members; - Determination of governance structures; - Representation through membership in the BoC; and - Influence in the financing decision-making by the Investment Committee <p>Investors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlling of capital structure; - Limit-setting of debt and equity issuances; and - Determination of projects eligible for financing.
Karyawan Employees	Pengaruh, ketergantungan dan kewajiban Influence, dependency, and obligation	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Team Building</i> per Divisi dan per Direktorat (frekuensi tidak ditetapkan namun anggaran per tahun terbatas); - <i>Team Building</i> di tingkat Perseroan (1x setahun); - Buka Puasa Bersama (1x setahun); - Acara-acara Penting Perseroan, seperti <i>Investor Gathering</i>, Pencatatan Obligasi, dsb. (sesuai kebutuhan); - Acara Tutup Tahun (1x setahun); - Acara-acara Penting Karyawan, seperti pernikahan, kelahiran, sakit, meninggal, promosi, dsb. (sesuai kebutuhan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Team Building at each Division and each Directorate (frequency undetermined with predefined annual budget); - Team Building at Company-wide level (once a year); - Mass breakfasting (once a year); - Significant Corporate Events, such as investor Gathering, Bonds Listings, etc. (as needed); - Year-Closing event (once a year); - Employees' important events or situations, such as marriage, birth, sickness, death, promotion, etc. (as needed).
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Anggota Legislatif terkait Central Government, Regional Government, and related Members of the Legislative Branch	Pengaruh dan ketergantungan Influence and dependency	<p>Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan identifikasi proyek infrastruktur di pusat dan daerah; - Menghadiri <i>market sounding/sosialisasi</i> oleh pemerintah pusat/daerah; - Menghadiri dan memberikan input pada event METI serta berpartisipasi dalam acara Kementerian Keuangan. 	<p>Government</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastructure project coordination and identification at the central or regional governments; - Attendance in market sounding/dissemination events organised by central/regional government; - Attendance in and input in METI events and participation in the events of the Ministry of Finance.
Klien dan sponsor/pemrakarsa proyek, serta pemangku kepentingan terkait Clients and project sponsors/proponents, and associated stakeholders	Pengaruh dan ketergantungan Influence and dependency	<p>Klien/Sponsor/Pemrakarsa Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesediaan untuk dibiayai oleh IIF. - Kepatuhan terhadap perjanjian yang diatur oleh IIF dalam kesepakatan pinjaman (terkait hal-hal finansial, pelaporan, dan S&E); - Penetapan harga (suku bunga, biaya, dan semua hal komersial lainnya); - Kerja sama dalam penyediaan data; - Pemantauan perkembangan proyek dan penerapan aspek sosial dan lingkungan (sebagaimana diperlukan); - Tinjauan secara berkala atas proyek-proyek yang dibiayai (kunjungan rutin ke proyek); - Koordinasi atau konsultasi terkait proyek infrastruktur yang berlangsung (sebagaimana diperlukan). <p>Pemangku Kepentingan Terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesediaan untuk membangun/mengerjakan proyek berdasarkan standar K3L yang diatur oleh IIF; - Kesediaan untuk patuh pada perjanjian yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait (misalnya, perusahaan EPC, konsultan kerekayasaan/teknis, dll.). 	<p>Clients/Project Sponsors/Proponents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Willingness to be financed by IIF; - Compliance with the covenants set by IIF in the loan agreements (financial, reporting and S&E covenants); - Price-setting (interest rates, fees and all commercial matters); - Cooperation in providing data; - Monitoring of project development and implementation of social and environmental aspects (as needed); - Periodic reviews of financed projects i.e. routine site visit; - Coordination or consultation on ongoing infrastructure projects (as needed). <p>Associated Stakeholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Willingness to develop/construct projects according to HSE standard as set by IIF; - Willingness to comply with the covenants relevant to the associated stakeholders (e.g. EPC companies, engineering/technical consultants, etc.).

Pemangku Kepentingan IIF IIF's Stakeholders	Dasar Penetapan Basis for Determination	Metode Pelibatan dan Frekuensinya Engagement Methods and Frequency
Vendor Vendors	Pengaruh dan ketergantungan Influence and dependency	<p>IIF menggunakan jasa konsultan profesional untuk melakukan analisis kesenjangan, memberikan saran tentang dokumen yang dihasilkan oleh proyek, atau menawarkan saran profesional mengenai masalah yang lebih kompleks, dan/atau apabila informasi yang diberikan perusahaan proyek tidak cukup untuk menentukan sejauh mana klien mematuhi kebijakan IIF. Konsultan eksternal dipakai berdasarkan kasus per kasus. IIF mengarahkan dan mengawasi pekerjaan para konsultan untuk memenuhi praktik terbaik S&E berdasarkan SEP.</p> <p>Kontraktor dan Mitra Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan hubungan hak dan kewajiban masing-masing melalui kontrak kerja sama; - Koordinasi dan supervisi mengenai proyek infrastruktur, secara rutin sesuai dengan rencana kerja selama masa kontrak kerja sama. <p>Asosiasi di Bidang Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi pada acara yang diselenggarakan oleh asosiasi-asosiasi yang berfokus pada pengembangan Infrastruktur Indonesia; - Inisiatif <i>knowledge sharing</i> sebagai bentuk partisipasi aktif IIF dengan mitra kerja proyek infrastruktur.
Masyarakat Public	Pengaruh dan ketergantungan Influence and dependency	<p>Pada praktiknya IIF tidak berhubungan langsung dengan masyarakat karena dikelola melalui proyek, kendati beberapa proyek yang dibayai IIF bersinggungan langsung dengan kelompok masyarakat adat. Kelompok ini dan masyarakat pada umumnya dapat menyampaikan keluhan melalui GRM. Mekanisme ini spesifik dan dapat diakses oleh publik di seluruh wilayah di mana terdapat investasi IIF, dalam format dan bahasa yang mudah dimengerti. Melalui mekanisme ini, IIF akan menerima, mencatat, dan memberi tanggapan terhadap permintaan informasi, kekhawatiran, atau keluhan-keluhan yang disampaikan dari para pemangku kepentingan. Frekuensi tergantung kepada keluhan yang masuk di situs laman IIF.</p>
Media massa Mass media	Pengaruh dan ketergantungan Influence and dependency	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan melibatkan media massa untuk setiap peristiwa penting yang berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Media massa secara formal diundang ke acara tersebut untuk meliput langsung. Demi terjadinya akurasi dan aktualnya berita, IIF membuat rilis resmi untuk menjadi acuan media massa dalam menerbitkan berita; - Media massa dilibatkan melalui badan agensi agar berita terkait Perseroan aktual dan efektif mencapai target pembaca; - Jenis media massa yang terlibat dalam operasi Perseroan, mayoritas merupakan media daring yang terafiliasi dengan media cetak, dan umumnya dalam bidang bisnis dan ekonomi.

Dalam melaksanakan penerapan Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2020, IIF menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari kondisi internal dan eksternal yang berlaku dalam ruang lingkup pembiayaan infrastruktur. **102-44**

In implementing Sustainable Finance in 2020, IIF faced various challenges from both internal and external conditions encountered in the scope of infrastructure financing. **102-44**

Uraian mengenai tantangan keberlanjutan dan upaya tindak lanjut Perseroan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tantangan dan Upaya Penanganannya Challenges and Mitigation Efforts

Permasalahan yang Dihadapi Issues Faced	Upaya Tindak Lanjut Follow-Up Efforts
<ul style="list-style-type: none"> Kondisi perekonomian global yang tidak stabil, sehingga terus menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan sosial yang membatasi mobilitas masyarakat, berdampak negatif terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, menurunkan permintaan dan pemanfaatan infrastruktur oleh masyarakat, disrupti pada proyek-proyek infrastruktur baru atau yang sedang dibangun, dan realokasi anggaran pemerintah untuk menyalurkan stimulus fiskal sebagai program bantuan pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 yang berakibat langsung pada proyek yang dibiayai IIF yakni dalam bentuk penundaan fase konstruksi dan penundaan <i>Commercial Operation Date</i> (COD), redundansi staf, reduksi pada belanja modal dan operasional, dan isu S&E lainnya Komitmen IIF untuk masuk ke proyek-proyek infrastruktur yang berdampak sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang membutuhkan panduan dan dukungan dari pemerintah untuk memperluas ketersediaan proyek di pasar Kebijakan pemerintah atas proyek infrastruktur berbasis keberlanjutan yang memengaruhi imbal hasil proyek Ketersediaan anggaran pemerintah dalam belanja modal dan penjaminan, yang memengaruhi kelayakan ekonomi dari proyek-proyek infrastruktur berbasis keberlanjutan Keterbatasan teknologi keberlanjutan yang dapat dijangkau secara komersial oleh pemrakarsa proyek keberlanjutan Likuiditas sektor keuangan yang memengaruhi permodalan proyek-proyek infrastruktur berbasis keberlanjutan Unstable global economic conditions which put pressure on the domestic economy due to the Covid-19 pandemic; Covid-19 pandemic resulting in social distancing measures which restricted public mobility, adversely impacting the economy and job creation, reducing demand and public usage of infrastructure, disrupting new or under-construction infrastructure projects, and reallocating government budgets to fiscal stimulus to help Covid-19 pandemic relief; Covid-19 pandemic directly affecting IIF-financed projects in the form of delays in construction and postponement of Commercial Operation Date (COD), staff redundancies, reduced capital and operational expenditures, and other S&E-related issues; IIF's commitment to penetrate infrastructure projects with social impacts, such as education and health, requiring guidance and support from the government to increase project availability in the market; Government's policy regarding sustainability-based infrastructure projects that affects the return of such projects; Availability of government budget for capital expenditures and guarantees, which affects the economic feasibility of sustainability-based infrastructure projects; Limited extent of sustainable technologies that are commercially feasible for sustainability project proponents; Financial sector liquidity that affects the availability of capital for sustainability-based infrastructure projects 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sistem manajemen risiko Perseroan melalui penerapan beberapa langkah inisiatif, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Menjaga portofolio aset yang baik Pembaharuan batas kendali dan risk appetite Perbaikan internal proses Pengembangan Sumber Daya Manusia (<i>Capacity Building</i>) Berfokus pada <i>core business</i> Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur Nasional dengan memaksimalkan diferensiasi produk-produk pembiayaan Optimasi dan efisiensi beban usaha Pengembangan produk pembiayaan yang relevan dengan kondisi pandemi, antara lain <i>Pandemic Relief Facility</i> Diskusi dengan klien, penerapan <i>just-in-time assessment</i> terkait kesiapan protokol kesehatan Covid-19 di proyek yang sedang dibangun, dan kajian kepatuhan CAP Improvement to Company's risk management system through the implementation of several initiatives, including: <ul style="list-style-type: none"> Maintaining good quality asset portfolio Updating control limits and risk appetite Improving internal process Developing Human Resources (<i>Capacity Building</i>) Focus on core business as a national infrastructure financing company, by maximising the differentiation of our financing products Operational expense optimisation and efficiency Development of financing products relevant to the pandemic condition, such as Pandemic Relief Facility Discussion with clients, just-in-time assessment to measure the preparedness of Covid-19 health protocols in projects currently under construction, and review of CAP compliance.

The following table describes the challenges to sustainability and the Company's follow-up efforts.

Membangun Budaya Keberlanjutan

Fostering the Sustainability Culture

102-11

IIF dikenal karena pengalaman, pengetahuan yang mendalam, dan keterampilan di bidang pengembangan proyek infrastruktur yang layak secara komersial dan pembiayaan dengan aspek perlindungan sosial dan lingkungan yang unggul. Uji tuntas aspek sosial dan lingkungan (*Social & Environmental Due Diligence*—SEDD) yang dilakukan SED mengikuti alur kerja proyek dari awal, ulasan awal, uji tuntas dan persetujuan serta pasca persetujuan, pemantauan dan pengawasan. Oleh karena itu, proses bisnis tersebut melibatkan hubungan kerja yang erat antara tim investasi, tim manajemen risiko, dan SED.

IIF is widely known for its experience, extensive knowledge, and expertise in developing and financing commercially viable infrastructure projects with a strong aspect on social and environmental protection. Social & Environmental Due Diligence (SEDD) carried out by SED follows each project's workflow, from the beginning of the project to the pre-review, due diligence, and approval stages, as well as the post-approval, monitoring and supervision stages. Therefore, the entire business process involves a close working relationship between the investment team, the risk management team, and SED.

Kesadaran akan S&E

Setiap tahun SED mengadakan sesi *sharing* internal untuk anggota IIF dan sesi *sharing/pelatihan* eksternal kepada klien.

Sebagai sarana *sharing internal*, pada tahun 2020 SED bekerja sama dengan Departemen Corporate Secretary dan Departemen Sumber Daya Manusia menyelenggarakan Kompetisi Foto S&E IIF, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait S&E melalui foto-foto yang merefleksikan penerapan SEP.

S&E Awareness

SED annually conducts internal sharing sessions for IIF members and external sharing sessions/training to clients.

As an internal sharing, in 2020 the SED collaborated with the Department of Corporate Secretary and Human Resources Departments to hold the IIF S&E Photo Competition to raise awareness and understanding of S&E through photos that reflect the implementation of SEP.

Foto-foto Nominasi Teratas pada Kompetisi Foto S&E IIF
Top Nominated Photos at 2020 IIF S&E Photo Competition



Sementara itu, beberapa sesi *sharing* eksternal yang diselenggarakan SED di 2020 adalah sebagai berikut:

1. "NLC-ESS Training on Land Acquisition and Indigenous People" pada Februari 2020, diikuti oleh pelatihan virtual terkait Masyarakat Adat pada 20 September – 2 Oktober 2020.
2. "SEMS Maturity Questionnaire System Platform" pada 20 Juli 2020. Acara tersebut dihadiri perwakilan dari 9 proyek baru yang menandatangani *Facility Agreement* pada tahun 2019. Dalam sesi *sharing* tersebut, SED memberikan informasi rinci mengenai SEMS serta pedoman penggunaan sistem aplikasi.
3. "Sharing of S&E Risk and Impact in Renewable Energy Projects to Academic Groups and Scholars" pada September 2020.
4. Webinar "Penerapan Aspek Sosial dan Lingkungan dalam Pembangunan Jalan Tol: Studi Kasus" pada 13 November 2020, diikuti oleh sekitar 300 peserta dari berbagai latar belakang.
5. Webinar "Peran Serta IIF Menuju Pencapaian Transisi Energi 2050" pada 15 Desember 2020, melibatkan lebih dari 300 peserta.

IIF dan Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai persyaratan Pedoman Operasional IIF, uji tuntas upaya perlindungan perlu dilakukan untuk menilai potensi dampak sosial dan lingkungan serta risiko yang terkait dengan proyek dan kapasitasnya untuk manajemen sosial dan lingkungan.

Untuk mempermudah proses manajemen risiko, SED mengategorikan risiko proyek menjadi beberapa jenis: Kategori A, B, dan C, yang mengacu pada tingkat risiko dan dampak yang dihasilkan dari setiap proyek dan diadopsi dari Kategorisasi S&E berdasarkan praktik terbaik industri untuk Sosial dan Lingkungan.

Setelah proses klasifikasi ini, Penilaian Sosial dan Lingkungan diterapkan oleh penerapan SEDD, IEE (Pemeriksaan Lingkungan Awal), atau EIA/EMP, baik yang dikelola sendiri atau dengan bantuan daftar konsultan S&E yang cocok untuk menyaring semua proyek yang diusulkan dan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan instrumen perlindungan terhadap penerapan SEP IIF dalam proyek, sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil SEDD, Perseroan melakukan analisis kesenjangan dalam penerapan IIF SEP untuk menghasilkan beberapa mitigasi risiko dan rencana aksi di bawah skema pemantauan dengan menerapkan *Corrective Action Plan* (CAP) untuk mengatasi kesenjangan yang dijumpai pada uji tuntas proyek. Sistem komunikasi dan pelaporan yang intensif dengan developer (proyek) telah dibuat untuk memastikan penerapan SEMS. CAP tersebut biasanya dimasukkan sebagai bagian dari dokumentasi legal yang diwajibkan oleh IIF untuk semua proyek investasinya agar mematuhi SEP.

Meanwhile, in 2020 SED also conducted several sharing sessions to third parties, as follows:

1. "NLC-ESS Training on Land Acquisition and Indigenous People" in February 2020, followed by a virtual training on Indigenous Peoples in 20 September – 2 October 2020.
2. "SEMS Maturity Questionnaire System Platform" on 20 July 2020. The event was attended by representatives from 9 new projects that signed the Facility Agreement in 2019. During the sharing session, SED provided a detailed information on the SEMS as well as a guideline for using the application system.
3. "Sharing of S&E Risk and Impact in Renewable Energy Projects to Academic Groups and Scholars" in September 2020.
4. "Implementation of S&E Aspects in Toll Road: Case Study" webinar on 13 November 2020, involving around 300 participants from various backgrounds.
5. "IIF's Role in Advancing Towards the 2050 Energy Transition" on 15 December 2020, with more than 300 participants.

IIF and Sustainable Development

As required by IIF Operation Manual, a safeguard due diligence is needed to assess the potential social and environmental impacts and risks associated with a project and such project's capacity for social and environmental management.

To facilitate the risk management process, SED categorises projects into Category A, B, and C, based on the level of risk and impact in accordance with the S&E Categorisation and best practices in the industry.

Following this classification process, social and environmental assessment is carried out through SEDD, IEE (Initial Environmental Examination), or EIA/EMP, either self-administered or with the help of its approved list of S&E consultants in screening proposed projects and determining the appropriate mitigation measures and safeguards instruments for the implementation of IIF's SEP in projects as required.

Based on the result of the SEDD, the gaps in the implementation of IIF SEP are analyzed to formulate a series of risk mitigation and action plans under a monitoring scheme by implementing Corrective Action Plan (CAP) to fill the gaps found during project due diligence. A communication system and intensive reporting to (project) developers are established to ensure SEMS application. Such CAP is usually included as a part of the legal documentation in which IIF obliges all its investment projects to comply with the SEP.

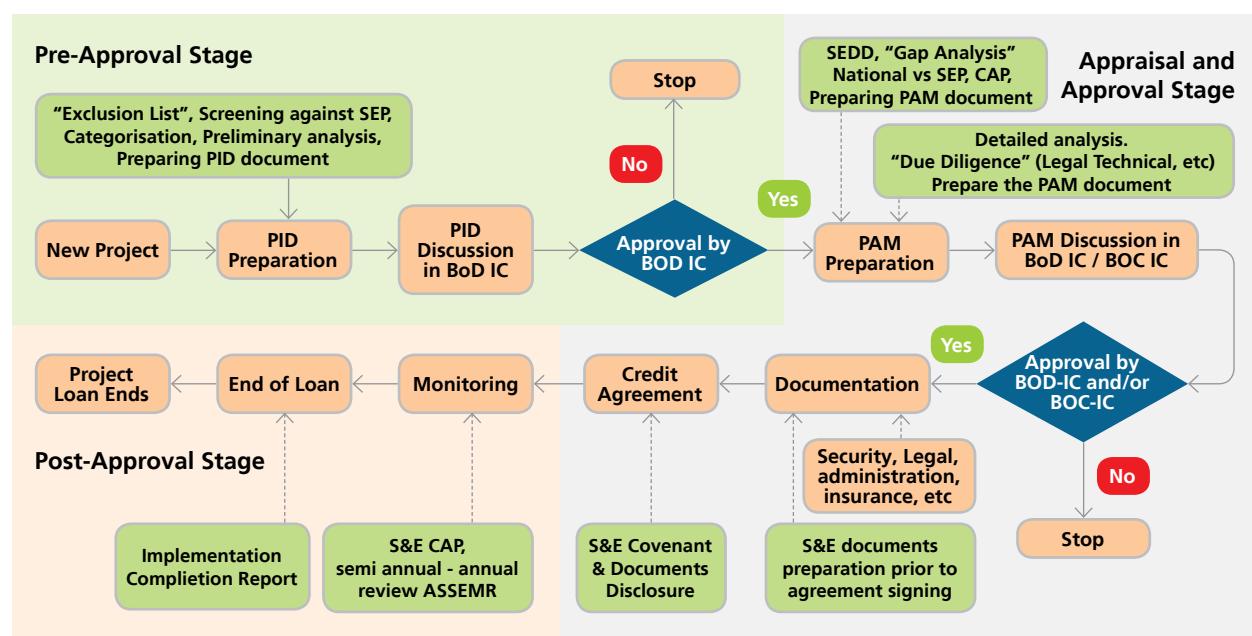
SED terus memandu dan memfasilitasi institusi peminjam untuk memenuhi prinsip-prinsip Sosial dan Lingkungan melalui pemantauan via CAP. Dalam melaksanakan analisis, IIF bekerja erat dengan klien untuk mencari solusi yang pantas (dapat dicapai dan dapat dilakukan). Selain itu, IIF juga memiliki tinjauan proyek reguler yang dilakukan oleh Direktorat Investasi.

Pertama, Tinjauan Semi-Tahunan atas kinerja IIF, khususnya untuk proyek *greenfield* atau proyek dalam tahap konstruksi, yang mencakup kinerja terkait risiko kredit dan kepatuhan terhadap persyaratan S&E; kedua, Tinjauan Tahunan untuk proyek COD yang terdiri dari kinerja terkait risiko kredit dan juga kepatuhan persyaratan S&E. Dengan melakukan kedua hal tersebut, baik pihak proyek dan klien dapat mengelola dan memantau risiko serta potensi dan dampaknya sementara pada saat yang sama melakukan perbaikan yang diperlukan seperti yang disyaratkan dalam dokumen CAP.

Secara keseluruhan, proses bisnis mengikuti alur kerja proyeknya dari awal, pra-penyaringan, uji tuntas dan persetujuan serta pasca persetujuan, pemantauan dan pengawasan. Proses ini melibatkan hubungan kerja yang erat antara bisnis atau investasi dan tim S&E, sebagai berikut:

Alur Kerja Bisnis dan S&E Business and S&E Workflow

102-21, 102-40, 102-42, 102-43



NOTES:



Abbreviations:

PID	: Project Information Document
PAM	: Project Appraisal Memorandum
SEDD	: Social Environmental Due Diligence
CAP	: Corrective Action Plan

ASSEMR: Annual Social Safeguard Environmental Monitoring Report
BOD-IC : Board of Directors - Investment Committee
BOC-IC : Board of Commissioners - Investment Committee

TINJAUAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance Review

Ikhtisar Kinerja dan Target Ekonomi dan Keuangan Berkelanjutan Summary of Economic and Sustainable Finance Performance and Targets

Keterangan Description	Hasil (Rp miliar) Results (Rp billion)			Sasaran 2020 (Rp miliar) 2020 Target (Rp billion)	Pencapaian 2020 2020 Achievement (%)
	2018	2019	2020		
Komitmen bersih Net commitments	10,987	12,770	14,098	18,187	78
Aset investasi Investment assets	8,512	8,776	11,445	13,542	85
Pendapatan Revenues	765	838	912	1,111	82
Laba bersih Net profit	-43	16	43	52	81
Nilai komitmen untuk proyek terkait Keuangan Berkelanjutan Commitments in Sustainable Finance-related projects	10,987	12,770	14,098	18,187	78
Aset investasi dalam proyek terkait Keuangan Berkelanjutan Investment assets in Sustainable Finance-related projects	8,512	8,776	11,445	13,542	85

Ikhtisar Kinerja Layanan Advisory Summary of Advisory Performance

Keterangan Description	Hasil Results		
	2018	2019	2020
Jumlah mandat yang aktif Number of active mandates	7 proyek / projects	9 proyek / projects	9 proyek / projects
Pendapatan Revenues	Rp12.41 miliar / billion	Rp8.06 miliar / billion	Rp9.39 miliar / billion
Jumlah mandat aktif yang terkait Keuangan Berkelanjutan Number of Sustainable Finance-related active mandates	6 proyek / projects	8 proyek / projects	8 proyek / projects
Pendapatan dari mandat aktif yang terkait Keuangan Berkelanjutan Revenue from Sustainability Finance-related active mandates	Rp11.93 miliar / billion	Rp8.06 miliar / billion	Rp9.39 miliar / billion
Proporsi pendapatan dari proyek terkait Keuangan Berkelanjutan Proportion of revenues from Sustainable Finance-related projects to total advisory revenues	96%	100%	100%

Komitmen Bersih Portofolio Investasi
Investment Portfolio Commitment (Net)

Keterangan Description	Hasil (% dari Total) Results (% of Total)			Sasaran 2020 (Rp miliar) 2020 Target (Rp billion)	2020 Achievement 2020 Achievement (%)
	2018	2019	2020		
Jalan Road	17.8	27.8	22.9	4,122.0	78.5
Telekomunikasi & Informatika Telecommunications & Informatics	9.0	13.2	14.0	1,873.1	105.0
Air Minum Drinking Water	13.2	10.0	11.2	1,992.3	79.0
Minyak dan Gas Oil and Gas	7.5	4.7	4.1	2,078.2	27.5
Ketenagalistrikan Electricity	27.9	23.0	25.3	3,604.6	99.1
Bandara Airport	13.8	10.5	8.6	1,255.5	96.2
Pelabuhan Port	6.9	5.5	4.7	939.0	71.1
Lainnya Others	3.9	5.3	5.7	647.1	123.9
Kereta Api dan Transportasi Publik Railway and Mass Transportation	-	-	-	350.0	0.0
Kawasan Industri Industrial Estate	-	-	3.5	450.0	111.1
Infrastruktur Pertanian Agricultural Infrastructure	-	-	-	210.0	0.0
Infrastruktur Sosial Social Infrastructure	-	-	-	665.0	0.0
Total	100%	100%	100%	18,186.8	-

Praktik Ketenagakerjaan

Employment Practices

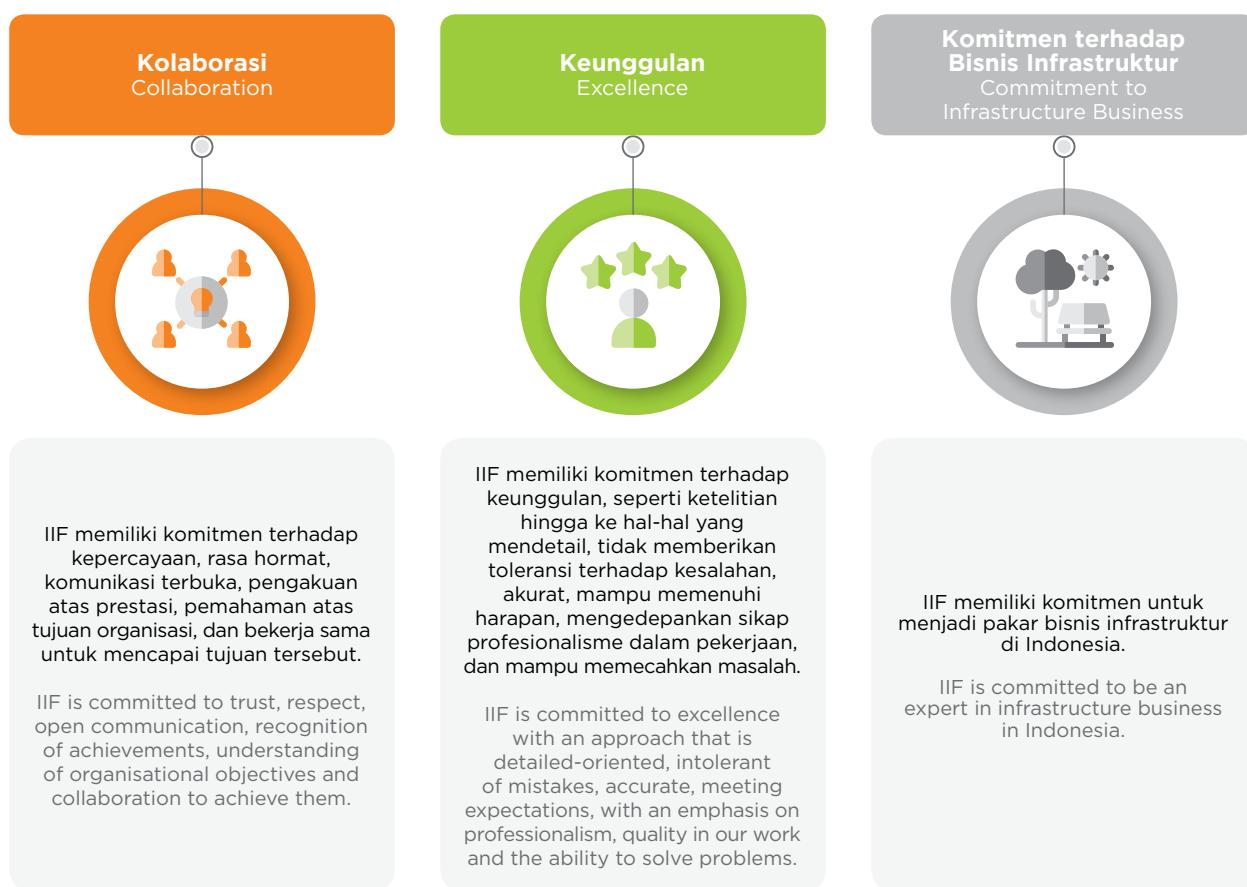
103-1, 103-2, 103-3: Ketenagakerjaan / Employment

Bagi IIF, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting yang berperan sebagai penggerak roda operasional bisnis di tengah tantangan dan dinamika bisnis. Dengan SDM yang kompeten, IIF memiliki kapabilitas untuk mencapai target bisnis serta mewujudkan visi dan misi Perseroan. IIF bertanggung jawab untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas sehingga mampu mempersiapkan diri menghadapi persaingan industri yang semakin dinamis dan kompetitif.

Perumusan kebijakan SDM IIF berlandaskan pada nilai-nilai inti IIF, yaitu: **102-16**

IIF regards Human Resources (HR) as an important asset that drives business operations amidst business challenges and dynamics. Competent HR enables IIF to achieve the determined business targets and realise its vision and mission. Therefore, IIF is responsible for building excellent and qualified HR that can support the Company in facing a dynamic and competitive industry.

The establishment of IIF HR policy is grounded in the main values of IIF, namely: **102-16**



Ketiga nilai di atas diharapkan dapat dimplementasikan secara nyata oleh setiap Insan IIF, baik pada saat bekerja dalam tim maupun saat berinteraksi dengan para mitra bisnis. Selain itu, IIF juga berkomitmen untuk selalu menunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam merangkul seluruh karyawan yang tercermin dalam komposisi karyawan IIF. Dengan memperkuat implementasi ketiga nilai inti IIF yang selaras dengan prinsip kesetaraan, IIF berharap dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan para mitra bisnis maupun pemangku kepentingan.

IIF continuously instills these three values in all individuals in IIF to be applied in a tangible way, both in internal teamwork and in interactions with business partners. IIF is also committed to uphold the principle of equality in embracing all employees, which is reflected in IIF's employee composition. By strengthening the implementation of three core values of IIF that are in line with the principle of equality, IIF strives to build a harmonious relationship with business partners and the stakeholders.

Pada tahun 2020, sebanyak 48% dari total keseluruhan karyawan IIF terdiri dari karyawan perempuan. Beberapa di antaranya menempati posisi strategis seperti manajer, manajer senior, dan direktur.

Badan Pengelola SDM

Divisi SDM bertugas mengelola SDM Perseroan secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan dan rencana Perseroan. Divisi SDM bertanggung jawab untuk hal-hal terkait kebutuhan rekrutmen, pengembangan, dan penilaian kinerja SDM di lingkungan kerja IIF.

Rekrutmen Karyawan

Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin pesat telah membuka peluang bisnis bagi perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan infrastruktur, termasuk IIF. Melalui keunggulan pada setiap produk pembiayaan dan *advisory*, IIF telah memiliki nilai lebih dibandingkan dengan institusi keuangan umum seperti perbankan.

Agar potensi bisnis dapat dimanfaatkan secara maksimal, IIF harus mengimbangi keunggulan produk dan layanan pembiayaan IIF dengan keandalan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk merekrut profesional muda yang berkompeten dan memiliki kapabilitas dalam menjawab tantangan bisnis melalui pendekatan dan karakteristik usaha yang dimiliki IIF.

Dalam melakukan proses perekrutan karyawan, IIF berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua kandidat, terlepas dari jenis kelamin, suku, rasa, agama, status sosial, hubungan politik, dan aspek lainnya yang rentan mengalami diskriminasi. Proses pengambilan keputusan IIF dilakukan atas dasar kompetensi, keahlian, serta latar belakang profesional. Komitmen ini tercermin pada komposisi karyawan laki-laki dan perempuan yang seimbang, dengan rasio rasio 52:48. Manajemen IIF juga memiliki seorang direktur perempuan.

Pesatnya pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 mendorong Perseroan untuk terus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. IIF juga menyadari pentingnya keberadaan profesional muda yang kompeten dan andal yang mampu menjawab tantangan masa depan dengan pendekatan IIF dan bisnis pembiayaan infrastruktur. Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan potensi SDM, IIF terus mengembangkan strategi manajemen SDM yang didasarkan pada program pengembangan profesional yaitu *Flexible Career Path* yang mencakup *Grade to Grade Promotion* dan *Open Career Path*. Melalui program tersebut, Perseroan dapat segera mengisi posisi-posisi yang kosong, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Perseroan dalam hal sumber daya manusia, serta memenuhi aspirasi karyawan untuk berkembang dan berkarier di Perseroan.

In 2020, 48% of total IIF employees were female employees. Several among them held strategic positions such as manager, senior manager, and director.

HR Management Body

The HR Division is responsible for managing the Company's HR in an integrated manner, in accordance with the Company's objectives and plans. The responsibilities of the HR Division include matters relating to recruitment, development, and performance assessment of HR within IIF.

Employee Recruitment

Rapid infrastructure development in Indonesia provided business opportunities for companies engaging in infrastructure financing, including IIF. With its excellence in each financing and advisory product, IIF possesses added value compared to general financial institutions such as banks.

To optimise business potentials, IIF shall balance its financing products and services excellence with HR reliability, both in terms of quantity and quality. Thus, the Company recruits competent young professionals who are capable to address the business challenges through IIF's business approach and characteristics.

IIF is committed to providing equal opportunity for employment to all, irrespective of their gender, ethnicity, race, religion, social status, political affinity, and other forms that are often subject to discrimination. IIF makes recruitment decisions based on the competence, expertise, and professional background of the candidates. This commitment is further reflected in the balanced composition of male and female employees, with a ratio of 52:48. IIF's management also has one female member of the BoD.

Intensive infrastructure development in 2020 encouraged the Company to prepare excellent human resources in terms of quality and quantity. IIF also realise the importance of competent and reliable young professionals who can address future challenges through IIF's approach and infrastructure financing business. Therefore, to optimise HR potential, IIF continues to develop HR management strategy based on professional development program or Flexible Career Path, which includes Grade to Grade Promotion and Open Career Path. Through this program, the Company can immediately fill vacant positions, increase the Company's competitiveness and sustainability in terms of human resources and fulfill the aspirations of employees to develop and have a career in the Company.

Dengan ketersediaan dan bantuan dari para praktisi dan profesional senior, IIF berharap bahwa proses regenerasi dapat dilakukan dengan baik untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan perkembangan Perseroan dalam memasarkan produk-produk pembiayaan infrastruktur.

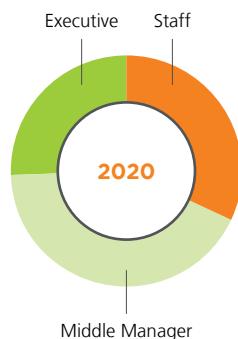
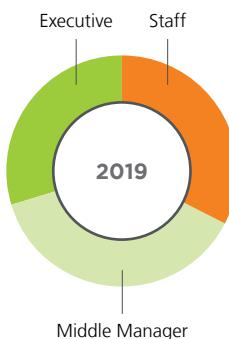
Profil Tenaga Kerja 102-8

Profil Karyawan berdasarkan Jenjang Kepangkatan Workforce Profile by Position Level

Keterangan Description	2019	2020
Pelaksana Staff	32 (33%)	34 (32%)
Manajer Madya Middle Manager	37 (38%)	45 (42%)
Eksekutif Executive	29 (30%)	27 (25%)
Total	98 (100%)	106 (100%)

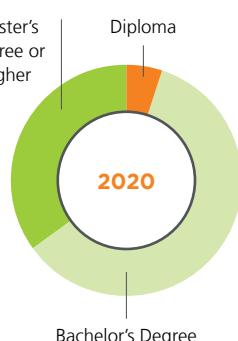
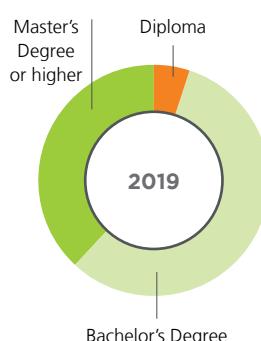
With the availability and assistance of practitioners and senior professionals, IIF hopes that the regeneration process can be carried out properly to accommodate the needs and development of the Company in marketing infrastructure financing products.

Workforce Profile 102-8



Profil Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan Workforce Profile by Level of Education

Keterangan Description	2019	2020
Diploma Diploma	5 (5%)	5 (5%)
Strata 1 Bachelor's Degree	56 (57%)	64 (60%)
Strata 2 atau lebih tinggi Master's Degree or higher	37 (38%)	37 (35%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



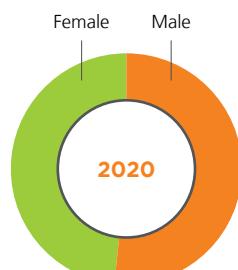
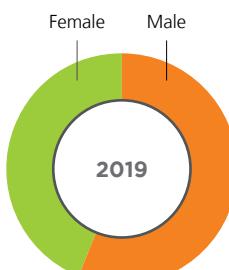
Profil Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian Workforce Profile by Employment Status

Keterangan Description	2019	2020
Kontrak Contract	10 (10%)	11 (10%)
Tetap Permanent	88 (90%)	95 (90%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



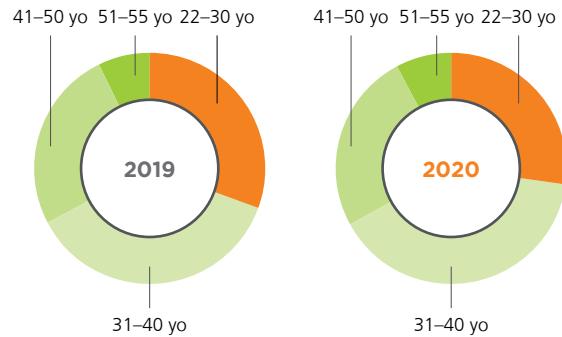
Profil Karyawan berdasarkan Gender Workforce Profile by Gender

Keterangan Description	2019	2020
Laki-laki Male	55 (56%)	55 (52%)
Perempuan Female	43 (44%)	51 (48%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



Profil Karyawan berdasarkan Usia Workforce Profile by Age

Keterangan Description	2019	2020
22–30 tahun 22–30 years old	30 (31%)	29 (27%)
31–40 tahun 31–40 years old	36 (37%)	42 (40%)
41–50 tahun 41–50 years old	25 (26%)	27 (25%)
51–55 tahun 51–55 years old	7 (7%)	8 (8%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



Distribusi Gender dalam Karyawan IIF Gender Distribution in IIF's Workforce

Position Level			
Gender	Executive	Middle Manager	Staff
Female	7	24	20
Male	20	21	14
Total	27	45	34

Employment Status		
Gender	Permanent	Contract
Female	48	3
Male	47	8
Total	95	11

Employment Type		
Gender	Full Time	Part Time
Female	51	0
Male	55	0
Total	106	0

		Age Group			
Gender		22-30	31-40	41-50	51-54
	Female	18	18	13	2
	Male	11	24	14	6
Total		27	42	27	8

		Education		
Gender		Diploma	Bachelor's	Master's or Higher
	Female	2	34	15
	Male	3	30	22
Total		5	64	37

103-1, 103-2, 103-3: Pelatihan dan Pendidikan

404-1

103-1, 103-2, 103-3: Training and Education

404-1

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

IIF menyadari pentingnya membekali SDM Perseroan dengan kemampuan dan kompetensi, baik secara teknis maupun non-teknis. Dengan mengikutsertakan para karyawan ke berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka, Perseroan optimis akan menghasilkan SDM yang profesional, berkepribadian unggul, dan berjiwa pemimpin.

Sejak Maret 2020, IIF mengalihkan segala bentuk pelatihan menjadi pelatihan berbasis online seperti webinar atau pelatihan virtual. IIF menerapkan kebijakan untuk memasukkan waktu pelatihan *online* tersebut ke dalam jumlah jam pelatihan. Rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun adalah 64,7 jam kerja pada tahun 2020, sesuai target jam pelatihan sebanyak 64 jam per karyawan per tahun.

Employee Education and Training

IIF realised the importance of providing its HR with technical and non-technical capabilities and competency. By involving its employees in various education and training activities according to their needs, the Company is optimistic in building professional HR with superior personalities and leadership skills.

Since March 2020, IIF has switched all forms of training to online-based training such as webinars or virtual training. IIF establishes a policy to include the virtual training time into the tally of training hours. The average training duration in 2020 was 64.7 hours per year, meeting the required target of 64 training hours per employee per year.

Pengembangan Kompetensi di 2020

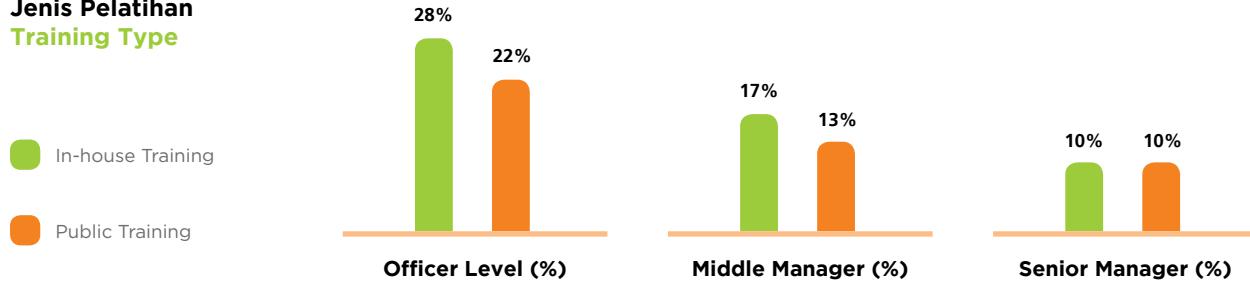
Competence Development in 2020

404-2

Keterangan Description	Jam Pelatihan berdasarkan Tingkat Jabatan Training Hours by Level						Total
	Officer	%	Middle Manager	%	Senior Manager (ex. ExComm)	%	
Total Jam Pelatihan Total Training Hours	3,419	50	2,053	30	1,382	20	6,854
Jenis Pelatihan Training Type							
Internal In-house Training	1,906	28	1,195	17	664	10	3,765
Umum Public Training	1,513	22	85	13	718	10	3,089
Tujuan Pelatihan Training Objective							
Soft Skill	1,416	46	679	22	356	11	2,441
Technical Skill	2,003	29	1,356	31	1,036	15	4,395

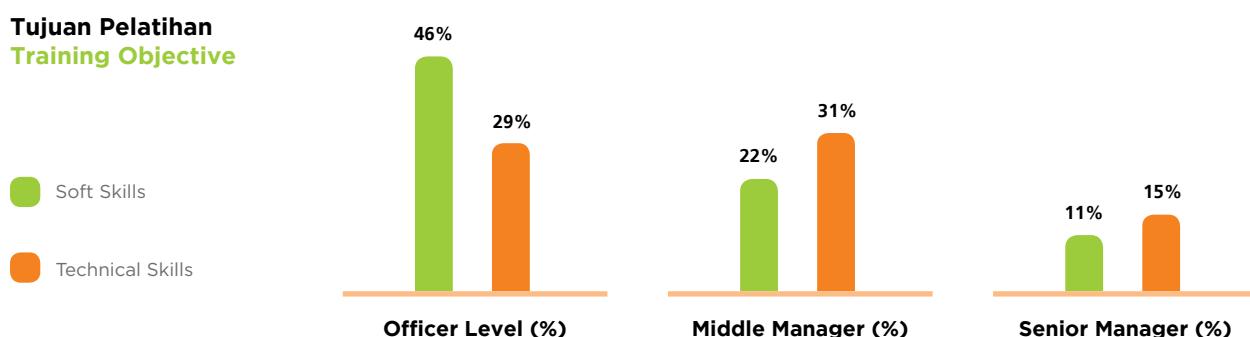
Jenis Pelatihan

Training Type



Tujuan Pelatihan

Training Objective



Total Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan di 2020
Total Employee Competence Development Expenses in 2020

Rp615,823,002

Manajemen Kinerja

IIF senantiasa melakukan pemantauan kinerja karyawan untuk memastikan tercapainya visi dan misi Perseroan. Divisi SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM telah melakukan program manajemen kinerja yang dikembangkan menggunakan modul penilaian berbasis *Key Performance Indicators (KPI)*.

Program Retensi

Untuk mendukung kesejahteraan karyawan sekaligus mempertahankan loyalitas karyawan terhadap Perseroan, IIF menyediakan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif dan proporsional bagi setiap Insan IIF, dengan mempertimbangkan besaran yang berlaku secara umum.

IIF berupaya menekan angka perputaran karyawan melalui penyusunan program-program yang sesuai kebutuhan dan efektif. Sejumlah inisiatif tersebut terus dijalankan dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan.

Komunikasi Karyawan

Secara berkala, IIF mengadakan berbagai forum yang dapat dihadiri oleh seluruh karyawan dari berbagai jenjang dan departemen sebagai ruang untuk saling bersilaturahmi dan membangun kerja sama yang baik antar departemen. Forum ini juga dapat digunakan sebagai wadah bagi para karyawan yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu-isu Perseroan.

Pada tahun 2020, IIF mengadakan pertemuan virtual sebanyak tujuh kali dengan seluruh karyawan, dengan beragam agenda pembahasan.

Remunerasi Karyawan 401-2

Dalam rangka meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan yang menjadi elemen penting bagi Perseroan dalam mencapai target bisnis yang lebih baik di masa depan, IIF telah menyediakan program kesejahteraan karyawan, yang berlaku bagi seluruh karyawan tetap IIF, dan terdiri dari:

a. Gaji dan Bonus Kinerja

Struktur gaji dan bonus kinerja yang diterima karyawan didasarkan pada tingkat atau pangkat masing-masing karyawan, ditambah dengan prestasi yang telah dicapai serta kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.

b. Fasilitas dan Tunjangan

Selain gaji pokok, tunjangan komunikasi dan transportasi, IIF juga memberikan fasilitas dan tunjangan lainnya, berupa:

Performance Management

IIF continuously monitors employee performance to ensure the achievement of the Company's vision and mission. The HR Division that is responsible for HR management has developed and implemented performance management program based on Key Performance Indicators (KPI).

Retention Program

To support employee welfare and maintain their loyalty to the Company, IIF provides competitive and proportional compensation and benefits package for each IIF personnel by taking account of the generally applicable amount.

IIF strives to reduce the employee turnover rate by formulating programmes that are effectively aligned with employees' needs. These initiatives are maintained and will be developed further in the coming years in line with the Company's needs and condition.

Employee Communication

IIF periodically organises forum that can be attended by all employees from various levels and departments to socialise and foster cooperation between departments. Such forum also serves to facilitate employees who wish to voice their aspiration related to Company issues.

In 2020, IIF organised seven virtual meetings involving all employees to discuss various agendas.

Employee Remuneration 401-2

To Improve performance, productivity, and loyalty of employees as an important element for the Company in achieving higher business targets in the future, IIF provides employee welfare program, which is valid for all permanent employees of IIF, and consists of:

a. Salary and Performance Bonus

Structure of salary and performance bonus for employees is based on the grading or position of each employee in addition to their achievements and contributions to the Company.

b. Facilities and Allowances

In addition to basic salary, communication allowance, and transportation allowance, the Company also provides other facilities and allowances, namely:

- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya; dan
- Tunjangan keanggotaan olahraga.

IIF mempekerjakan 6 karyawan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan kepada mereka diberikan tunjangan yang sama dengan tunjangan untuk karyawan tetap.

Dalam menentukan kebijakan remunerasi, IIF mematuhi peraturan setempat terkait ketetapan upah minimum regional (UMR), yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

UMP DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp4.267.349,-. Di tahun 2020, upah terendah yang diterima oleh pegawai laki-laki di tingkatan paling bawah di IIF adalah sebesar Rp6.800.000,- (159,3% dari UMP) sementara upah terendah yang diterima oleh pegawai perempuan adalah sebesar Rp6.300.000,- (147,6% dari UMP). **202-1**

103-1, 103-2, 103-3: Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman

Perseroan memandang bahwa kesehatan dan keselamatan kerja sebagai faktor terpenting yang mampu menunjang tingkat kesuksesan operasional dan aktivitas usaha Perseroan, baik di lokasi proyek maupun di kantor pusat. Hal tersebut menjadi fokus Perseroan karena keselamatan dan kesehatan kerja berperan besar dalam mempertahankan eksistensi dan kinerja bisnis Perseroan.

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di IIF berlaku untuk seluruh (100%) karyawannya. **403-8**

Untuk prosedur keselamatan kerja di kantor pusat di mana mayoritas tenaga kerja Perseroan bekerja, Perseroan menyediakan sarana dan keselamatan kerja sesuai dengan prosedur yang dimiliki pihak pengelola Gedung lokasi kantor pusat IIF. Sementara untuk saat-saat di mana karyawan melakukan kunjungan lapangan, sarana dan keselamatan kerja mengikuti prosedur dari operator proyek. **403-6**

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan IIF membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 (TGTC-19) untuk memenuhi kebutuhan akan pemenuhan Rencana Kontinuitas Bisnis IFF. TGTC-19 diwakili oleh karyawan dari berbagai divisi yang berbeda. Selanjutnya, Perseroan melalui TGTC-19 juga mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan aktivitas operasional dalam bentuk

- Social Security Program;
- Health Security Program;
- Religious Holiday Allowance Raya ("THR") given annually in accordance with the applicable regulations;
- Reimbursement for outpatient and inpatient treatments for employees and their family; and
- Sports membership allowance.

IIF has 6 employees on a fixed-time work agreement (PKWT), and they receive the same benefits as those provided to permanent employees.

In formulating its remuneration policy, IIF complies with the local regulations regarding the regional minimum wage (UMR), which in IIF's case is the Provincial Minimum Wage (UMP) in DKI Jakarta.

The UMP in DKI Jakarta in 2020 was Rp4,267,349. In 2020, the lowest wage received by male employees on the lowest level at IIF was Rp6,800,000 (159.3% of UMP), while the lowest wage received by female employees was Rp6,300,000 (147.6% of UMP). **202-1**

103-1, 103-2, 103-3: Occupational Health and Safety

Decent and Safe Work Environment

The Company believes that occupational health and safety are a vital factor in supporting the level of operational success and business activities of the Company, both at the project site and at the head office. This has become the Company's focus as occupational health and safety play a major role in maintaining the existence and performance of the Company's business.

IIF's occupational health and safety management system covers all (100%) of its employees. **403-8**

In terms of work safety procedures at the head office where the majority of the Company's workforce carries out their activities, the Company provides work facilities and safety in accordance with procedures established by the building management where IIF's head office is located. Meanwhile, during site visits, employees shall follow the work safety procedures implemented by the project operator. **403-6**

The Covid-19 pandemic in 2020 resulted in IIF's decision to enact Covid-19 Task Force Team (TGTC-19) as a response to the need to further elaborate on IIF's Business Continuity Plan. Employees from different divisions were represented in the TGTC-19. Furthermore, the Company through TGTC-19 also issued a policy related to limiting operational activities in the form of implementing 100% work from

pemberlakuan 100% *work from home* (WFH) atau 50% *work from office* (WFO) tergantung keadaan yang dievaluasi setiap 2 minggu sekali. Selain itu, Perseroan juga melakukan aktivitas pencegahan serta penerapan protokol kesehatan secara ketat bagi karyawan yang bekerja di kantor dengan cara menyediakan cairan pembersih tangan dan masker, pengecekan suhu, pengalihan pertemuan fisik menjadi virtual, serta melakukan proses disinfeksi kantor secara rutin setiap minggunya.

Selain dari fasilitas kesehatan yang telah diberikan, mulai tahun 2020 Perseroan memberikan kebijakan khusus terkait penggantian biaya uji usap PCR, *rapid test*, pembelian vitamin, serta taksi agar karyawan dapat menghindari transportasi umum selama pandemi.

Di 2020, tidak ada karyawan IIF yang mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. **403-9, 403-10**

Peraturan Perusahaan

Seluruh hak dan kewajiban karyawan IIF tercantum dalam Peraturan Perusahaan, yang mengikat seluruh karyawan IIF. **102-41**

Dalam Peraturan Perusahaan tidak terdapat klausul khusus yang mengatur adanya periode minimum untuk memberitahukan kepada karyawan mengenai perubahan signifikan dalam kegiatan operasional Perusahaan. **402-1**

Mekanisme Pengaduan Ketenagakerjaan

Terkait dengan masalah ketenagakerjaan yang mungkin dijumpai di kalangan karyawan, Perusahaan menyediakan sarana pengaduan melalui mekanisme yang meliputi sistem penilaian *Performance Appraisal*. Sistem ini mencakup *direct coaching* dan mekanisme *whistleblowing* yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Mekanisme *whistleblowing* Perseroan dibentuk untuk menyediakan jalur bagi karyawan yang ingin melaporkan dugaan penipuan/perbuatan melanggar hukum. Mekanisme *whistleblowing* Perseroan diatur dalam *Operation Manual* (OM) yang mengatur Pencegahan Fraud dan Anti-Korupsi serta *Policy Implementation Procedure* (PIP) yang mengatur Pencegahan Fraud dan Anti-Korupsi. Setiap empat bulan sekali, manajemen mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk membahas strategi atau solusi dari masalah-masalah yang ada secara *top-down*.

home (WFH) or 50% work from office (WFO) depending on the circumstances which is evaluated every 2 weeks. In addition, the Company also carried out preventive actions as well as implementing strict health protocols for employees who work from office by providing hand sanitisers and masks, temperature checks, shifting physical meetings to virtual ones, and weekly office disinfection.

On top of the existing medical facility provided, starting in 2020 the Company also gives special policy on reimbursement for expenses related to PCR swab tests, rapid tests, purchase of vitamins, and taxi vouchers to allow employees avoid public transportation during the pandemic.

In 2020, none of IIF employees suffered work-related injuries and/or ill health. **403-9, 403-10**

Company Regulations

All the rights and obligations of IIF employees are stipulated in the Company Regulations, which bind all employees of IIF. **102-41**

In the Company Regulations, there are no specific clauses stating the minimum notice period for employees in the event of any significant changes in operations. **402-1**

Grievances Mechanism for Manpower Issues

For any employment issues that the employees might have, the Company provides a complaint reporting channel via a mechanism that covers a Performance Appraisal assessment system. This includes direct coaching and a whistleblowing mechanism under the Company Regulations.

The Company's whistleblowing mechanism was established to provide a channel for employees who would like to report suspected fraud/misconducts. The Company's whistleblowing mechanism is regulated in the Operation Manual (OM) on Fraud Prevention and Anti-Corruption and Policy Implementation Procedures (PIP) on Fraud Prevention and Anti-Corruption. In addition, the Company management also holds regular meetings every four months with employees to discuss strategies or solutions to existing problems in a top-down manner.

Peninjauan Kinerja 404-3

IIF secara rutin melakukan peninjauan kinerja dan pengembangan karier bagi karyawannya. Di 2020, peninjauan tersebut berlaku untuk semua karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan, dan sebagai hasilnya, 12 karyawan telah dipromosikan.

Cuti Punya Anak 401-3

Karyawan IIF berhak mendapatkan cuti melahirkan sesuai peraturan pemerintah. Di 2020, sebanyak 7 karyawan mengambil cuti melahirkan.

Gender Karyawan Employee Gender	Jumlah Karyawan yang Mengambil Cuti Punya Anak di 2020 Number of Employees Taking Parental Leave in 2020	Jumlah Karyawan yang Kembali Bekerja Setelahnya Number of Employees Returning to Work after Taking Parental Leave	Jumlah Karyawan yang Mengambil Cuti Punya Anak di 2019 Number of Employees Taking Parental Leave in 2019	Jumlah Karyawan yang Kembali Bekerja Setelahnya Number of Employees Returning to Work after Taking Parental Leave	Tingkat Retensi Retention Rate
Laki-laki Male	6	6	2	2	100%
Perempuan Female	1	1	3	3	100%
Total	7	7	5	5	100%

Performance Review 404-3

IIF regularly conducts performance and career development reviews for its employees. In 2020, the review was applied to all employees who have completed their probationary period, and as a result, 12 employees were promoted.

Parental Leave 401-3

IIF's employees are entitled to parental/maternity leave as stipulated in the government regulations. In 2020, 7 employees took the maternity leave.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Community Empowerment

103-1, 103-2, 103-3: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

203-2

Dampak dan Risiko Sosial yang Penting terhadap Masyarakat Sekitar

Dampak-dampak sosial dari IIF pada umumnya berupa dampak positif tidak langsung yang bersumber dari kehadiran fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh klien-klien proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF.

Kegiatan operasional IIF sendiri tidak menimbulkan dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat di sekitar wilayah kantornya. Bagaimanapun juga, IIF turut membantu pengembangan masyarakat setempat dan di Indonesia melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya.

103-1, 103-2, 103-3: Indirect Economic Impacts

203-2

Key Social Impacts and Risks on Surrounding Communities

IIF's social impacts are generally positive and indirect, as they are brought about by the presence of infrastructure facilities built by the infrastructure projects financed by IIF.

IIF's own operational activities do not create any significant social impacts on the communities surrounding its office area. However, IIF continues to assist the development of the communities in its surroundings as well as in Indonesia as a whole through the community development programmes it engages in.

Inisiatif Pemberdayaan Masyarakat IIF Tahun 2020

Di tahun 2020, IIF secara langsung melakukan dan terlibat dalam sejumlah inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah donasi yang diberikan oleh IIF kepada penerima manfaat mencakup:

- kepada karyawan yang terdampak oleh banjir di Jakarta di bulan Januari;
- kepada Human Initiative untuk mengatasi penyebaran Covid-19, bekerja sama dengan SMV lainnya, di bulan April;
- kepada Yayasan Sayap Ibu Bintaro (panti asuhan untuk masyarakat kurang mampu) dan Yayasan Menemani (pemberdayaan kaum muda melalui bantuan pendidikan dan kesehatan), melalui program IIF Cares and Shares 2020, di bulan Mei;
- kepada Palang Merah Indonesia untuk korban banjir di Luwu Utara, di bulan Juli;
- kepada masyarakat sekitar dalam bentuk hewan kurban, bekerja sama dengan SMV lainnya di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, di bulan Juli; serta
- kepada acara UMKM Naik Kelas Golf Tournament 2020, di bulan Desember.

Dengan mempertimbangkan kondisi pembatasan mobilitas di era pandemi, IIF di bulan Juni (bersama SMV lainnya di bawah koordinasi SMI) mengundang Tompi untuk tampil dalam Konser Virtual sekaligus penggalangan dana, berjudul "Optimis Lewat Nada".

Mekanisme Penanganan Keluhan

IIF membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism*—GRM) di 2017, yang mulai diterapkan di 2018. Melalui GRM, pemangku kepentingan proyek IIF dapat langsung menghubungi IIF untuk menyampaikan keluhan mereka.

GRM dapat diakses melalui situs web IIF dan semua keluhan yang diterima dicatat dalam buku catatan "SED Grievance", yang diperbarui secara berkala. Setiap tahun catatan tersebut dilaporkan ke IIF sebagai bagian dari Laporan Pengamanan Sosial dan Pemantauan Lingkungan Tahunan, lengkap dengan status penyelesaiannya. Mekanisme ini memastikan bahwa proyek di semua tahapan menjaga hubungan baik dengan semua pemangku kepentingannya, terutama dengan masyarakat sekitar yang terdampak oleh proyek. Di 2020, 15 proyek menerima 384 pengajuan keluhan dari kelompok masyarakat yang terdampak. Per akhir tahun 2020, 95% dari keluhan ini telah diselesaikan.

Semua Anggota Tim SED juga bertanggung jawab untuk menangani keluhan yang diterima, termasuk untuk melakukan investigasi, menentukan tindak lanjut yang diperlukan, dan melaporkan hasilnya.

IIF's Community Empowerment Initiatives in 2020

In 2020, IIF directly undertook and was involved in a number of community empowerment initiatives.

IIF provided some donations to various beneficiaries, including:

- to employees affected by the flood in Jakarta in January;
- to Human Initiative to combat the spread of Covid-19, in collaboration with other SMVs, in April;
- to Sayap Ibu Bintaro Foundation (an orphanage for underprivileged children) and Menemani Foundation (which is empowering youth through education and health assistance), through the IIF Cares and Shares 2020 programme, in May;
- to the Indonesian Red Cross for flood victims in North Luwu, in July;
- to the surrounding community in the form of sacrificial animals, in collaboration with other SMVs under the coordination of the Ministry of Finance, in July; and
- to the event titled UMKM Naik Kelas Golf Tournament 2020, in December.

Taking into account the mobility restrictions during the pandemic era, IIF in June (together with other SMVs under the coordination of SMI) invited Tompi to appear in a virtual concert-cum-fundraiser titled "Optimis Lewat Nada".

Grievance Redress Mechanism

IIF established the Grievance Redress Mechanism (GRM) in 2017 and began its implementation in 2018. The GRM is used to channel IIF's projects' stakeholders to directly contact IIF to submit their grievances.

GRM is accessible on IIF's website and all the grievances received are recorded in the SED Grievance logbook, updated regularly. Annually, the record is submitted to IIF as part of the Annual Social Safeguard and Environmental Monitoring Report, complete with the resolution status. This mechanism ensures that projects in all phases maintain their good relationship with their stakeholders, especially with affected surrounding communities. In 2020, 15 projects received a total of 384 submissions of grievances from affected communities. By the end of 2020, 95% of these grievances had been resolved.

All SED Team Members are also responsible to handle the received grievances, including to conduct investigation, determine necessary responsive actions, and disclose the outcome.

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Environmental Management and Conservation

Penggunaan Material Ramah Lingkungan

301-1

Selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020, IIF menerapkan kebijakan kerja dari rumah (*work from home*—WFH) dan proses dokumentasi tanpa kertas. Dengan demikian, konsumsi kertas dapat ditekan secara drastis hingga turun 80% (150 rim kertas di 2020 dibandingkan 745 rim di 2019). Pembelian tinta printer juga turun 78% (total Rp46,1 juta di 2020 dibandingkan Rp163,4 juta di 2019).

IIF berupaya menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan operasional, seperti galon air isi ulang dan kertas bekas untuk keperluan pencetakan internal dan draf kerja. IIF juga menghindari air kemasan sekali pakai untuk para tamu dan keperluan internal, dan menggantinya dengan botol air berbahan gelas yang dapat dikembalikan ke penjualnya. IIF juga menyediakan botol air yang dapat digunakan kembali untuk seluruh karyawan.

103-1, 103-2, 103-3: Energi

103-1, 103-2, 103-3: Emisi

302-1, 302-3, 302-4

Penggunaan Energi

Sejalan dengan SEP IIF, seluruh aktivitas operasional di kantor IIF diupayakan untuk memanfaatkan energi secara seoptimal dan seefisien mungkin. IIF terus mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kinerja pemanfaatan energi dan pengurangan emisinya, agar operasinya secara keseluruhan semakin ramah lingkungan. Upaya ini dievaluasi secara berkala oleh divisi-divisi terkait, yang berkoordinasi langsung dengan Direksi.

Penggunaan energi listrik turun sebesar 17% sepanjang periode pelaporan, yakni dari 262.232 kWh di 2019 menjadi 217.645 kWh di 2020. Hal ini didorong oleh pembatasan kegiatan operasional di kantor selama pandemi. Bergantung pada keadaan yang ditinjau oleh Tim Satgas Covid-19 IIF dan Manajemen, IIF menerapkan salah satu dari dua skema, yakni 100% WFH atau 50% bekerja di kantor. Penggunaan energi listrik dihitung dengan mengakumulasikan jumlah pemakaian listrik dalam satuan kWh yang tertera pada tagihan listrik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

Use of Environmentally-Friendly Materials

301-1

During the Covid-19 pandemic in 2020, IIF implemented work from home (WFH) arrangement and paperless documentation. This resulted in paper usage to decrease considerably by 80% (150 reams in 2020 versus 745 reams in 2019). Purchases of printer ink also decreased by 78% (total Rp46.1 million in 2020, compared to Rp163.4 million in 2019).

IIF strives to use materials that can be recycled and are environmentally friendly in every operational activity. These materials include refillable water gallons and used paper for internal purpose and working drafts printing. IIF has also been avoiding single-use bottled water for guests and internal purposes, and replaced it with glass water bottles, which can be returned to the vendor. IIF also provides all employees with reusable water tumblers.

103-1, 103-2, 103-3: Energy

103-1, 103-2, 103-3: Emissions

302-1, 302-3, 302-4

Energy Use

In line with IIF SEP, all operational activities at IIF's office are conducted such that energy is used in the most optimal and efficient manner. IIF continues to develop various initiatives to improve its energy usage and emission reduction performance, to render its entire operations more environmentally friendly. These initiatives are regularly evaluated by the relevant divisions, under the direct coordination of the BoD.

Electrical energy usage decreased by 17% throughout the reporting period, from 262,232 kWh recorded in 2019 to 217,645 kWh in 2020. This was primarily driven by the limited operations in the office during the pandemic. Depending on the circumstances reviewed by IIF's Covid-19 Task Force Team and the Management, IIF implemented either the 100% WFH or 50% work from office scheme. IIF's electrical energy usage is calculated by accumulating the amount of electricity consumption, measured in kWh, as stated in the electricity bills from January to December 2020.

IIF juga mengonsumsi energi dari bahan bakar fosil untuk mengoperasikan kendaraan untuk keperluan operasional. Di 2020, total konsumsi bahan bakar IIF adalah sebesar Rp143.421.468, 35.29% lebih rendah dibandingkan Rp221.642.130 yang dikeluarkan pada tahun 2019. Konsumsi bahan bakar selama pandemi terutama terkait aktivitas untuk mengantarkan dokumen kepada karyawan atau manajemen setiap hari, terutama ketika tanda tangan basah diperlukan, sementara itu sebelum masa pandemi, kendaraan operasional lebih sering digunakan oleh karyawan untuk kunjungan proyek dan rapat di luar kantor. Konsumsi bahan bakar dihitung dengan mengakumulasi total konsumsi bahan bakar dalam satuan liter yang tercantum dalam tagihan pembelian bahan bakar periode Januari–Desember 2020.

103-1, 103-2, 103-3: Keanekaragaman Hayati/Biodiversity
304-1, 304-2

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Pelestarian keanekaragaman hayati merupakan salah satu hal penting dalam strategi keberlanjutan IIF, sejalan dengan Prinsip Sosial & Lingkungan 6: "Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam".

Kegiatan operasional IIF seluruhnya berlangsung di Kantor Pusat di Jakarta. Oleh karena itu, tidak ada operasi IIF yang terletak di dekat atau berada di daerah konservasi yang dilindungi pemerintah ataupun daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, kegiatan bisnis IIF tidak berdampak secara langsung terhadap keanekaragaman hayati.

Terlebih lagi, IIF sangat memperhatikan aspek biodiversitas dari sebuah proyek yang akan dibiayai, dan memastikan dukungan studi yang memadai serta menyusun rencana mitigasi apabila sebuah proyek berada dalam kawasan lindung.

Akan tetapi, beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF mungkin membutuhkan lahan yang luas, misalnya proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan infrastruktur linier seperti jalan dan rel kereta api. Dampak fisik dari proyek PLTA mungkin tidak dirasakan secara langsung di daratan. Akan tetapi, proyek tersebut memengaruhi kondisi perairan, baik di daerah hulu maupun hilir. Sementara itu, jalan dapat melintasi sejumlah ekosistem dan dapat mengubah atau mengganggu habitat tertentu, sehingga meningkatkan risiko munculnya substansi tertentu yang tidak alamiah atau spesies asing yang invasif (misalnya hama dan organisme patogen). Konversi ekosistem juga dapat mencuatkan dan mengganggu habitat yang ada, dan oleh karena itu memperkecil wilayah jelajah dari sejumlah spesies tertentu.

IIF also consumes energy from fossil fuels to operate vehicles used for operational purposes. In 2020, total fuel consumption by IIF was equivalent to Rp143,421,468, a decrease of 35.29% from Rp221,642,130 disbursed in 2019. The fuel consumption during the pandemic was mainly related to document deliveries by employees and management on a daily basis, particularly when wet signatures were needed, while prior to the pandemic, operational vehicles had been used by employees for project visits and meetings outside of the office. IIF's fuel consumption is calculated by accumulating the total fuel consumption, measured in litre, as stated in the fuel purchase bills for the period of January to December 2020.

103-1, 103-2, 103-3: Keanekaragaman Hayati/Biodiversity
304-1, 304-2

Biodiversity Conservation

Biodiversity conservation plays an important role in IIF's sustainability strategy, in line with Social & Environmental Principle 6: "Biodiversity Conservation and Natural Resource Management".

All of IIF's operational activities take place at its Head Office in Jakarta. None of IIF's operations are located nearby or in areas protected by the government, or areas that have a high biodiversity value. Therefore, IIF's business activities do not directly bring any impact on biodiversity.

Furthermore, IIF closely pays attention to the biodiversity aspects of each project that will receive its financing, and ensures that there is an adequate support from relevant studies and mitigation plans should the project be located in a protected area.

However, some of the infrastructure projects financed by IIF may require large tracts of land, for example, hydroelectric power plant constructions and linear infrastructure such as roads and rails. Physical footprints of hydropower projects may not be immediately seen on land. However, such projects affect the water catchment (upstream) area as well as the downstream area. Meanwhile, roads can traverse multiple ecosystems and may alter or fragment certain habitats, which translates to a high likelihood of introduction of substances that may not naturally occur, and therefore may trigger the introduction of invasive species (pests, pathogens, etc.). Ecosystem conversions can also reduce or fragment existing habitats, and thus reduce the range of certain species.

IIF mendukung tindakan kliennya untuk melindungi ekosistem tempat proyek berada. Salah satu contohnya adalah pada proyek PLTB di Sulawesi Selatan. Burung dan kelelawar yang bertabrakan dengan turbin angin telah lama dianggap sebagai salah satu dampak lingkungan yang negatif dari turbin angin. Sebagai tindakan mitigasinya, klien IIF telah mengubah pencahayaan di sekitar turbin angin untuk mencegah burung, kelelawar, dan serangga mendekat. Klien juga memasang perangkat pendekripsi ekolokasi kelelawar untuk membantu menentukan jenis kelelawar yang sering mendekati turbin angin, sehingga klien dapat mengetahui kebiasaan kelelawar dan mengembangkan tindakan mitigasi lanjutannya.

IIF menjalankan strategi pengelolaan ekosistem yang holistik, yakni pada tingkatan lanskap. IIF menyaring area yang dilindungi secara hukum sebagaimana ditentukan pemerintah, sehingga memastikan semua persyaratan hukum setempat terpenuhi. IIF juga meninjau wilayah keanekaragaman hayati utama yang diakui secara internasional dan wilayah kritis lainnya yang diketahui dan diterima oleh komunitas ilmiah. Jika pembukaan lahan atau kerusakan terhadap alam tidak terhindarkan, IIF memberlakukan skema penggantian kerugian nilai keanekaragaman hayati, yang mengikuti prinsip "setara atau lebih baik". Ini berarti bahwa nilai keanekaragaman hayati yang digantikan oleh proyek haruslah setara atau lebih tinggi daripada dampak proyek tersebut.

IIF supports the measures taken by its clients to protect the ecosystem where the project takes place. One example is the wind turbine project in South Sulawesi. Birds and bats colliding with the wind turbine has long been considered as one of the environmental impacts of wind turbine. As a mitigation measure, the client has changed lighting around the wind turbine to prevent birds, bats, and insects come closer. The client also installed bat echolocation detection devices to help determine the type of bats that often approach the wind turbine, so the client could find out the bat's habits and develop follow-up mitigation measures.

IIF follows an overall strategy of looking at the ecosystem from a holistic point of view, i.e., at the landscape level. IIF screens legally protected areas designated by the government, ensuring that all local legal requirements are met. IIF acknowledges that there may be regions outside of legally protected borders, therefore IIF also reviews internationally-recognised key biodiversity areas and other critical areas known to and accepted by the scientific community. If clearing or damage is unavoidable, IIF may impose a biodiversity offset scheme, which adheres to the "like-for-like or better" principle. This means that that biodiversity offsets must be designed to conserve an equal or higher biodiversity value than the actual impact of the project.

Kinerja Emisi Emission Performance **305-1, 305-5**

Keterangan Description	Jumlah (Satuan) Amount (Unit)			Perubahan Change (%)
	2018	2019	2020	
Emisi dari: Emissions from:				
Operasi kantor (konsumsi bahan bakar) (Rp) Office operations (fuel consumption) (Rp)	284,977,451	221,642,130	143,421,468	-35
Konsumsi listrik (kg CO ₂ eq) Electricity consumption (kg CO ₂ eq)	187.77	233.65	193.92	-17
Reduksi emisi dari: Emission reduction from:				
Operasi kantor (konsumsi toner/tinta printer) (Rp) Office operations (printer toner/ink consumption) (Rp)	129,684,275	163,487,252	46,118,268	-72
Konsumsi listrik (kWh) Electricity consumption (kWh)	210,737	262,232	217,645	-17
Konsumsi kertas (rim) Paper consumption (reams)	530	745	150	-80

103-1, 103-2, 103-3: Air dan Efluen/Water and Effluents

Pengelolaan Limbah dan Efluen

Sejak Maret 2020, seluruh aktivitas operasional IIF berlangsung di Kantor Pusat IIF di Jakarta dan di tempat tinggal pribadi para karyawannya. Oleh karena itu, IIF tidak memiliki mekanisme untuk mengukur jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Akan tetapi, karena IIF sepenuhnya bergerak di bidang jasa, maka IIF tidak menghasilkan limbah dalam bentuk apapun dalam jumlah yang signifikan, selain limbah berupa sampah perkantoran (seperti kertas). Dengan demikian, IIF tidak mengukur ataupun mengelola limbah atau efluen berskala industri. **306-3**

IIF membiayai proyek-proyek infrastruktur yang mungkin menghasilkan limbah dan efluen dalam jumlah signifikan, bergantung pada jenis industri dari masing-masing proyek tersebut. IIF terus mendorong setiap kliennya untuk melaksanakan SEP, khususnya terkait Prinsip 3: "Pencegahan dan Pengurangan Polusi, dan Perubahan Iklim". Akan tetapi, mekanisme pengelolaan limbah di masing-masing proyek menjadi tanggung jawab proyek itu sendiri. Pengelolaan dan pelaporan kinerja pengelolaan limbah di proyek-proyek tersebut di luar cakupan dan batasan dari laporan IIF ini.

Kendati demikian, IIF mendorong setiap kliennya untuk melaporkan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh masing-masing proyek. IIF juga mengapresiasi langkah yang diambil pihak klien untuk mengurangi dampak dari limbah yang dihasilkan, seperti yang dilakukan pada salah satu proyek yang melakukan pemilahan sampah berbahaya, organik, anorganik, serta limbah logam. Lebih lanjut lagi, IIF juga mewajibkan setiap proyek untuk melaporkan hasil pemantauan lingkungan mereka, misalnya terkait kualitas udara, air, dan gangguan suara. **303-2, 306-2**

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Pada tahun 2020, IIF tidak menerima keluhan dari masyarakat terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan dari praktik bisnisnya secara langsung. Akan tetapi, di tahun 2020, sejumlah proyek yang dibiayai IIF menerima keluhan dari kelompok masyarakat di sekitar proyek. Rincian lebih lanjut mengenai hal tersebut tersedia dalam pembahasan berjudul Mekanisme Penanganan Keluhan di dalam Laporan Keberlanjutan ini.

103-1, 103-2, 103-3: Air dan Efluen/Water and Effluents

Management of Waste and Effluents

Beginning from March 2020, all of IIF's operational activities have been taking place in the Head Office located in Jakarta and in the private premises of employees', and therefore IIF has no means to measure the amount of waste produced from its operations. However, being a purely services-based company, IIF does not generate any significant amount of waste of any type beyond office supplies (such as paper). Consequently, IIF has no established mechanism to measure or manage industrial-scale waste or effluents. **306-3**

IIF finances infrastructure projects that may or may not have generated significant amounts of waste and effluents, depending on the type of industry they are in. In those IIF-financed projects, while IIF encourages them to uphold the SEP, in particular related to Principle 3: "Pollution Prevention and Abatement, and Climate Change", mechanisms for waste management are the purview of the respective projects. The responsibility for managing and reporting on these projects' waste management performance is beyond the Company's scope and boundary.

Nevertheless, IIF encourages each of its clients to report on the environmental impacts of each project. IIF also appreciates the steps taken by the clients to reduce the impact of the generated waste, such as one of the projects that segregates hazardous, organic, inorganic, and metal scrap waste. Furthermore, IIF also requires each project to report their environmental monitoring results, such as those related to air and water quality and noise level. **303-2, 306-2**

Environmental Grievance Mechanism

In 2020, IIF did not receive any grievances from the public regarding its direct non-compliance with environmental regulations from its business practices. However, some of IIF-financed projects received grievances from the communities surrounding these projects in 2020. Further details are provided in the sub-section titled Grievance Redress Mechanism in this Sustainability Report.

PRODUK DAN LAYANAN YANG SETARA DAN BERKELANJUTAN

Sustainable and Equitable Products and Services

IIF senantiasa memegang teguh komitmen untuk memberikan layanan atas produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan setara kepada nasabah atau calon nasabah yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan atau layanan *advisory* dari IIF.

IIF mempunyai komitmen untuk selalu menyeimbangkan layanan *advisory* ke sektor publik dan sektor swasta.

Terkait layanan konsultasi sektor publik, IIF menyediakan layanan:

1. Konsultan Transaksi untuk membantu klien sektor publik, seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD pada setiap tahapan proses penyediaan infrastruktur, baik yang menggunakan modalitas KPBU (sesuai Peraturan Presiden No. 38/2015) atau non-KPBU atau penugasan kepada BUMN/BUMD.
2. Konsultan Kebijakan, yakni membantu dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur.

Sementara bagi layanan konsultasi sektor swasta, IIF memberikan layanan konsultan Keuangan dan Transaksi, dengan lingkup layanan yang dapat mencakup pelaksanaan uji tuntas proyek, penyiapan proyek, penyiapan struktur komersial, studi kelayakan, penyiapan penawaran lelang untuk memenangkan tender konsesi, penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman proyek, valuasi, pendampingan *joint venture*, dan pendampingan M&A.

Selain itu, sesuai dengan POJK No. 46/2020, IIF dapat memberikan konsultasi untuk proyek dalam sektor-sektor berikut:

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. Infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. Infrastruktur konservasi energi;
- l. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. Infrastruktur kawasan;

IIF continues to uphold its commitment to provide quality products and services that meet the needs and are equal to customers or prospective customers, those who have fulfilled the requirements to obtain financing or advisory services from IIF.

IIF has a commitment to providing advisory services to both Public Sector and Private Sector in a balanced proportion.

With regards to consultation services to public sector clients, IIF provides services such as:

1. Transaction Advisory Services to assist public sector clients such as Ministry, Regional Government, and State-owned/Regional-owned enterprise throughout the phases of infrastructure provision, which modality can be a form of PPP (as per Presidential Regulation No. 38/2015) or non-PPP or assignment to State-Owned/Regional-Owned Enterprises.
2. Policy Advisory Services, i.e. assists in formulating infrastructure-related policies and/or building government capacities for the purpose of accelerating and improving infrastructure delivery.

As for services for private sector clients, IIF provides Financial and Transaction Advisory Services, which scope may include due diligence, project preparation and structuring, feasibility analysis, concession bid preparation, concession negotiation, loan and/or equity fundraising, valuation, joint venture advisory, and M&A advisory.

In accordance with POJK No. 46/2020, IIF is also eligible to advise projects in these sectors:

- a. Transportation infrastructure;
- b. Road infrastructure;
- c. Water resources and irrigation infrastructure;
- d. Drinking water infrastructure;
- e. Centralised wastewater management system infrastructure;
- f. Local wastewater management system infrastructure;
- g. Solid waste management system infrastructure;
- h. Telecommunications and informatics infrastructure;
- i. Electricity infrastructure;
- j. Oil and gas infrastructure and renewable energy;
- k. Energy conservation infrastructure;
- l. Urban facility infrastructure;
- m. Educational facility infrastructure;
- n. Sports facilities, as well as arts infrastructure;
- o. Regional infrastructure;

- p. Infrastruktur pariwisata;
- q. Infrastruktur kesehatan;
- r. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan;
- s. Infrastruktur perumahan rakyat;
- t. Infrastruktur bangunan negara; and
- u. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf t atas persetujuan OJK.

IIF menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam menjalankan bisnis usahanya, terutama mengenai produk dan layanan yang berkaitan dengan pembangunan proyek infrastruktur kepada pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap informasi melalui situs Perseroan, www.iif.co.id, dan media sosial.

Secara berkala, IIF memperbarui informasi yang ada di dalam situs resmi tersebut untuk memastikan agar situs tetap mudah digunakan untuk memudahkan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan

IIF menyediakan produk dan layanan yang terbagi menjadi dua kategori, yakni produk pembiayaan dan layanan *advisory* (konsultasi) bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Proyek-proyek infrastruktur yang dapat menerima pembiayaan di IIF tersebut haruslah memenuhi prinsip-prinsip S&E, karena sesuai mandat dari pemegang sahamnya, IIF harus menyediakan produk dan layanan yang berkelanjutan dan memenuhi prinsip S&E tersebut. Oleh karena itu, semua produk yang dikembangkan oleh IIF merupakan produk keuangan yang berkelanjutan.

Di 2020, IIF menawarkan tiga produk baru:

1. Fasilitas Bantuan Peristiwa Luar Biasa: fasilitas pembiayaan sementara untuk mendukung lembaga yang secara finansial terkena dampak pandemi Covid-19. Fasilitas ini membantu klien untuk mengatasi masalah arus kas sementara mereka sampai pandemi mereda.
2. Skema Kolaborasi LC/BG: skema kerja sama antara IIF dengan bank, sehingga bank dapat memberikan fasilitas LC/BG bagi nasabah IIF sebagai imbalan atas kredit IIF dan untuk berbagi pendapatan dengan IIF.
3. Pembiayaan *Takeout*: bertujuan untuk mengatasi kendala terkait periode pembayaran yang dihadapi bank saat mendanai proyek infrastruktur. IIF diharapkan untuk bertindak sebagai penjamin, yang berarti bahwa IIF akan mengambil risiko pembiayaan kembali dari klien jika pemberi pinjaman yang ada memutuskan untuk tidak memperpanjang pinjaman setelah pinjaman awal selesai dan klien tidak dapat menemukan pemberi pinjaman baru untuk mendanai kembali pinjaman tersebut.

- p. Tourism infrastructure;
- q. Health infrastructure;
- r. Penitentiary infrastructure;
- s. Public housing infrastructure;
- t. State building infrastructure; and
- u. Other infrastructures not included in letters a through t with OJK's approval.

IIF consistently applies the principle of information disclosure in conducting its business, especially regarding products and services related to infrastructure project development to stakeholders. This information disclosure can be accessed through the Company's website at www.iif.co.id. As well as through social media.

IIF regularly updates the information contained in the official website to ensure that the site remains user-friendly to facilitate various parties in meeting their needs and interests.

Innovations of Sustainable Finance Products

IIF offers products and services that are divided into two categories, namely financing products and advisory (consultation) services aimed at infrastructure projects in Indonesia.

To obtain financing from IIF, these infrastructure projects must adhere to the S&E principles, because in line with the mandate given by its shareholders, IIF must provide products and services that are sustainable and aligned with the S&E principles. As a consequence, all products developed by IIF are sustainable finance products.

In 2020, IIF offered three new products:

1. Extraordinary Event Relief Facility: a temporary financing facility to support institutions that are financially affected by Covid-19 pandemic. This facility helps clients to alleviate their temporary cash flow problems until the pandemic subsides.
2. LC/BG Collaboration Scheme: a collaboration scheme between IIF and banks in providing LC/BG facility, whereby the bank can issue LC/BG for IIF's clients on the back of IIF credit and to share the revenue with IIF.
3. Takeout Financing: aims to address the tenure related constraints faced by banks when financing infrastructure projects. IIF is expected to act as guarantor, meaning that IIF will take refinancing risk of the client in case the existing lender decided not to extend the loan after the original loan is completed and the client could not find new lenders to refinance the loan.

Kontribusi dan Dampak Produk dan Layanan

Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur yang terdepan implementasi keberlanjutan di Indonesia, IIF selalu menerapkan prinsip-prinsip S&E dalam setiap proyek yang dibiayainya.

Pada tahun 2020, IIF menandatangani 8 kesepakatan pembiayaan baru (dengan 1 *refinancing* dan 1 relaksasi). Seluruh proyek tersebut merupakan proyek yang bersifat berkelanjutan. **416-1**

Sesuai komitmen IIF untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, IIF membiayai proyek pembangkit listrik biomassa pertama di Indonesia yang menggunakan tandan buah kosong dari kelapa sawit yang dapat menghasilkan listrik hingga 9,8 MW setelah mulai beroperasi komersial.

Pemberian fasilitas ini akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, konversi limbah berbahaya kelapa sawit menjadi energi, penyediaan listrik bagi 4.454 rumah menengah atau 10.888 rumah di Provinsi NAD, serta reduksi sekitar 31.322 ton emisi CO₂ per tahun.

Pada tahun 2020, tidak terdapat produk/jasa yang telah diberikan kepada klien yang kemudian ditarik kembali oleh IIF. **416-2**

Hingga akhir periode pelaporan, IIF belum pernah menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan atas produk yang ditawarkannya. **418-1**

Products and Services' Contributions and Impacts

As an infrastructure financing institution that is at the forefront of sustainability principles implementation in Indonesia, IIF always applies the principles of S&E in every project it finances.

In 2020, IIF signed 8 new financing commitments (with 1 refinancing and 1 relaxation). All of the projects were sustainable projects. **416-1**

In line with IIF's commitment to supporting the development of renewable energy, the Company provided financing facility to Indonesia's first biomass power plant project that uses palm oil empty fruit bunches that may generate up to 9.8 MW of electricity upon commercial operation.

The potential positive impacts of this financing, among others, are creation of jobs, conversion of hazardous oil palm waste to energy, provision of electricity to 4,454 medium-scale households or in total 10,888 houses in NAD Province, and reduction of approximately 31,322 tonnes of CO₂ emission per year.

In 2020, IIF did not withdraw any products/services that had been previously delivered to its clients. **416-2**

Up to the end of the reporting period, IIF had yet to conduct a customer satisfaction survey related to its product offerings. **418-1**

INDEKS ISI GRI

GRI Content Index

102-55

Indikator Indicator	Penjelasan	Halaman Pages	Description
102-1	Nama organisasi	12	Name of the organisation
102-2	Aktivitas, merek, produk, dan layanan	16-17	Activities, brands, products, and services
102-3	Lokasi kantor pusat	12	Location of headquarters
102-4	Lokasi operasi	15	Location of operations
102-5	Kepemilikan dan bentuk badan hukum	12,14	Ownership and legal form
102-6	Pasar yang dilayani	15	Markets served
102-7	Skala organisasi	13	Scale of the organisation
102-8	Informasi tentang karyawan dan pekerja lainnya	54-56	Information on employees and other workers
102-9	Rantai pasokan	16-17	Supply chain
102-10	Perubahan signifikan terhadap organisasi dan rantai pasokannya	18	Significant changes to the organisation and its supply chain
102-11	Prinsip atau pendekatan kehati-hatian	47-49	Precautionary principle or approach
102-12	Inisiatif eksternal	18	External initiatives
102-13	Keanggotaan dalam asosiasi	18	Membership of associations
102-14	Pernyataan dari pengambil keputusan senior	19-22	Statement from senior decision-maker
102-15	Dampak, risiko, dan kesempatan utama	19-22	Key impacts, risks, and opportunities
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	28-40, 52	Values, principles, standards, and norms of behavior
102-18	Struktur tata kelola	23-27	Governance structure
102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	23-27	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics
102-21	Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	44-46	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics
102-27	Pengetahuan kolektif dari organ tata kelola tertinggi	27	Collective knowledge of highest governance body
102-30	Efektivitas proses manajemen risiko	41	Effectiveness of risk management processes
102-32	Peran organ tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	23-27	Highest governance body's role in sustainability reporting
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	44-45	List of stakeholder groups
102-41	Perjanjian kerja bersama	60	Collective bargaining agreements
102-42	Identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan	44-45, 49	Identifying and selecting stakeholders
102-43	Pendekatan pelibatan pemangku kepentingan	44-45, 49	Approach to stakeholder engagement
102-44	Topik dan isu utama yang diangkat	45-46	Key topics and concerns raised
102-45	Entitas yang diikutsertakan dalam laporan keuangan konsolidasian	1	Entities included in the consolidated financial statements
102-46	Definisi batasan topik dan isi pelaporan	1-2	Defining report content and topic boundaries
102-47	Daftar topik material	1-2	List of material topics
102-48	Pernyataan ulang	1-2	Restatement of information
102-49	Perubahan dalam pelaporan	1-2	Changes in reporting
102-50	Periode pelaporan	1-2	Reporting period
102-51	Tanggal terbit laporan terbaru	1-2	Date of most recent report
102-52	Siklus pelaporan	1-2	Reporting cycle
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan terkait laporan	1-2	Contact point for questions regarding the report
102-54	Klaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1-2	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

Indikator Indicator	Penjelasan	Halaman Pages	Description
102-55	Indeks isi GRI	1-2, 70-71	GRI content index
102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1-2	External assurance
103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	41-42,	Explanation of the material topic and its boundary
103-2	Pendekatan manajemen dan komponen-komponennya	52-54, 56, 59-60, 61-62	The management approach and its components
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen		Evaluation of the management approach
202-1	Rasio upah untuk karyawan di tingkat terendah berdasarkan gender dibandingkan upah minimum regional	59	Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	61-62	Significant indirect economic impacts
205-1	Operasi yang dinilai risikonya terkait korupsi	41-42	Operations assessed for risks related to corruption
205-2	Komunikasi dan pelatihan terkait kebijakan dan prosedur anti-korupsi	41-42	Communication and training about anti-corruption policies and procedures
301-1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume	7, 63	Materials used by weight or volume
302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi	63-64	Energy consumption within the organisation
302-3	Intensitas energi	63-64	Energy intensity
302-4	Reduksi konsumsi energi	63-64	Reduction of energy consumption
303-2	Pengelolaan dampak-dampak terkait pembuangan air	66	Management of water discharge-related impacts
304-1	Wilayah operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam atau bersebelahan dengan wilayah yang dilindungi atau wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar wilayah yang dilindungi	64-65	Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
304-2	Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan layanan terhadap keanekaragaman hayati	64-65	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity
305-1	Emisi GRK Langsung (Scope 1)	7, 65	Direct (Scope 1) GHG emissions
305-5	Reduksi emisi GRK	8, 11, 65	Reduction of GHG emissions
306-2	Pengelolaan dampak-dampak signifikan terkait limbah	8, 66	Management of significant waste-related impacts
401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan temporer atau paruh-waktu	58-59	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees
401-3	Cuti punya anak	61	Parental leave
402-1	Periode minimum untuk penyampaian kepada karyawan terkait perubahan operasional	60	Minimum notice periods regarding operational changes
403-6	Upaya mendukung kesehatan karyawan	59	Promotion of worker health
403-8	Karyawan yang termasuk dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	59	Workers covered by an occupational health and safety management system
403-9	Cedera akibat kerja	60	Work-related injuries
403-10	Penyakit akibat kerja	60	Work-related ill health
404-1	Rata-rata jumlah jam pelatihan per tahun per karyawan	56	Average hours of training per year per employee
404-2	Program peningkatan kemampuan karyawan dan program bantuan transisi	57-58	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan kinerja dan tinjauan pengembangan karier	61	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
416-1	Penilaian dampak produk dan layanan terhadap kesehatan dan keselamatan	69	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories
416-2	Insiden ketidakpatuhan terkait dampak produk dan layanan terhadap kesehatan dan keselamatan	69	Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services
418-1	Keluhan yang dapat dibuktikan terkait pelanggaran privasi konsumen dan hilangnya data konsumen	69	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data

GLOSARIUM

Glossary

Singkatan Abbreviation	Kepanjangan	Full Name
ADB	Asian Development Bank	Asian Development Bank
BBM	Bahan Bakar Minyak	Petroleum
BEI	Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah	Regional Government-Owned Enterprise
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	State-Owned Enterprise
CAP	Rencana Tindakan Korektif	Corrective Action Plan
CO₂eq	Karbon dioksida ekuivalen	Carbon dioxide equivalent
COD	Tanggal Operasi Komersial	Commercial Operation Date
DEG	Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH	Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH
EIA	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Environmental Impact Analysis
EMP	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Environmental Management Plan
ESIA	Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial	Environmental and Social Impact Assessment
GRM	Mekanisme Penanganan Keluhan	Grievance Redress Mechanism
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank for Reconstruction and Development
IDX	Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange
IEA	Pemeriksaan Lingkungan Tahap Awal	Initial Environmental Examination
IFC	International Finance Corporation	International Finance Corporation
JPY	Yen Jepang	Japanese Yen
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Public - Private Partnership
kWh	kilowatt-jam	kilowatt-hour
LNG	Gas Alam Cair	Liquefied Natural Gas
MASTEL	Masyarakat Telematika Indonesia	Indonesian Telematics Society
METI	Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia	Indonesian Renewable Energy Society
MMSCFD	Juta kaki kubik standar per hari	Million standard cubic feet per day
MW	megawatt	megawatt
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Financial Services Authority
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	Regional Drinking Water Company
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Hydroelectric Power Plant
PLTB	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	Wind Turbine
PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro	Mini-Hydro Power Plant
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Geothermal Power Plant
PMK	Peraturan Menteri Keuangan	Regulation of the Finance Minister
POJK	Peraturan OJK	OJK Regulation
PPP	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Public - Private Partnership
PTLS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Solar Power Plant
S&E	Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental
SED	Divisi Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental Division
SEDD	Uji Kelayakan Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental Due Diligence
SEP	Prinsip-Prinsip Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental Principles
SEMS	Sistem Pengelolaan dan Penilaian Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental Management System
SEOJK	Surat Edaran OJK	OJK Circular
FWG	Sustainable Finance Working Group	Sustainable Finance Working Group
SMBC	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SMI	Sarana Multi Infrastruktur	Sarana Multi Infrastruktur
SMV	Special Mission Vehicle	Special Mission Vehicle
SOE	Badan Usaha Milik Negara	State Owned Enterprise
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum	Drinking Water Supply System
USD	Dolar Amerika Serikat	United States Dollar

2020

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report



PT Indonesia Infrastructure Finance

Prosperity Tower Floor 53rd-55th
District 8, Sudirman Central
Business District (SCBD), Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

T. +62 21 5082 6600
F. +62 21 5082 6601
E. info@iif.co.id

 www.iif.co.id
 **Indonesia Infrastructure Finance**
 @pt_IIF